

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PNPM-GENERASI
SEHAT CERDAS (GSC) DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN DI KECAMATAN LARANTUKA**



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

KORNELIUS K.KERAF

NIM: 018397053

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**

ABSTRACT

Analysis on the Implementation of PNPM- GSC Policy to Overcome the Poverty in Larantuka Sub-District

Kornelius K. Keraf
Universitas Terbuka
korkkeraf@gmail.com

The key words: Public's Policy, the Implementation of Public's Policy, the overcoming of poverty.

The public policy run by government referring to how it should be done, and why it should be carried out, and any kinds of differences may occur where all these will follow a sequence of principles needed to overcome any handicaps or problems happen while looking for the ways to get any targets as the objectives of PNPM-GSC is one of outputs of public policy which, in the level of implementation of public policy, covers National level, Provincial level, Regencial level, Sub-district level, even in the level of villages. As one of the empowerment products, PNPM-GSC is also operated in Larantuka Sub-district, the Regency of Flores Timur, the Province of Nusa Tenggara Timur.

Based on any data from the studies or researches done before in Sub-district of Larantuka, we find that there are two objects as the 'locus' researches, they are: the researches done in Mokantarak Village, and in the village of Ekasapta. Reading the data available we know that PNPM-GSC succeeded to overcome the poverty in these two places. The variables of the two researches are the interaction variable, the power- resource variable, the disposition variable, and the structure of bureaucracy variable. Those variables show the significant influences on any efforts to overcome the poverty in Larantuka sub-district. Such significant influences can be seen from the data of interviews, done by the researcher, which involved 20 informen: 10 informen are from Mokantarak village and the other 10 informen are from Ekasapta village. Upon the difference of two circumstances, the data presented also gives the different influence on the success of the programme implementation as stated in PNPM-GSC's programmes.

The interaction variable shows that the interaction or communication ran so well with the implementation's stakeholder either in Mokantarak or Ekasapta village. Power-resource variable shows the two villages (Mokantarak and Ekasapta) got the programme based on the technical guidance (JUKNIS) directed by the implementors (stakeholders). Disposition variable shows that there was a government's commitment as a stakeholder or an agent in the future for the two villages. Then the structure of bureaucracy presents that there was an evaluation done periodically both in Mokantarak and Ekasapta villages with a great

expectation that all the programmes of PNPM-GSC still exists and will be run in the future.

The four variables above give a great influence on the efforts to overcome the poverty in the villages of Mokantarak and Ekasapta. In this research, therefore, the writer draws the conclusion that the significant role of the government gives a great effects on the participation of the villagers or societies as the agents in running the programmes.

Dealing with the efforts to overcome the poverty, it can be said that the overcoming of poverty in Mokantarak and Ekasapta villages is the relative one because the informen have average ability to fulfill their daily needs although their incomes are relatively still average below if compared with their neighbours's.

UNIVERSITAS TERBUKA

ABSTRAK

Analisis Implementasi Kebijakan PNPM-GSC Dalam Pengetasan Kemiskinan Di Kecamatan Larantuka

Kornelius K.Keraf
Universitas Terbuka
korkkeraf@gmail.com

Kata Kunci: kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, pengetasan kemiskinan

Kebijakan publik dilakukan oleh pemerintah, bagaimana mengerjakannya, mengapa perlu dikerjakan dan perbedaan apa yang dibuat yang diikuti oleh serangkaian prinsip untuk menghadapi hambatan sambil mencari peluang untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan. PNPM-Generasi Sehat Cerdas merupakan salah satu output dari kebijakan publik yang dalam tahapan implementasi kebijakan publik berada pada tataran Nasional, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan atau Desa. Sebagai salah satu produk pemberdayaan PNPM Generasi Sehat Cerdas juga diimplementasikan di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Dari hasil kajian berdasarkan data penelitian di Kecamatan Larantuka ditemukan bahwa dari 2 obyek penelitian yaitu di Desa Mokantarak dan Kelurahan Ekasapta ditemukan bahwa PNPM-Generasi Sehat Cerdas dapat membantu mengatasi kemiskinan. Variabel penelitian masing-masing yaitu variabel komunikasi, variabel sumberdaya, variabel disposisi dan variabel struktur birokrasi menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Larantuka. Signifikansi itu terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan sebanyak 20 orang yang masing-masing tersebar 10 informan di desa Mokantarak dan 10 informan di Kelurahan Ekasapta. Dua kondisi lingkungan yang berbeda mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi yang tertuang dalam program PNPM-GSC.

Variabel Komunikasi menunjukkan bahwa baik di Desa Mokantarak maupun di Kelurahan Ekasapta dapat menjalankan komunikasi dengan baik dengan implementor program. Variabel sumberdaya menunjukkan bahwa kedua Desa Mokantarak dan Kelurahan Ekasapta menerima program berdasarkan petunjuk teknis (JUKNIS) yang diarahkan oleh implementor. Variabel Disposisi di Desa Mokantarak dan Kelurahan Ekasapta masing-masing ditemukan bahwa adanya komitmen dari pemerintah sebagai pelaku untuk masa yang akan datang. Variabel struktur birokrasi menunjukkan adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala yang terjadi di desa Mokantarak dan Kelurahan Ekasapta bahkan diharapkan program PNPM-GSC tetap ada untuk waktu yang akan datang.

Empat variabel di atas berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di desa Mokantarak dan di kelurahan Ekasapta. Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa sinergisitas peran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat sebagai pemanfaat program.

Dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan maka dapat dikatakan bahwa pengentasan kemiskinan di desa Mokantarak dan kelurahan Ekasapta merupakan pengentasan kemiskinan relatif karena informan rata-rata memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan minimum, namun secara relatif pendapatannya masih di bawah rata-rata penduduk sekitarnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PNPM-
GENERASI SEHAT CERDAS (GSC) DALAM
PENGETASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN
LARANTUKA

Penyusun TAPM : KORNELIUS K. KERAF
NIM : 018397053
Program Studi : Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Kamis/31 Oktober 2013

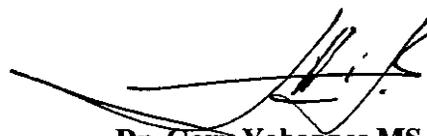
Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Frans Gana, M.Si
NIP: 196060141987021001

Pembimbing II,



Dr. Goru Yohannes, MS
NIY: 02112854

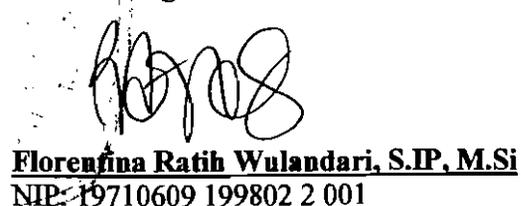
Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Suciati, M.Sc
NIP: 19520313 198503 2 001

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Florenina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si
NIP: 19710609 199802 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

N a m a : **KORNELIUS K. KERAF**
NIM : **018397053**
Program Studi : **Administrasi Publik**
Judul TAPM : **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PNPM-
GENERASI SEHAT CERDAS (GSC) DALAM
PENGETASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN
LARANTUKA**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Komisi Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : **Minggu/13 Oktober 2013**

Waktu : **19.00 – 21.00 wita**

Dan telah dinyatakan : **Lulus**

KOMISI PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji :
Dr. Suciati, M.Sc



Penguji Ahli :
Prof. Dr. Martani Huseini



Pembimbing I
Dr. Frans Gana, M.Si



Pembimbing II
Dr. Goru Yohannes, MS



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan PNPM-Generasi Sehat Cerdas (GSC) Dalam Pengetasan Kemiskinan Di Kecamatan Larantuka adalah hasil karya saya sendiri, seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Larantuka, Juli 2013

Yang Menyatakan



KORNELIUS K. KERAF
NIM: 018397053

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Terbuka Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed.,Ph.D
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Ibu Dr. Suciati, M.Sc
3. Kepala UPBJJ-UT Kupang Bapak Drs. Alam Malau, M.Si selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
4. Pembimbing I Bapak Dr. Frans Gana, M.Si dan Pembimbing II Bapak Dr. Goru Yohannes.,MS yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
5. Bapak Prof. Dr. Martani Huseini selaku Penguji Ahli dalam penelitian ini.
6. Kabid Ilmu Sosial Politik Ibu Florentina Rati Wulandari, S.IP.,M.Si selaku penanggung jawab program Magister Administrasi Publik;
7. Almarhum kedua orangtua serta anggota keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral;
8. Istriku tercinta Marni Hadjon dan putra-putriku tersayang Emanuel Keraf, Paulinus Keraf, Fredyk Keraf dan Nona Tiansy Keraf yang selalu mendukung saya dalam setiap aktivitas penyusunan TAPM ini;
9. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Larantuka, Agustus 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstract	i
Abstrak	iii
Lembar Persetujuan	v
Lembar Pengesahan	vi
Pernyataan Bebas Plagiat	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori	8
1. Kebijakan	8
2. Kebijakan Publik	9
3. Implementasi Kebijakan Publik	10
4. Pemberdayaan Masyarakat dan Kemiskinan	15
B. Kajian Terdahulu	18
C. Kerangka Konseptual	20
BAB III. METODE PENELITIAN	25
A. Desain Penelitian	25
B. Informan	25
C. Instrumen Penelitian	26
D. Prosedur Pengumpulan Data	27
E. Metode Analisis Data	28

BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	29
B. Gambaran Umum Program PNPM-GSC	31
C. Gambaran Umum Responden.....	44
D. Analisis Hasil Penelitian Studi Implementasi	74
Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – Generasi Sehat Cerdas Terhadap Pengetasan Kemiskinan	
E. Keterkaitan Implementasi Kebijakan Publik dalam Komunikasi,	86
Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi terhadap Pengentasan Kemiskinan	
F. Implikasi Strategis Implementasi Kebijakan	89
BAB V . SIMPULAN DAN SARAN	91
A. Simpulan.....	91
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
Lampiran: 1 Pedoman Wawancara.....	97
Lampiran: 2 Dokumentasi Peneliti dan Informan Kelurahan Ekasapta	103
Lampiran: 3 Dokumentasi Peneliti dan Informan di Desa Mokantarak.....	105
Lampiran: 4 Dokumentasi peneliti bersama Pemerintah Kecamatan,	106
Kelurahan dan Desa	
Lampiran: 5 Dokumentasi Peneliti dan Staf PNPM-GSC	107
Kecamatan Larantuka	
Lampiran 6 Kutipan hasil wawancara dengan informan	109

Daftar Gambar

Halaman

Gambar: 4.1 Peta Kabupaten Flores Timur	30
Gambar: 4.2 Struktur Organisasi PNPM Generasi Sehat Cerdas	43

UNIVERSITAS TERBUKA

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel : 4.1 Distribusi Informan di Kelurahan Ekasapta	44
Tabel: 4.2 Gambaran umum usia, jenis kelamin, pekerjaan dari informan	45
Tabel: 4.3 Gambaran Latar Belakang Pendidikan Informan	46
Tabel: 4.4 Peruntukan Program GSC Kelurahan Ekasapta	47
Tabel: 4. 5 Deskripsi prosentase jawaban informan terhadap	54
variabel komunikasi, variabel sumber daya, variabel disposisi dan	
variabel struktur birokrasi	
Tabel: 4.6 Deskripsi prosentase jawaban informan terhadap	57
variabel pengentasan kemiskinan Kelurahan Ekasapta	
Tabel : 4.7 Distribusi Informan Desa Mokantarak	58
Tabel: 4.8 Gambaran umum usia, jenis kelamin, pekerjaan	59
dari informan desa Mokantarak	
Tabel: 4.9 Gambaran Latar Belakang Pendidikan Informan	60
Desa Mokantarak	
Tabel: 4.10 Peruntukan Program GSC Desa Mokantarak	61
Tabel: 4.11 Deskripsi prosentase jawaban informan.....	67
desa Mokantarak terhadap variabel komunikasi,	
variabel sumber daya, variabel disposisi dan	
variabel struktur birokrasi	
Tabel: 4.12 Deskripsi prosentase jawaban informan desa mokantarak	70
terhadap variabel pengentasan kemiskinan	
Tabel: 4.13 Komparasi Hasil Penelitian PNPM GSC	83
di Kecamatan Larantuka	

Daftar Lampiran

	Halaman
Lampiran: 1 Pedoman Wawancara.....	97
Lampiran: 2 Dokumentasi Peneliti dan Informan Kelurahan Ekasapta	103
Lampiran: 3 Dokumentasi Peneliti dan Informan di Desa Mokantarak	105
Lampiran: 4 Dokumentasi peneliti bersama Pemerintah Kecamatan,	106
Kelurahan dan Desa	
Lampiran: 5 Dokumentasi Peneliti dengan Staf PNPM-GSC	107
Kecamatan Larantuka	
Lampiran 6 Kutipan Hasil Wawancara dengan informan	109

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007 dengan ditandai Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Proses pembangunan dibangun secara partisipatif, mendorong kesadaran kritis dan mengupayakan kemandirian masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Diharapkan dengan program ini dapat ditumbuh kembangkan di mana pada akhirnya masyarakat bukan sebagai obyek melainkan subyek dan tentunya kemiskinan yang terjadi dapat ditanggulangi.

Pelaksanaan PNPM Mandiri sesungguhnya telah dimulai tahun 2007, di mana salah satu bagian dari program tersebut adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program ini merupakan upaya meletakkan dasar-dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Selain itu, terdapat salah satu bagian program khusus untuk penanggulangan masyarakat miskin di perkotaan, program ini kemudian dikenal dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Seperti halnya program PPK, program ini juga mendorong dasar-dasar bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat rentan di wilayah perkotaan.

Menyangkut upaya pengembangan dan mempercepat proses pembangunan di wilayah yang tertinggal, maka elemen program yang dikembangkan PNPB dikenal dengan nama Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). Program ini bukan saja mencakup bagi wilayah-wilayah tertinggal, namun juga ditujukan bagi daerah-daerah yang terkena bencana serta konflik dan mulai tahun 2008 PNPB mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISSEW). Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya.

Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) merupakan suatu upaya untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal dan khusus. Pendekatan yang dilakukan dalam program P2DTK adalah pendekatan partisipatori dalam melibatkan masyarakat, keluarga miskin dan kelompok rentan. Kegiatan pembangunan daerah tertinggal melalui program P2DTK meliputi kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan ekonomi masyarakat, baik berupa pembangunan fisik infrastruktur maupun non fisik adalah merupakan salah satu komponen dalam rangka penguatan kapasitas pemerintah daerah. Hal tersebut yang oleh Sunarno (2005: 4) mengungkapkan bahwa kelembagaan pemerintah perlu dikembalikan pada hakekatnya yaitu *to serve the public* dengan reorientasi pada penanganan tugas-tugas untuk mengintegrasikan dan memelihara harmonisasi entitas social dan ekonomi, melindungi lingkungan, melindungi kerentanan dalam

masyarakat, memperkuat financial dan kapasitas administratif pemerintah daerah.

Dalam kaitan dengan program pengentasan kemiskinan maka PNPM khususnya pada program Generasi Sehat Cerdas yang selanjutnya disingkat menjadi PNPM-GCS juga terlaksana di Kecamatan Larantuk – Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur. Dalam penelitian ini peneliti dibantu pemangku kepentingan di kecamatan Larantuka menyarankan untuk mengambil penelitian di satu desa dan satu kelurahan. Dengan demikian obyek penelitian meliputi dua tempat dalam satu kecamatan. Beberapa fenomena sebagai *socio-control* dalam penelitian ini adalah disaat tingkat kebutuhan meningkat tetapi di sisi lain bahwa upaya mencukupi kebutuhan terutama dalam meningkatkan taraf hidup sehat dan langkah dalam mencerdaskan generasi belum sepenuhnya terjangkau. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan merupakan indikator penanganan terhadap kemiskinan sulit diberantas di Kabupaten Flores Timur dan kecamatan Larantuka pada khususnya.

Guliran bantuan PNPM-GSC yang sejak tahun 2007 dalam asumsi peneliti cukup membantu meningkatkan taraf dan kehidupan masyarakat di Kecamatan Larantuka. Namun beberapa indikasi teknis seperti proses dan sasaran program PNPM-GSC sampai kepada masyarakat di Kecamatan Larantuka masih mengalami hambatan. Di sisi lain peruntukan program sesuai hal tersebut terjadi karena implementasi kebijakan dalam tingkatan pemahaman masyarakat tentang program PNPM-GSC masih sangat minim. Minimnya pemahaman tentang isi program PNPM-GSC berdampak pada

pelaksanaan program. Kutipan dari Buletin Kuartal Edisi 5 (2009:3) yaitu” Kita harus melakukan koordinasi dengan berbagai penyedia layanan. Kita semua memiliki sumberdaya yang terbatas. PNPM, DelSos dan CRS, pemerintah, dan masyarakat. Jika kita tidak bekerja sama maka perubahan akan berjalan secara lambat atau hanya akan terjadi sedikit perubahan” ingin menegaskan bahwa pemberantasan kemiskinan merupakan tanggung jawab semua pihak. Di pihak lain kebijakan publik pemerintah setempat dalam hal ini PEMDA Flores Timur sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM di kabupaten Flores Timur dan khususnya Kecamatan Larantuka. Kebijakan dimaksud terutama bagaimana pencapaian *output* terutama rencana strategis implementasi yang diambil oleh PEMDA Flores Timur tepat sasaran dan sejalan dengan visi dan misi PNPM-GSC sebagai program Nasional yang menitikberatkan pada upaya peningkatan pendidikan dan gizi bagi ibu hamil dan anak balita.

Merujuk pada kondisi riil di Flores Timur maka peneliti ingin mengangkat kondisi tersebut dalam satu karya penelitian di kecamatan Larantuka sebagai bagian dari Kabupaten Flores Timur. Data lapangan menggambarkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan sulit teratasi walaupun setiap tahun ada program-program baik dari pemerintah ataupun lembaga swadaya yang bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Desa Mokantarak dan Kelurahan Ekasapta merupan bagian dari kelompok sasaran program PNPM-GSC. Ketercapain pelaksanaan isi program di desa Mokantarak tidak sebanding dengan di kelurahan Ekasapta. Desa Mokantarak menurut referensi dari kantor PNPM-GSC kecamatan Larantuka dinilai

berhasil dibandingkan dengan kelurahan Ekasapta. Dua kondisi yang berbeda dalam satu program yang sama. Peneliti kemudian menarik kesimpulan sementara bahwa adanya pemahaman yang berbeda tentang isi program baik di desa Mokantarak maupun di kelurahan Ekasapta. Tingkat pemahaman yang berbeda berimplikasi pada hasil dari pencapaian program PNPM-GSC. Berangkat dari fenomena ini maka peneliti mendalaminya dalam bentuk penelitian yang tertuang dalam judul : Analisis Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – Generasi Sehat Cerdas (GSC) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Larantuka.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan kondisi tersebut maka dalam penelitian ini masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – Generasi Sehat Cerdas (GSC) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Larantuka?

C. Tujuan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, maka harus ditentukan tujuan dan penelitian agar tidak kehilangan arah sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar disamping itu juga hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis variabel-variabel implementasi kebijakan publik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – GSC dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Larantuka.

1. Untuk menganalisis pengaruh Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)–GSC dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Larantuka.
2. Untuk menganalisis sinergisitas peran pelaku dan pemanfaat dalam implementasi kebijakan publik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – GSC dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Larantuka.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam pembahasan mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – GSC Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Larantuka diharapkan akan dapat memberikan kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Bagi lembaga akademik diharapkan dapat memberi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama studi implementasi kebijakan serta dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian relevan selanjutnya.
 - b. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian baik secara teoritis maupun praktek.

2. Kegunaan secara praktis

- a. diharapkan dari hasil analisis variabel-variabel implementasi kebijakan publik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – GSC dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Larantuka dapat memberikan gambaran signifikansi pengaruh keempat variabel tersebut dalam menjawab masalah pengentasan kemiskinan di kecamatan Larantuka.
- b. Diharapkan dari hasil analisis pengaruh variabel-variabel implementasi kebijakan publik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – GSC dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Larantuka dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi PEMDA Flores Timur dan Kecamatan Larantuka pada khususnya dalam menentukan implementasi kebijaksanaan dalam kaitan dengan pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Larantuka.
- c. Untuk menganalisis sinergisitas peran pelaku dan pemanfaat dalam implementasi kebijakan publik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – GSC dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Larantuka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan

Menurut Carl Friedrich (Wahab,2004:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu berhubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan:

Anderson (Anderson,2004:2) mengemukakan kebijakan sebagailangkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Suharto (2005:7) berpendapat bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana, dan konsistensi dalam mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan teori-teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat yang diperuntukan untuk masyarakat sendiri dan dipihak lain kebijakan merupakan upaya untuk mengatasi konflik.

2. Kebijakan Publik

Menurut Dye (Winarno : 2002) Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana mengerjakannya, mengapa perlu dikerjakan, dan perbedaan apa yang dibuat. Dengan demikian secara lebih luas kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Lebih lanjut menurut Dye bahwa keputusan pemerintah adalah kebijakan namun membiarkan sesuatu tanpa ada keputusan juga merupakan kebijakan.

Menurut R.S. Parker (Ekowati.2005:5) kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau krisis.

Lebih lanjut Mas Poro Lilik Ekowati (2005:4) dalam bukunya Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program, mengatakan bahwa kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi sebagai berikut :

- a. Kebijaksanaan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah.
- b. Kebijaksanaan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Kebijaksanaan Negara itu, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

Selanjutnya Miftah Thoha (2002:59) berpendapat bahwa dalam arti yang luas, kebijakan mempunyai dua aspek pokok, yaitu:

- a. Kebijakan merupakan pratika sosial, bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian suatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.

- b. Kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan, baik untuk mendamaikan klaim dari pihak-pihak yang konflik atau untuk menciptakan insentif terhadap tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menciptakan tujuan, akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Berdasarkan teori-teori di atas maka disimpulkan kebijakan publik adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip yang menggerakkan cara-cara bertindak yang terencana dan konsisten yang dilakukan oleh pemerintah tentang apa yang akan dikerjakan, mengapa perlu dikerjakan dalam satu keputusan.

3. Implementasi Kebijakan Publik

a. Menurut Nugroho

Menurut Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep. Berdasarkan hasil suatu penelitian diperoleh bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial, karena dari konsep-konsep perencanaan, rata-rata konsistensi implementasi dicapai antara 10 persen sampai dengan 20 persen saja (Nugroho, 2003:158).

Dalam implementasi kebijakan publik, menurut Nugroho (Adianto: 2006:14) terdapat dua pilihan langkah yang dapat dilakukan, yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pada prinsipnya, kebijakan bertujuan untuk melakukan intervensi. Dengan demikian, implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri.

b. Menurut George C.Edwards III

George C.Edwards III, yang dikutip dalam buku Dwiyanto Indiahono (2009;10) dan Chalid Sahuri dkk (2012: 85) yang mengatakan bahwa ada empat faktor atau variabel yang merupakan syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi. Keempat faktor tersebut adalah:

- 1) Komunikasi, ini merupakan hal yang sangat penting karena seorang implemeter dengan menguasai informasi yang cukup atau banyak, maka akan memperoleh kemudahan dalam pelaksanaan program. misalnya Aparat pemerintah sebagai implementer dengan menguasai informasi tentang program pembangunan pedesaan utamanya mengenai teknis perencanaannya maka dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.
- 2) Sumber daya (Resources), Sumberdaya ini meliputi empat komponen yaitu Staf yang cukup (jumlah dan mutu), Informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program, Kewenangan (Authority) yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program.
- 3) Disposisi yaitu sikap dan komitmen dari aparat pemerintah dalam pelaksanaan program, dengan semangat yang tinggi dan

sikap atau mental yang baik sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku, maka program akan berjalan sebagai mana mestinya.

- 4) Struktur birokrasi yaitu penanganan program sesuai dengan standard operating procedures (SOP) dengan koordinasi yang baik dari semua pihak yang terlibat. misalnya pemerintah,dengan aparatnya serta masyarakat.

c. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn (Subarsono,2005) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
- 2) Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non manusia (*non-human resources*).
- 3) Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

d. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Weimer dan Vining (1999:396) mempunyai pandangan bahwa ada tiga kelompok variabel besar yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu:

1) Logika Kebijakan.

Logika Kebijakan dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis. Isi dari suatu kebijakan atau program harus mencakup berbagai aspek yang dapat memungkinkan kebijakan atau program dapat diimplementasi pada tataran praktis.

2) Lingkungan tempat kebijakan

Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Lingkungan itu mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis.

3) Kemampuan implementor kebijakan.

Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari suatu implementor kebijakan.

e. Teori Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle (Sujianto, 2012: 100) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

Variabel isi kebijakan mencakup:

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran.

- 3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat.
- 5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.
- 6) Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- 2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

f. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Sujianto, 2012:103) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan atau undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*)

Karakteristik masalah mencakup tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan dan di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang sulit dipecahkan seperti kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu

sifat masalah itu sendiri dipengaruhi adanya kemudahan atau tidaknya suatu program yang diimplementasikan.

Karakteristik kebijakan mencakup kejelasan isi kebijakan, besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan, serta tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

Lingkungan kebijakan mencakup kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan serta sikap dari kelompok memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksanaan secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana.

Dari beberapa teori di atas menurut Nugroho (Aminuddin Bakry, 2010: 6) bahwa tidak ada pilihan model seperti model-model di atas yang terbaik dalam implementasi kebijakan. Satu hal yang penting yakni implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan kebijakan itu sendiri. Dengan demikian menurut Wahab (Safawi Indra dkk, 2012: 132) implementasi kebijakan publik merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan.

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Kemiskinan

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencakup tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak akan pernah habis untuk diperbincangkan. Berbagai strategi dalam pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Tapi masih saja formulasi untuk

pengentasan kemiskinan tersebut belum mampu sepenuhnya menyelesaikan persoalan mengenai kemiskinan itu sendiri.

Menurut Marwotohadi (2005:108) Kemiskinan terbagi dalam beberapa pengertian, yaitu :

a. Kemiskinan berdimensi ekonomi

Kemiskinan absolut, suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang atau sekelompok masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan relatif, mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan minimum, namun secara relatif pendapatannya masih di bawah rata-rata penduduk sekitarnya.

b. Kemiskinan berdimensi sosial budaya

Kemiskinan kultural, suatu faktor kemiskinan yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan faktor budaya. Budaya kemiskinan ini dapat ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai apatis, apolitis dan sebagainya. Untuk itu serangan terhadap kemiskinan pada masyarakat ini sama artinya dengan pengikisan budaya ini. Apabila kemiskinan ini tidak dihilangkan maka kemiskinan ekonomi akan sulit diatasi.

c. Kemiskinan berdimensi struktural atau politik

Kemiskinan struktural atau politik, kemiskinan ini muncul sebagai akibat masyarakat miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik, sehingga menduduki struktur sosial paling bawah.

d. Kemiskinan berdasar pola waktunya, terbagi dalam beberapa pengertian, yaitu :

- 1) *Persisten poverty*, kemiskinan yang telah kronis dan turun temurun, biasanya daerahnya minim sumber daya alam.
- 2) *Cyclical poverty*, kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
- 3) *Seasonal poverty*, kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus-kasus nelayan dan petani gurem ketika masa paceklik atau pada masa gagal panen.
- 4) *Accidental poverty*, kemiskinan yang disebabkan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Menurut Henriawan (Dwi Wahyu, 2006: 256) mengungkapkan bahwa kompleksitas masalah kemiskinan tidak hanya menyangkut rendahnya pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, ketidakberdayaan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan public (*powerlessness*), ketidakmampuan menyampaikan aspirasi (*voicelessness*) serta berbagai masalah mengenai pembangunan manusia (*human development*).

Ukuran kemiskinan secara umum dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, Konsep ini dikembangkan di Indonesia di dinyatakan sebagai " *inability of the individual to met basic needs*" (Marwotohadi : 2005:97).

B. Penelitian terdahulu oleh peneliti-peneliti yang mencakup substansi atau topik yang relevan

Dalam kajian terdahulu dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan, dan posisi dari penelitian tesis ini, dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa kajian terdahulu akan disajikan sebagai berikut:

1. Sukidjo (2009)

Sukidjo dalam penelitiannya yang berjudul *Strategi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan Pada PNPM Mandiri* menyimpulkan bahwa PNPM Mandiri merupakan program pengentasan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan, yang mengembangkan proses pembelajaran melalui (1) penciptaan iklim cara melakukan sosialisasi nilai-nilai universal kemanusiaan, (2) penguatan kelembagaan, berupa pembelajaran pembentukan lembaga kemasyarakatan lokal, dan penyusunan program berdasarkan aspirasi warga, (3) penguatan potensi dengan cara memberikan bantuan pendanaan, pelatihan dan (4) perlindungan yang berupa kepastian program yang berpihak pada warga miskin.

2. Dicky Djatnika Utama (2009)

Dalam penelitiannya berjudul *Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan* menarik kesimpulan dalam penelitiannya bahwa pendidikan merupakan investasi dan kesempatan untuk berkompetisi guna mendapatkan kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan dan turut terlibat dalam proses pembangunan. Dengan

pendidikan yang terprogram baik dan menjangkau semua (*education for all*) seperti target MDGs (*Millenium Development Goals*) dengan kualitas tertentu maka pendidikan menjadi instrumen paling efektif untuk memotong mata rantai kemiskinan yang ada di tanah tercinta Indonesia.

3. Chalid Sahuri, Sofia Achnes dkk (2012)

Dalam penelitian mereka yang berjudul Implementasi PNPM Mandiri

Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Pangkalan

Kerinci Timur akhirnya menyimpulkan bahwa implementasi

penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri di Kelurahan

Pangkalan Kerinci Timur secara keseluruhan kurang berhasil. Hal ini

terjadi karena kurangnya kemampuan pelaksana kegiatan dalam mengelola

dan membina masyarakat miskin melalui sumber daya yang dimiliki.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan ini adalah

komunikasi yang kurang dipahami oleh masyarakat, ketidakjelasan dan

ketidakkonsistennya petugas dalam menyampaikan informasi-informasi.

Sumber daya, pada aspek kuantitas petugas pelaksana dan insentif yang

diberikan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembankan

oleh petugas. Faktor lainnya disposisi, dari aspek dukungan yang semakin

lama semakin mengendur disebabkan masalah insentif. Faktor struktur

birokrasi dilihat dari aspek SOP yang sulit untuk dipahami dan kurang

sistematis. Kemudian aspek fragmentasi dari pihak kecamatan dan

kecamatan yang terlalu ikut campur dalam pelaksanaan.

4. BAPPENAS (Maimun Sholeh: 2009)

BAPPENAS mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan *objective and subjective*.

Berdasarkan dua kajian terdahulu serta teori-teori yang dikemukakan dalam penelitian ini maka selanjutnya dibuat kerangka konseptual sebagai pedoman penelitian oleh peneliti.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggambarkan dan sekaligus mengkaji lebih dalam tentang Analisis Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ;

1. Komunikasi, apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Berdasarkan konsep ini peneliti menjabarkannya dalam komunikasi PNPM yaitu komunikasi antara pengurus/pelaksana program dengan kelompok sasaran program untuk memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai PNPM Mandiri kepada masyarakat sebagai penerima program, maupun kelompok masyarakat lainnya serta kepada para pelaku program.
2. Sumberdaya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Perintah-perintah implementasi kebijakan mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber daya dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber daya tersebut meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.
3. Disposisi, yakni watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan

dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dukungan, adanya dukungan terhadap suatu kebijakan oleh para pelaksana, masyarakat, aparatur pemerintahan baik kelurahan, kecamatan sampai kepada kabupaten serta lembaga-lembaga yang ada di daerah tersebut. Dukungan akan keberadaan PNPM Mandiri di kecamatan Larantuka sangat menentukan sekali keberhasilan program. Dukungan dapat berupa tanggapan positif dari aparatur pemerintah kelurahan, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta dan pihak-pihak lain yang dianggap mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Dukungan juga dapat berupa motivasi dan semangat dari pihak-pihak yang dianggap sangat menentukan atau yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan-kebijakan di desa.

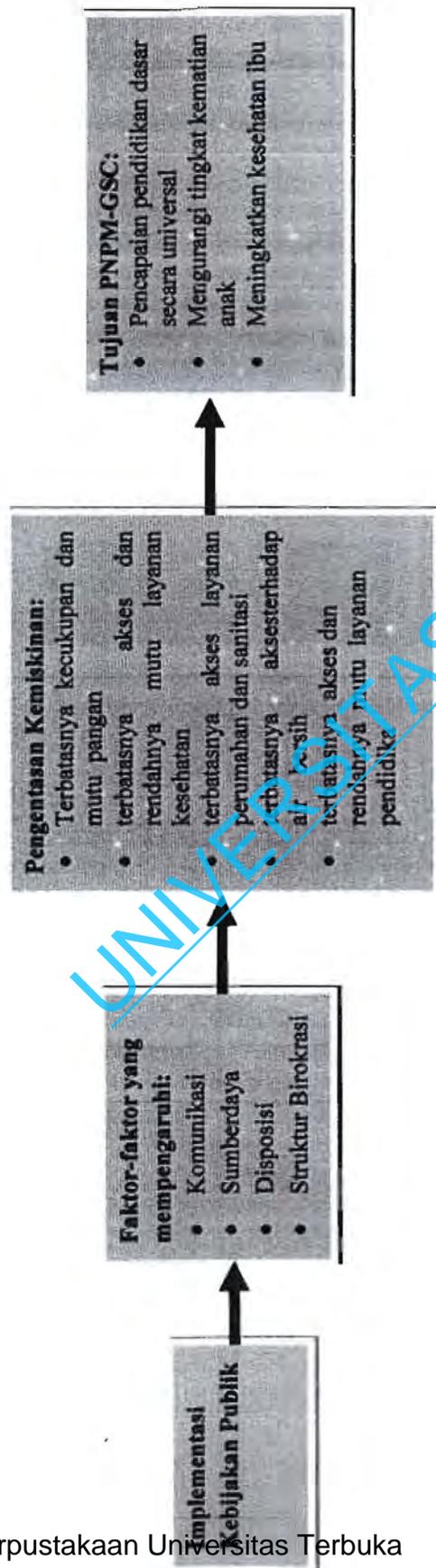
4. Struktur Birokrasi, terlalu panjangnya struktur organisasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja usulan dasarnya (*Standard operating procedures, SOP*). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan. SOP tidak menghambat para pelaksana kebijakan

dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Begitu juga dalam pengambilan keputusan atau kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan tidak terbentur dengan prosedur-prosedur birokrasi yang rumit dan berbelu.

Terkait program pengetasan kemiskinan maka dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa indikator kemiskinan seperti yang telah diuraikan BAPPENAS, yaitu:

- a. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan
- b. terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan
- c. terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi
- d. terbatasnya akses terhadap air bersih
- e. terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan

Berdasarkan Kajian Empirik di atas maka digambarkan kerangka konseptual dalam penelitian sebagai berikut:



Gambar Kerangka Konseptual Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur-Nusa Tenggara Timur. Pertimbangan yang bisa diangkat dalam pemilihan lokasi ini adalah lokasi penelitian yang mudah terjangkau dan adanya fenomena bahwa dengan adanya Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – GSC Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Larantuka dapat ditingkatkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2012: 7) menjelaskan bahwa metode ini disebut sebagai metode interpretasi karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

B. Informan

Adapun subyek yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Camat Kecamatan Larantuka, Lurah Kelurahan Ekasapta, Fasilitator Kecamatan Larantuka, Fasilitator Kelurahan Ekasapta, masyarakat pelaku dan pemanfaat program PNPM-GSC di kelurahan Ekasapta, kepala Desa Mokantarak, Fasilitator Desa Mokantarak, masyarakat pelaku dan pemanfaat program PNPM-GSC desa Mokantarak.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur fenomena penelitian yang menghasilkan suatu data untuk dianalisis atau diberikan suatu interpretasi sehingga mempunyai makna. Adapun instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, catatan hasil observasi dan alat dokumentasi berupa kamera foto yang ditujukan kepada beberapa informan.

Kisi-kisi instrumen penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel: 3. 1
Variabel, Dimensi dan Indikator

Variabel	Dimensi	Indikator	Item Nomor pada pedoman wawancara
Komunikasi	Pengetahuan dan informasi kebijakan publik	a. Dokumen yang relevan dengan kebijakan b. Pelaku kebijakan c. Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan (Sumber: Dunn:2000:608)	1 s/d 3
Sumberdaya	Kemampuan implementor kebijakan	a. Staf yang cukup (jumlah dan mutu) b. Informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program. c. Kewenangan (Authority) yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggungjawab. d. fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program George C.Edwards III (Dwiyanto Indiahono 2009;10)	4 s/d 8
Disposisi	Wewenang implementasi kebijakan publik (pemerintah)	a. sikap dan komitmen dari aparat pemerintah dalam pelaksanaan program b. sikap atau mental yang baik sesuidengan prosedur atau aturan	9 s/d 10

		yang berlaku Sumber: George C.Edwards III (Dwiyanto Indiahono2009;10)	
Struktur Birokrasi	Para pembuat keputusan dalam menentukan kebijakan publik	a. Perumusan masalah kebijakan b. Peramalan c. Rekomendasi d. Pemantauan dan evaluasi (Sumber : Dunn:2000:608)	11 s/d 14
PengentasanKeiskinan	Keterbatasan pangan, akses kesehatan dan pendidikan	a. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan b. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan c. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi d. Terbatasnya akses terhadap air bersih e. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan (Sumber: BAPPENAS (MaimunSholeh, 2009: 5)	15 s/d 19

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan mencatat segala fenomena yang terjadi di tempat penelitian yang mendukung data penelitian. Pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Menurut Sugiyono (2004: 130) wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Pertanyaan-pertanyaan tertulis dalam wawancara disusun dalam bentuk kuesioner dengan alternatif jawaban yang sudah disiapkan.

E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif, dimana data yang terkumpul terlebih dahulu dilakukan klasifikasi, analisis, dan interpretasi sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Menurut Hasan (2003:98) analisis kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Adapun sumber data analisis kualitatif ini diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder.

Data kemudian dikategorisasi dan klasifikasi secara bertahap atas jawaban informan yang dilanjutkan dengan interpretasi data kualitatif. Menurut Hasan (2003:138) interpretasi data merupakan penjelasan yang terinci tentang arti sebenarnya dari data yang dianalisis atau dipaparkan, yang bertujuan untuk mencari keseimbangan suatu penelitian dan menghasilkan suatu konsep yang bersifat menerangkan atau menjelaskan. Dengan demikian data yang terkumpul dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan dan diinterpretasikan kemudian diambil kesimpulan sebagai bagian integral dari hasil penelitian.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. Secara geografis luas kecamatan larantuka adalah 75, 91 km² dan secara demografis jumlah penduduk kecamatan larantuka berdasarkan Registrasi Penduduk 2007 adalah 33.514 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 16.557 jiwa dan perempuan sebanyak 16.957 jiwa serta tingkat kepadatan penduduk adalah 441,50 km². Secara pemerintahan, batas wilayah kecamatan Larantuka sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan Lewolema. Sebelah selatan berbatasan dengan selat flores. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Ile Mandiri dan laut flores dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Demong Pagong. Untuk melihat lebih detail batas wilayah kecamatan Larantuka maka dibawah ini ditunjuk dengan peta kabupaten Flores Timur.

Gambar: 4.1

Peta Kabupaten Flores Timur



Sumber: data kecamatan Larantuka 6 Juni 2013

Terkait kepentingan penelitian maka peneliti mengambil 1 desa dan 1 kelurahan di kecamatan Larantuka sebagai obyek penelitian yaitu desa Mokantarak dan Kelurahan Ekasapta. Dari data demografi ditemukan bahwa kedua tempat yang dijadikan obyek penelitian di kecamatan Larantuka memiliki jumlah penduduk yang berbeda. Kelurahan Ekasapta dengan kepadatan penduduk 1.810 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.761 jiwa dan perempuan sebanyak 3.571 jiwa. Desa Mokantarak terdiri dari 1.268 jiwa

yang terdistribusi dalam jumlah laki-laki sebanyak 649 jiwa dan perempuan sebanyak 619 jiwa. Berdasarkan data demografi tersebut maka dapat dikatakan bahwa tingkat kepadatan penduduk di Kelurahan Ekasapta lebih padat dibandingkan dengan desa Mokantarak. Dengan demikian diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat ditemukan gap tingkat partisipasi obyek penelitian yang dijadikan informan dalam penelitian.

B. Gambaran Umum Program PNPM-GSC

1. Sasaran Program dan Penerima Manfaat

Pengertian sasaran program adalah anggota masyarakat yang secara rutin dipantau perkembangan atau perolehan layanan bidang kesehatan ibu-anak dan pendidikan dasar. Dengan demikian, sasaran dari program ini adalah seluruh ibu-ibu yang sedang hamil, ibu menyusui dan bayinya, anak-anak balita, serta anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama.

Penerima manfaat adalah anggota masyarakat yang menerima manfaat secara langsung dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Penerima manfaat Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) diutamakan bagi mereka yang termasuk dalam kelompok rumah tangga miskin dan yang selama ini belum mendapatkan pelayanan kesehatan ibu anak dan pendidikan dasar.

2. Prinsip-prinsip

Prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan program meliputi:

a. Keberpihakan kepada orang miskin

Pengertian prinsip keberpihakan kepada orang miskin adalah orientasi pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, baik dalam proses maupun pemanfaatan harus ditujukan bagi penduduk miskin dan atau anggota masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan secara memadai. Orang

miskin harus didorong untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan seluruh kegiatan baik di desa maupun antar desa, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya.

b. Keberpihakan kepada perempuan

Pengertian keberpihakan kepada perempuan adalah bahwa program ini memberikan akses atau kesempatan yang luas bagi kaum perempuan, terutama dari kelompok miskin untuk berpartisipasi pada setiap tahapan yang akan dilaksanakan.

c. Kepedulian kepada masa depan anak-anak

Pengertian prinsip kepedulian kepada masa depan anak-anak adalah bahwa program ini memberikan perhatian yang sangat besar pada kondisi dan masa depan pendidikan dan kesehatan anak-anak bagi perkembangan mereka, terutama sekali

mereka yang berasal dari anggota rumah tangga miskin dan yang tidak mendapatkan pelayanan secara memadai.

d. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan adalah seluruh kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat dan pelaku program yang berdomisili di desa dan kecamatan harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan program serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.

e. Akuntabilitas

Setiap pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat ataupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang disepakati.

f. Partisipasi

Melalui program ini, masyarakat (termasuk yang selama ini belum mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar) berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan

sumbangan tenaga, pikiran, dana maupun barang yang dimilikinya secara sukarela.

g. Desentralisasi

Pemerintah Lokal bersama masyarakat mempunyai tanggungjawab bersama dalam upaya meningkatkan pendidikan dan kesehatan bagi kelompok penduduk miskin.

Masyarakat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas untuk memutuskan dan mengelola kegiatan yang didanai melalui program secara mandiri dan partisipatif. Pemerintah lokal lebih berperan pada upaya memberikan bantuan teknis dan mendorong bagi pengembangan dan keberlanjutannya.

3. Nilai-Nilai

Nilai-nilai yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program ini meliputi:

a. Kejujuran

Setiap proses pengambilan keputusan, pengelolaan dana, dan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan jujur tanpa adanya upaya rekayasa dan manipulasi yang dapat merugikan masyarakat miskin.

b. Kesetaraan

Setiap tahapan program terbuka bagi keterlibatan seluruh warga masyarakat, tanpa membedakan latar belakang, asal-usul, agama, status, jenis kelamin dan lainnya.

Semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.

c. Kerelawanan

Keterlibatan dalam setiap kegiatan, semata-mata dilandaskan pada keikhlasan untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, tanpa mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok.

d. Keadilan

Setiap keputusan yang diambil harus menekankan asas keadilan yang didasarkan pada kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat miskin.

e. Keuletan

Seluruh kegiatan dilandasi oleh semangat kerja keras dan tidak mudah putus asa, untuk membantu masyarakat miskin.

4. Ukuran Keberhasilan

Ukuran atau indikator keberhasilan merupakan kondisional yang akan dicapai oleh masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dalam rangka mengikuti program ini. Ukuran keberhasilan ini dimaksudkan agar masyarakat memfokuskan pada pencapaian tujuan program dan tidak hanya melakukan kegiatan pendidikan dan kesehatan secara umum. Ukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :

4.1. Bidang Kesehatan, meliputi:

- ❖ Setiap ibu hamil diperiksa oleh bidan, minimal 4 kali pemeriksaan selama masa kehamilannya.
- ❖ Setiap ibu hamil mendapatkan minimal 90 butir pil Fe (penambah darah) selama masa kehamilannya.
- ❖ Setiap proses kelahiran ditangani oleh tenaga bidan atau dokter

- ❖ Setiap ibu yang melahirkan dan bayinya mendapatkan perawatan nifas oleh bidan atau dokter, minimal 2 kali perawatan dalam waktu 40 hari setelah proses persalinan.
- ❖ Setiap bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi standar secara lengkap
- ❖ Setiap bayi usia 12 bulan ke bawah berat badannya ditimbang dan selalu naik pada setiap bulannya (untuk bayi di bawah usia 6 bulan, berat badannya naik lebih dari 500 g per bulan dan bayi usia 6-12 bulan naik lebih dari 300 g).
- ❖ Setiap anak usia 6 bulan sampai 59 bulan mendapatkan Vitamin A, 2 kali dalam setahun
- ❖ Setiap anak balita (bawah lima tahun) ditimbang sebulan sekali secara rutin.

4.2. Bidang Pendidikan, meliputi:

- ❖ Setiap anak usia sekolah dasar (7 tahun ke atas) terdaftar sebagai siswa Sekolah Dasar (SD/MI)
- ❖ Tingkat kehadiran setiap siswa SD/MI dalam mengikuti proses belajar mengajar, minimal 85%.
- ❖ Setiap anak usia sekolah menengah pertama yang sudah lulus SD/MI terdaftar sebagai siswa SMP/MTs
- ❖ Tingkat kehadiran setiap siswa SMP/MTs dalam mengikuti proses belajar mengajar, minimal 85%.

5. Pelaku Program di Desa

Pelaku program di desa meliputi :

a. Pemerintahan Desa

Peran Pemerintahan desa, dalam hal ini adalah Kepala Desa dan perangkatnya serta Badan Perwakilan/Permusyawaratan desa (BPD) adalah menandatangani pernyataan kesanggupan desa untuk berpartisipasi dalam program dan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah-musyawarah di tingkat desa.

b. Fasilitator Desa/Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (FD/KPMD)

FD atau KPMD adalah warga masyarakat yang bersedia dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Desa untuk memfasilitasi masyarakat melaksanakan tahapan proses program di tingkat desa sejak proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pelestarian kegiatan. Setiap desa memilih dan menetapkan 2 FD/KPMD, dengan minimal 1 dari FD/KPMD tersebut adalah perempuan atau diperbolehkan juga keduanya adalah perempuan. Kader-kader kesehatan, kader posyandu yang masih aktif di desa dapat dipilih menjadi FD/KPMD. Untuk memfasilitasi masyarakat dibutuhkan orang-orang yang mampu dan mau meluangkan waktu yang cukup, karena itu para penyedia layanan seperti bidan desa, kepala sekolah, kepala desa tidak dapat dipilih sebagai FD/KPMD. Untuk membantu FD/KPMD dalam menyebarluaskan informasi program dan membantu memfasilitasi pertemuan ditingkat dusun dan kelompok maka di setiap dusun perlu membentuk beberapa orang kader masyarakat (kader dusun). Untuk itu

aspek kerelawanan, mau meluangkan waktu, kejujuran diharapkan ada pada diri para kader masyarakat.

c. *Tim Pertimbangan Musyawarah Desa (TPMD)*

TPMD dibentuk dan dipercaya untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada musyawarah desa dalam menetapkan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan dalam

PNPM Generasi. Jumlah anggota TPMD sebanyak 11 orang. Dari sebelas orang anggota yang dipilih dengan komposisi minimal adalah 6 orang perempuan. Pelaku program di tingkat desa dapat menjadi anggota tim ini, kecuali aparat pemerintah desa (Kepala Desa atau perangkat desa dan pasangannya). Anggota tim ini dipilih secara berjenjang mulai dari tingkat dusun atau RT oleh masyarakat dan di tingkat desa oleh para calon dari wakil dusun itu sendiri. Kelompok ini akan mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa.

Tugas TPMD secara umum adalah:

- a. Membentuk Tim Kerja yang bertugas untuk penyusunan usulan dan monitoring.
- b. Melakukan rapat untuk merumuskan kegiatan yang dapat membantu meningkatkan kondisi pendidikan dasar dan kesehatan ibu dan anak di masyarakatnya
- c. Melakukan rapat untuk menyusun prioritas kegiatan dan membuat rekomendasi kepada musyawarah desa tentang jenis kegiatan yang akan dikerjakan dan didanai melalui swadaya, BLM, atau sumber

dana lainnya, d. Melakukan rapat evaluasi terhadap pencapaian ukuran keberhasilan secara rutin setiap bulan sekali

Dalam TPMD, selanjutnya dipilih diantara mereka 3 orang sebagai Tim Kerja untuk penyusunan usulan dan monitoring.

Tugas Tim Kerja untuk penyusunan usulan dan monitoring sebagai berikut :

- a. Bersama FD/KPMD, mencocokkan gagasan-gagasan kegiatan hasil diskusi terarah dengan ukuran keberhasilan, sebagai bahan rapat perumusan gagasan.
- b. Bersama FD/KPMD mendokumentasikan hasil rapat perumusan gagasan sebagai bahan untuk MAD Alokasi Dana dan Lokarya dengan penyedia layanan.
- c. Bersama FD/KPMD mendokumentasikan hasil MAD Alokasi Dana dan lokakarya dengan penyedia layanan sebagai bahan untuk rapat prioritas usulan.
- d. Bersama FD/KPMD menulis proposal atau usulan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa
- e. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan perolehan layanan kegiatan dari sasaran program
- f. Mendorong atau menggerakkan masyarakat untuk mencapai seluruh ukuran keberhasilan
- g. Melakukan audit antar desa setiap 3 bulan sekali

6. Pelaku program di Kecamatan

Pelaku program di tingkat kecamatan meliputi:

a. Camat

Camat berperan sebagai pembina pelaksanaan program di wilayah kecamatan. Camat juga berperan dalam memfasilitasi koordinasi antara masyarakat desa dengan Puskesmas dan cabang Dinas Pendidikan Nasional (Dinas Diknas) di wilayahnya.

Camat beserta aparatnya juga berperan memfasilitasi penyelenggaraan proses musyawarah antar desa (MAD).

b. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK)

PjOK adalah seorang Kasi pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan di kecamatan.

c. Puskesmas

Kepala Puskesmas atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten berperan sebagai pembina pelaksanaan program di wilayah cakupan pelayanan Puskesmas itu berada. Tugas Puskesmas (terutama para bidan desa) adalah memberi masukan dan memfasilitasi kegiatan bidang kesehatan, seperti: kegiatan posyandu, penyuluhan masalah kesehatan, pengadaan bidan jika dibutuhkan masyarakat, serta memberikan fasilitasi lainnya yang mendukung program. Dalam program ini, puskesmas berkoordinasi dengan fasilitator.

d. Cabang Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) dan sekolah

Kepala cabang Dinas pendidikan kecamatan atas nama Dinas Kabupaten berperan sebagai pembina pelaksanaan program dalam bidang pendidikan dasar di wilayah cakupan cabang dinas itu berada. Tugas Cabang Dinas Pendidikan termasuk pihak sekolah adalah memberi masukan dan memfasilitasi kegiatan dalam pengadaan guru-guru atau fasilitas pendukung pendidikan dasar lainnya, apabila dibutuhkan oleh masyarakat, serta memberikan fasilitasi lainnya yang mendukung program. Khusus untuk pihak sekolah, pengisian daftar hadir siswa secara harian menjadi sebuah kewajiban yang harus diisi. Dalam program ini, cabang dinas Diknas dan sekolah berkoordinasi dengan fasilitator.

e. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan PNPM Generasi di tingkat antar desa termasuk mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.

Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa. UPK Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sudah ada dapat ditetapkan sebagai unit pengelola administrasi keuangan dan operasional pelaksanaan PNPM Generasi di tingkat antar desa.

f. Kelompok Kerja (Pokja)

Pokja dibentuk untuk mengelola dana untuk kegiatan yang tidak langsung dilaksanakan sekaligus, tetapi dilaksanakan berkali-kali secara rutin (atau yang bersifat *multiyears*), Dalam program ini, dapat dibentuk beberapa Pokja, seperti:

- ❖ Pokja Pendidikan Dasar, untuk kegiatan seperti: beasiswa anak SD & SMP, bantuan transportasi anak sekolah.
- ❖ Pokja Kesehatan Ibu-Anak, untuk kegiatan seperti: bantuan transportasi ibu hamil dan bayinya menuju tempat layanan, pemberian makanan tambahan untuk bayi atau balita gizi buruk/kurang dan ibu hamil.
- ❖ Pokja Dukungan Layanan dan penyuluhan, untuk kegiatan honor atau transportasi guru tidak tetap (guru honorer), transportasi bidan dan penyuluhan pendidikan atau kesehatan.

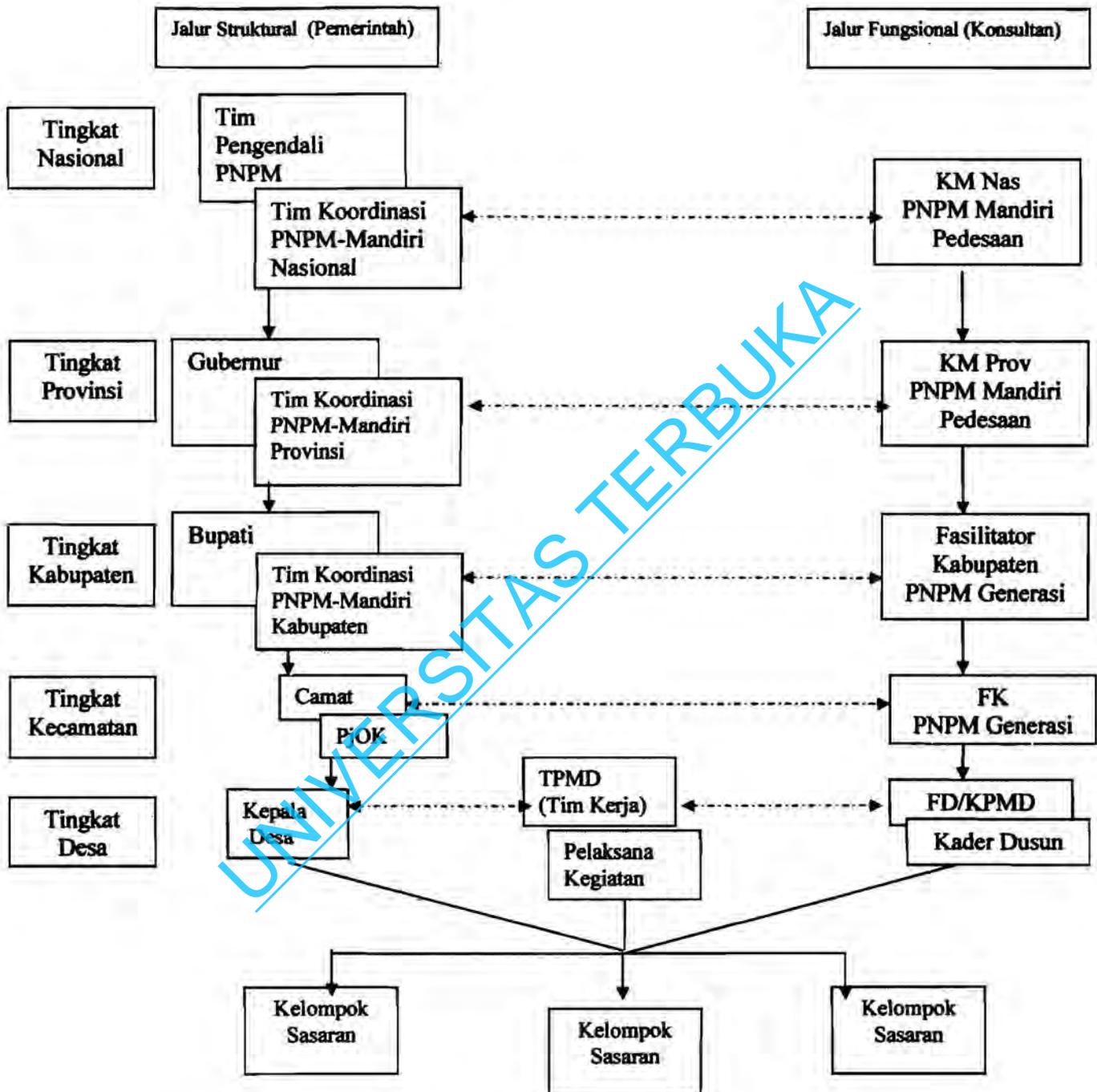
Pembentukan Pokja dilakukan dengan memperhatikan jenis-jenis kegiatan yang diusulkan dari desa-desa. Kegiatan dari desa-desa yang sejenis atau relevan dijadikan satu Pokja sebagaimana di atas. Jenis pokja dan pengurus yang akan ditetapkan dibahas dan dipilih pada saat Musyawarah Antar Desa. Masing-masing Pokja, minimal terdiri dari 3 orang yang berasal dari unsur: TPMD, FD/ KPMD, Komite Sekolah, Kader Kesehatan (Kader Posyandu), Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan. Tugas pokok Pokja adalah mencairkan dana BLM dari rekening kolektif UPK dan menyalurkan ke Pelaksana Kegiatan di desa-desa. Untuk kepentingan pencairan dana, maka masing-masing pokja dapat membuka rekening

dengan spesimen tanda tangan: wakil pokja, UPK, FK (selama masih program) dan/atau tokoh masyarakat yang dipilih di MAD. Rekening pokja disimpan di kantor UPK.

g. *Fasilitator Kecamatan (FK)*

FK merupakan pendamping masyarakat yang bertugas memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan setiap tahapan program mulai dari tahap sosialisasi, pelatihan, pemetaan sosial, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. FK juga berperan dalam membimbing FL/KPMD, Kader Dusun atau pelaku-pelaku program di tingkat desa dan kecamatan. Dalam melakukan tugasnya FK selalu berkoordinasi dengan pelaku-pelaku program lainnya di tingkat kecamatan dan kabupaten. Setiap kecamatan akan ditempatkan 2 orang FK, dengan salah satunya diutamakan berlatar belakang pendidikan teknik sipil, yang jika ada kegiatan infrastruktur perdesaan menjadi tugas dan tanggungjawabnya untuk memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis.

Gambar: 4.2
Struktur Organisasi PNPM Generasi Sehat Cerdas



Sumber: Buku Petunjuk Teknis Operasional PNPM-Generasi Sehat dan Cerdas (Versi B)
Tim Tim Koordinasi Pusat PNPM PPK 2008

C. Gambaran Umum Responden

Responden yang dijadikan informan dalam penelitian ini meliputi dua desa/kelurahan di kecamatan Larantuka. Profil keseluruhan kedua desa/kelurahan tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

1. Kelurahan Ekasapta

Tabel : 4.1
Distribusi Informan di Kelurahan Ekasapta

Nama Lingkungan	RW	RT	Kepala Keluarga		Jumlah KK	P	W	Jmlah Penduduk
			L	P				
I	I	1	39	2	41	82	79	161
		2	39	-	39	89	89	178
	II	3	43	-	43	85	84	169
		4	43	4	47	87	84	171
II	III	5	59	1	60	122	113	235
		6	65	2	67	123	120	243
	IV	7	54	-	54	110	104	214
		8	70	6	76	118	115	233
III	V	9	45	-	45	85	81	166
		10	52	1	53	89	84	173
	VI	11	48	5	53	82	82	164
		12	34	-	34	77	72	149
IV	VII	13	35	-	35	72	69	141
		14	43	-	43	79	74	153
	VIII	15	30	2	32	74	74	148
		16	37	5	42	63	68	131
V	IX	17	42	5	47	93	93	186
		18	37	2	39	99	94	193
	X	19	35	3	38	92	85	177
		20	30	-	30	89	97	186
Jumlah Penduduk					1.810	1.761	3.571	

Sumber: data kelurahan Ekasapta, 5 Juni 2013

Dari jumlah penduduk di atas maka yang dijadikan informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang (10 kepala keluarga). Kesepuluh informan tersebut tersebar di setiap lingkungan. Secara detail profile kesepuluh informan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel: 4.2
Gambaran umum usia, jenis kelamin, pekerjaan dari informan

No	Informan	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	RT/RW	Lama Mengikuti Program GSC	Keterangan
1.	I	37	L	Nelayan	01/01	2012	Pelaku dan penerima manfaat
2.	II	30	P	Ibu RT	03/02	2012	Pelaku dan penerima manfaat
3.	III	53	L	Nelayan	15/08	2007	Penerima manfaat
4.	IV	42	P	Ibu RT	19/10	2008	Pelaku dan penerima manfaat
5.	V	40	L	Ojek	03/02	2010	Penerima manfaat
6.	VI	38	L	Ojek	10/05	2011	Penerima manfaat
7.	VII	35	P	Ibu RT	17/19	2012	Pemanfaat
8.	VIII	38	P	Ibu RT	20/10	2011	Pelaku dan penerima manfaat
9.	IX	33	P	Ibu RT	10/05	2010	Pelaku dan penerima manfaat
10.	X	26	P	Ibu RT	18/19	2010	Pelaku dan penerima manfaat

Sumber: data primer, diolah 2013

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan bahwa sebanyak 4 orang informan adalah pria dan sebanyak 10 orang adalah perempuan. Sebanyak 6 orang informan adalah pelaku dan pemanfaat program GSC dan sebanyak 4 orang informan adalah pemanfaat program GSC. Selain itu pekerjaan informan dapat dikatakan bahwa sebanyak 6 orang adalah ibu rumah tangga, sebanyak 2 orang adalah nelayan dan sebanyak 2 orang berprofesi sebagai tukang ojek. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informan yang diteliti dalam penelitian ini adalah kebanyakan berlatar belakang ibu rumah tangga atau dapat dikatakan sebesar 60 % berlatar belakang ibu rumah tangga, sebesar 20 % adalah nelayan dan 20 % adalah tukang ojek. Selain itu dapat disimpulkan juga bahwa sebesar 60 % informan adalah pelaku dan pemanfaat program GSC dan sebesar 40 % adalah

pemanfaat dari program GSC. Sedangkan usia responden berkisar antara 26 tahun sampai dengan 53 tahun.

Tabel: 4.3
Gambaran Latar Belakang Pendidikan Informan

No	Informan	PENDIDIKAN				
		SD	SMP	SMA	D3	S1
1.	I	-	-	✓	-	-
2.	II	-	✓	-	-	-
3.	III	✓	-	-	-	-
4.	IV	-	-	✓	-	-
5.	V	-	✓	-	-	-
6.	VI	-	-	✓	-	-
7.	VII	✓	-	-	-	-
8.	VIII	-	-	✓	-	-
9.	IX	-	-	✓	-	-
10.	X	-	✓	-	-	-

Sumber: data primer diolah 2013

Berdasarkan Tabel: 3 maka dapat dikatakan bahwa sebanyak 2 orang informan adalah berpendidikan SD, sebanyak 3 orang informan berpendidikan SMP dan sebanyak 5 orang berpendidikan SMA. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebesar 20 % informan berpendidikan SD, sebesar 30 % berpendidikan SMP dan sebesar 50 % berpendidikan SMA.

Tabel: 4.4
Peruntukan Program GSC

No	Informan	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	RT/RW	Lama Mengikuti Program GSC	Peruntukan Program GSC
1.	I	37	L	Nelayan	01/01	2012	Pendidikan anak
2.	II	30	P	Ibu RT	03/02	2012	Pendidikan anak
3.	III	53	L	Nelayan	15/08	2007	Pendidikan anak
4.	IV	42	P	Ibu RT	19/10	2008	Pendidikan anak
5.	V	40	L	Ojek	03/02	2010	Pendidikan anak
6.	VI	38	L	Ojek	10/05	2011	Pendidikan anak
7.	VII	35	P	Ibu RT	17/19	2012	Pendidikan anak
8.	VIII	38	P	Ibu RT	20/10	2011	Pendidikan anak dan kesehatan ibu dan anak
9.	IX	33	P	Ibu RT	10/05	2010	Pendidikan anak dan kesehatan ibu dan anak
10.	X	26	P	Ibu RT	18/19	2010	Kesehatan anak

Sumber: data primer diolah 2013

Berdasarkan Tabel: 4 maka dapat dikatakan bahwa sebanyak 7 orang informan atau sebesar 70 % menggunakan program GSC untuk kepentingan pendidikan anak, sebanyak 2 informan atau sebesar 20 % menggunakan program GSC untuk kepentingan pendidikan anak dan kesehatan ibu hamil dan sebanyak 1 informan atau sebesar 10 % menggunakan program GSC untuk kepentingan kesehatan anak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di kelurahan Ekasapta program GSC lebih didominasi oleh pemanfaat dengan peruntukan pendidikan anak.

Deskripsi Jawaban Informan Kelurahan Ekasapta

Diskripsi jawaban informan dapat menggambarkan variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi Implementasi Kebijakan PNPB-Generasi Sehat Cerdas (GSC) terhadap pengentasan kemiskinan. Adapun secara lengkap diskripsi jawaban responden di kelurahan Ekasapta dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Variabel Komunikasi

Pada item Variabel komunikasi dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada item 1, sebanyak 8 responden menjawab bahwa implementor yang diikuti dalam program Generasi Sehat Cerdas dibekali dengan dokumen-dokumen seperti data ibu hamil, balita, anak putus sekolah, dan jumlah anak yang mengenyam pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama. Sebanyak 2 informan mengatakan tidak tahu apakah implementor dalam program GSC dibekali dengan dokumen-dokumen.

Pada item 2, sebanyak 9 informan mempunyai pendapat bahwa implementor program GSC dapat mengkomunikasikan dengan baik program ini kepada sasaran sebagai pemanfaat program GSC. Sebanyak 1 informan menyatakan tidak tahu.

Pada item 3, sebanyak 8 informan memberikan jawaban bahwa implementor program GSC mempunyai latar belakang pendidikan yang relevan. Walaupun tidak dapat dihindari bahwa rata-rata implementor berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas. Tetapi bagi pemanfaat, implementor tersebut tidak kalah juga dengan orang yang berpendidikan tinggi karena mereka sering dibekali dengan pelatihan-

pelatihan baik dari kecamatan maupun dari kabupaten. Sebanyak 2 informan mengatakan bahwa implementor yang ada perlu meningkatkan kinerjanya baik pengetahuan maupun keterampilannya sehingga mudah membaca kebutuhan di kelurahan andai program GSC ini akan dilanjutkan di waktu mendatang.

Berdasarkan deskripsi pada variabel komunikasi maka dapat disimpulkan sebagai berikut; item 1, ditemukan sebesar 80 % informan menjawab bahwa implementor yang diikutkan dalam program GSC dibekali dengan dokumen-dokumen sebelum ke sasaran program. Sedangkan sebanyak 20 % informan menjawab tidak tahu.

Pada item 2, sebanyak 90 % informan berpendapat bahwa implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik program GSC ke sasaran atau pemanfaat program dan sebanyak 10 % menjawab tidak tahu.

Pada item 3, sebanyak 80 % informan menjawab implementor yang dipakai dalam program GSC mempunyai latar belakang pengetahuan yang cukup tentang pelaksanaan program GSC dan sebanyak 20 % informan menjawab implementor yang ada perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan yang memadai guna menjawab program-program selanjutnya.

1.2 Variabel Sumber Daya

Pada Variabel Sumberdaya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada item 1, ditemukan bahwa sebanyak 10 informan menjawab bahwa staf yang dipakai sebagai implementor memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Dengan demikian dapat dikatakan sebanyak 100 % informan

menjawab staf implementor yang dipakai dalam program GSC memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan.

Pada item 2, ditemukan bahwa sebanyak 9 informan menjawab para personil yang dipakai sebagai implementor dalam program GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program dan sebanyak 1 informan menjawab tidak tahu. Dengan demikian dapat dikatakan dan disimpulkan bahwa sebesar 90 % informan menjawab para personil yang turun dalam program GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program dan sebanyak 10 % menjawab tidak tahu.

Pada item 3, sebanyak 8 informan menjawab bahwa kewenangan staf mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan program atau sebagai implementor dalam program GSC dan sebanyak 2 informan menjawab tidak ada transparansi atau kejelasan dalam kewenangan para implementor atau pelaku program. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebesar 80 % informan menjawab kewenangan pelaku atau implementor dalam menialankan tugas dan tanggung jawab dan sebesar 20 % informan menjawab tidak adanya transparansi dalam kaitan dengan kewenangan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai implementor atau pelaku program.

Pada item 4, sebanyak 6 informan menjawab bahwa adanya fasilitas lain dan memadai yang disiapkan dalam program ini seperti gedung posyandu, meja dan kursi, toilet posyandu dan adanya makanan tambahan yang diberikan kepada balita setiap bulan di posyandu, imunisasi serta

vitamin tambah darah bagi ibu hamil. Sedangkan sebanyak 4 informan menjawab bahwa fasilitas lain berupa uang transportasi untuk anak ditingkat pendidikan SD dan SMP. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebesar 100 % informan menjawab adanya fasilitas lain yang disiapkan dalam program GSC.

1.3 Variabel Disposisi

Pada Variabel Disposisi dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada item 1, sebanyak 5 informan menjawab sikap dan komitmen aparat pemerintah setempat biasa-biasa saja dalam pelaksanaan program GSC. Hal ini dikarenakan program GSC telah mengikuti prosedur yang telah diturunkan dari pusat. Campur tangan langsung dari aparat pemerintah setempat (lurah dan perangkat lurah) terlihat hampir tidak ada. Sedangkan sebanyak 5 informan menjawab sikap dan komitmen pemerintah setempat sangat antusias dalam menjawab program yang ada di kelurahan khususnya GSC. Bentuk komitmen mereka terlihat dalam rapat-rapat yang mengundang rakyat pemanfaat program GSC untuk dapat menggali ide atau masalah terkait pelaksanaan program selanjutnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebesar 50 % informan menjawab tidak adanya campur tangan aparat pemerintah setempat karena program GSC telah mengikuti prosedur yang ada dan sebanyak 50 % informan menjawab bahwa sikap dan komitmen aparat pemerintah sangat proaktif dalam membangun komitmen bersama dengan cara mengundang pemanfaat program GSC untuk hadir dalam rapat-rapat untuk menggali rumusan masalah program selanjutnya.

Pada item 2, ditemukan bahwa sebanyak 5 informan menjawab mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah walaupun sesuai dengan prosedur yang berlaku tapi lebih baik bisa turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil program dan tidak hanya menunggu adanya evaluasi program. Sebanyak 5 informan memberikan jawaban bahwa adanya sikap dan himbauan yang selalu diberikan oleh aparat pemerintah setempat dalam keseriusan dan berperan aktif dalam program GSC. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebesar 50 % informan menjawab adanya walaupun ada prosedur dalam program tapi minimal bisa turun ke lapangan untuk melihat kondisi riil program. Sedangkan sebesar 50 % informan menjawab adanya sikap proaktif dari aparat pemerintah setempat yang tercermin dalam keseriusan dan peran aktif dalam menghimbau pemanfaat program GSC agar serius dalam menjawab program GSC.

1.4 Variabel Struktur Birokrasi

Variabel Struktur Birokrasi dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada item 1, sebanyak 10 informan menjawab bahwa rumusan masalah dalam program cukup lugas dan representatif. Hal ini terlihat dari sering dilibatkannya masyarakat dalam kelurahan dalam upaya menggali gagasan masalah dalam menjawab kebutuhan di kelurahan. Rumusan masalah biasanya mewakili kebutuhan masyarakat secara keseluruhan di kelurahan Ekasapta. Contohnya masalah pendidikan dan kesehatan di kelurahan Ekasapta.

Pada item 2, ditemukan bahwa sebanyak 10 informan menjawab bahwa dengan adanya program GSC untuk waktu yang akan datang masyarakat jelas terbantu terutama dalam pendidikan mengingat biaya pendidikan dari waktu ke waktu semakin mahal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebesar 100 % informan menjawab adanya harapan semoga program ini untuk jangka waktu mendatang selalu baik terhadap sasaran maupun terhadap output yang akan dicapai di kelurahan Ekasapta dan pada para pemanfaat khususnya.

Pada item 3, ditemukan bahwa sebesar 8 informan atau sebesar 80 % memberikan rekomendasi bahwa program ini betul-betul membantu terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan sehingga tingkat kesejahteraan pemanfaat dapat ditingkatkan. Sedangkan sebanyak 2 informan atau sebesar 20 % menjawab bahwa untuk waktu yang akan datang pelaku harus terbuka, jangan pilih-pilih dan fokus pemanfaat hanya untuk keluarga, harus tepat sasaran dan bantuan sebaiknya dalam bentuk barang.

Pada item 4, ditemukan bahwa semua informan atau 10 informan atau sebesar 100 % yang dilibatkan dalam wawancara penelitian ini menjawab bahwa selalu ada evaluasi setiap bulan di kantor kelurahan yang melibatkan aparat pemerintah kelurahan, para pelaku program GSC dan pemanfaat GSC. Selain itu ada fasilitator kecamatan yang selalu hadir dalam evaluasi program.

Rincian deskripsi prosentase jawaban informan terhadap variabel komunikasi, variabel sumber daya, variabel disposisi dan variabel struktur birokrasi dapat digambarkan pada Tabel: 4.5 dibawah ini:

Tabel: 4. 5

Deskripsi prosentase jawaban informan terhadap variabel komunikasi, variabel sumber daya, variabel disposisi dan variabel struktur birokrasi

No	Variabel	Item	Jumlah Jawaban Informan				Total	Prosentase (%)
			Y*	T*	TJ*	LL*		
1	Komunikasi	a. Dokumen yang relevan dengan kebijakan	8	2			10	100
		b. Pelaku kebijakan	9		1		10	100
		c. Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan	8			2	10	100
2	Sumberdaya	a. Staf yang cukup (jumlah dan mutu)	10	-	-	-	10	100
		b. Informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program.	9		1		10	100
		c. Kewenangan (Authority) yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggungjawab.	8			2	10	100
		d. fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program	6			4	10	100

3	Disposisi	a. sikap dan komitmen dari aparat pemerintah dalam pelaksanaan program	5			5	10	100
		b. sikap atau mental yang baik sesuidengan prosedur atau aturan yang berlaku	5			5	10	100
4	Struktur Birokrasi	a. Perumusan masalah kebijakan	10				10	100
		b. Peramalan	10				10	100
		c. Rekomendasi	8			2	10	100
		d. Pemantauan dan evaluasi	10				10	100

Sumber: data primer diolah 2013

Keterangan*:

Y = jawaban informan lebih dominan mendukung program PNPM-GSC

T = informan menyatakan tidak mendukung program PNPM-GSC

TJ = informan tidak menjawab item kuesioner saat wawancara

LL = informan menjawab dengan pernyataan lain yang mendukung program PNPM-GSC

1.5 Variabel Pengetasan Kemiskinan

Pada Variabel Pengetasan Kemiskinan dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada item 1, sebanyak 7 informan atau sebesar 70 % menjawab bahwa ketersediaan mutu pangan cukup baik dalam keluarga. Sebanyak 3 informan atau sebesar 30 % menjawab bahwa mutu pangan kadang-kadang tidak cukup apalagi mengandung kadar gizi yang seimbang. Keanekaragaman persediaan mutu pangan dalam keluarga disebabkan karena tingkat pendapatan penduduk yang relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah keluarga.

Pada item 2, sebanyak 9 informan atau sebesar 90 % responden menjawab dengan adanya program GSC maka semakin dipermudah terutama bagi ibu hamil dan anak balita yang perlu imunisasi. Fasilitas di posyandu seperti antar jemput ibu melahirkan serta imunisasi setidaknya membantu pemanfaat yang rata-rata belum mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Sebanyak 1 informan atau sebesar 10 % menjawab tidak tahu karena akses kesehatan tidak pernah diperolehnya karena tidak pernah sakit dan tidak pernah dirujuk ke rumah sakit.

Pada item 3, sebanyak 10 informan atau sebesar 100 % menjawab bahwa akses layanan rumah dan sanitasi tidak bermasalah. Semuanya sudah memiliki MCK (Mandi Cuci Kakus) yang layak pakai.

Pada item 4, sebanyak 7 informan atau sebesar 70 % menjawab bahwa kualitas air pada umumnya sudah baik karena menggunakan fasilitas air PDAM dan sebanyak 3 informan atau sebesar 30 % menjawab masih menggunakan sumur sebagai sumber air bersih.

Pada item 5, sebanyak 10 informan atau sebesar 100 % menjawab bahwa ketidakberdayaan mereka dalam dunia pendidikan yang semakin mahal membuat mereka semakin tidak berdaya dalam memikirkan masa depan anak-anak mereka. Dengan demikian diharapkan untuk waktu yang akan datang bantuan GSC sebagai akses pengetasan kemiskinan ini dapat berjalan terus sehingga dapat membantu keberlangsungan pendidikan anak.

Untuk memperjelas deskripsi prosentase jawaban informan terhadap variabel pengentasan kemiskinan maka dideskripsikan pada Tabel: 6 dibawah ini:

Tabel: 4.6
Deskripsi prosentase jawaban informan terhadap
variabel pengentasan kemiskinan

No	Variabel	Item	Jumlah Jawaban Informan				Total	Prosentase (%)
			Y*	T*	TJ*	LL*		
1	Pengentasan Kemiskinan	a. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan	7			3	10	100
		b. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan	9		1		10	100
		c. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi	10				10	100
		d. Terbatasnya akses terhadap air bersih	7			3	10	100
		e. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan	10				10	100

Sumber: data primer diolah 2013

Keterangan*:

Y = jawaban informan lebih dominan mendukung program PNPM-GSC

T = informan menyatakan tidak mendukung program PNPM-GSC

TJ = informan tidak menjawab item kuesioner saat wawancara

LL = informan menjawab dengan pernyataan lain yang mendukung program PNPM-GSC

2. Desa Mokantarak

Tabel : 4.7
Distribusi Informan di Desa Mokantarak

Nama Lingkungan	RW	RT	Kepala Keluarga		Jumlah KK
			L	P	
Laga Ribu	I	1	35	0	35
		2	20	3	23
	II	3	16	3	19
		4	14	1	15
		5	21	2	23
Tapo Ago	IV	6	14	3	17
		7	22	2	24
	V	8	22	3	25
Raga Nama	VI	9	25	4	29
		10	20	2	22
		11	18	1	19
Pati Roa	VII	12	31	3	34
Jumlah Penduduk Pria : 649 Wanita : 619 Total : 1.268			258	27	285

Sumber: data primer diolah 2013

Dari jumlah penduduk di atas maka yang dijadikan informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang atau 10 Kepala keluarga. Kesepuluh informan tersebut tersebar di setiap lingkungan. Secara detail profile kesepuluh informan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel: 4.8
Gambaran umum usia, jenis kelamin, pekerjaan dari informan

No	Informan	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	RT/RW	Lama Mengikuti Program GSC	Keterangan
1.	I	41	L	Petani	01/01	2008	Penerima manfaat
2.	II	39	P	Ibu RT	01/01	2007	Penerima manfaat
3.	III	48	L	Petani	02/01	2009	Penerima manfaat
4.	IV	45	P	PNS	04/03	2007	Pelaku
5.	V	34	L	Sopir	05/03	2008	Penerima manfaat
6.	VI	39	L	Bangunan	03/02	2007	Penerima manfaat
7.	VII	46	L	Petani	07/05	2007	Penerima Pemanfaat
8.	VIII	42	L	Petani	08/05	2007	Penerima manfaat
9.	IX	33	P	Ibu RT	09/06	2007	Pelaku dan penerima manfaat
10.	X	48	P	Ibu RT	11/06	2007	penerima manfaat

Sumber: data primer diolah 2013

Berdasarkan Tabel: 6 di atas maka dapat dideskripsikan sebagai berikut; sebanyak 8 informan atau sebesar 80 % adalah penerima manfaat dan sebanyak 1 informan atau sebesar 10 % informan sebagai pelaku program GSC serta 1 informan atau sebesar 10 % sebagai pelaku dan penerima manfaat. Selain itu berdasarkan tabel: 6 juga dapat digambarkan bahwa sebanyak 6 informan atau sebesar 60 % mempunyai pekerjaan sebagai petani, sebanyak 3 informan atau sebesar 30 % mempunyai pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, dan masing-masing 1 orang atau sebesar 10 % berprofesi sebagai PNS, sopir dan bangunan (pengrajin). Informasi lain yang dapat dikatakan berdasarkan tabel: 6 adalah sebanyak 60 % menerima atau ikut

dalam program GSC sejak tahun 2007, sebanyak 2 informan atau sebesar 20 % mengikuti program GSC sejak tahun 2008 dan sebanyak 1 informan atau sebesar 10 % mengikuti program pada tahun 2009. Dengan demikian berdasarkan tahun keikutsertaan program GSC maka dapat disimpulkan bahwa penerima manfaat program GSC lebih banyak dari tahun 2007.

Tabel: 4.9
Gambaran Latar Belakang Pendidikan Informan

No	Informan	PENDIDIKAN				
		SD	SMP	SMA	D3	S1
1.	I	-	-	✓	-	-
2.	II	-	-	✓	-	-
3.	III	✓	-	-	-	-
4.	IV	-	-	-	✓	-
5.	V	-	-	✓	-	-
6.	VI	-	-	✓	-	-
7.	VII	✓	-	-	-	-
8.	VIII	-	-	✓	-	-
9.	IX	-	✓	-	-	-
10.	X	-	✓	-	-	-

Sumber: data primer diolah 2013

Berdasarkan Tabel: 7 maka dapat dikatakan bahwa sebanyak 2 orang informan atau sebesar 20 % adalah berpendidikan SD, sebanyak 2 orang informan atau sebesar 20 % berpendidikan SMP, sebanyak 5 informan atau sebesar 50 % berpendidikan SMA serta sebanyak 1 informan atau sebesar 10 % berpendidikan setara D3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dominasi informan di desa Mokantarak mempunyai latar belakang pendidikan SMA.

Tabel: 4.10
Peruntukan Program GSC

No	Informan	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	RT/RW	Lama Mengikuti Program GSC	Peruntukan Program GSC
1.	I	41	L	Petani	01/01	2008	Pendidikan anak
2.	II	39	P	Ibu RT	01/01	2007	Pendidikan anak dan kesehatan ibu dan anak
3.	III	48	L	Petani	02/01	2009	Pendidikan anak
4.	IV	45	P	PNS	04/03	2007	Koordinator PNPM GSC
5.	V	34	L	Sopir	05/03	2008	Pendidikan anak dan kesehatan ibu dan anak
6.	VI	39	L	Bangunan	03/02	2007	Pendidikan dan kesehatan ibu dan anak
7.	VII	46	L	Petani	07/05	2007	Pendidikan anak
8.	VIII	42	L	Petani	08/05	2007	Pendidikan anak
9.	IX	33	P	Ibu RT	09/06	2007	Kesehatan ibu dan anak
10.	X	48	P	Ibu RT	11/06	2007	Pendidikan dan kesehatan ibu dan anak

Sumber: data primer diolah 2013

Berdasarkan Tabel: 8 maka dapat dikatakan bahwa sebanyak 4 informan atau sebesar 40 % menggunakan program GSC untuk kepentingan pendidikan anak, sebanyak 4 informan atau sebesar 40 % menggunakan program GSC untuk kepentingan pendidikan anak dan kesehatan ibu dan anak, dan sebanyak 1 informan atau sebesar 10 % menggunakan program GSC untuk kepentingan kesehatan ibu dan anak serta 1 informan atau sebesar 10 % sebagai pelaku program GSC.

Deskripsi Jawaban Informan Desa Mokantarak

Dalam menjawab hasil Studi Implementasi Kebijakan PNPM-Generasi Sehat Cerdas (GSC) terhadap pengentasan kemiskinan maka dapat dideskripsikan hasil wawancara dengan informan berdasarkan variabel penelitian sebagai berikut:

2.1 Variabel komunikasi

Pada item Variabel komunikasi dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada item 1, sebanyak 9 informan atau sebesar 90 % menjawab bahwa implementor yang diikutkan dalam program Generasi Sehat Cerdas dibekali dengan dokumen-dokumen seperti data ibu hamil, balita, anak putus sekolah, dan jumlah anak yang mengenyam pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama. Sebanyak 1 informan atau sebesar 10 % mengatakan tidak tahu karena program tersebut adalah program pemerintah dan diperuntukan untuk rakyat miskin.

Pada item 2, sebanyak 7 informan mempunyai pendapat bahwa implementor program GSC dapat mengkomunikasikan dengan baik program ini kepada sasaran sebagai pemanfaat program GSC dan sebanyak 2 informan atau sebesar 20 % mengatakan bahwa implementor yang dipakai sebaiknya diganti dan jangan dijadikan sebagai tempat kerja tetap dalam program GSC serta sebanyak 1 informan menyatakan tidak tahu karena lebih bersifat menerima apa adanya program yang dilakukan dan berada di desa Mokantarak.

Pada item 3, sebanyak 10 informan atau sebesar 100 % memberikan jawaban bahwa implementor program GSC mempunyai latar belakang

pendidikan yang relevan dan cocok untuk bekerja sebagai implementor dalam program GSC. Tetapi untuk jangka panjang demi menjaga supaya tidak timbulnya sasaran program GSC terkesan monoton maka perlu dipikirkan regenerasi pelaku program GSC sehingga dapat dimunculkan sikap-sikap revolusioner dan inovatif dalam menjawab kepentingan dan kebutuhan kelompok sasaran di desa mokantarak.

2.2 Variabel Sumber Daya

Pada Variabel Sumberdaya dapat diuraikan sebagai berikut

Pada item 1, ditemukan bahwa sebanyak 10 informan menjawab bahwa staf yang dipakai sebagai implementor memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Dengan demikian dapat dikatakan sebanyak 100 % informan menjawab staf implementor yang dipakai dalam program GSC memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Selanjutnya staf yang dipakai sebagai implementor sering datang ke penerima manfaat sebagai pengontrol kegiatan program GSC.

Pada item 2, ditemukan bahwa sebanyak 9 informan menjawab para personil yang dipakai sebagai implementor dalam program GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi dan penjelasan pada sasaran program dan sebanyak 1 informan atau sebesar 10 % menjawab tidak tahu karena tiba-tiba saja namanya ditulis sebagai penerima manfaat dalam program GSC.

Pada item 3, sebanyak 9 informan atau sebesar 90 % menjawab bahwa staf mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menjalankan program atau sebagai implementor dalam program GSC dan sebanyak 1 informan

atau sebesar 10 % menjawab tidak tahu karena telah yakin apa yang dijelaskan oleh staf atau implementor program GSC adalah benar adanya dan bisa dipertanggungjawabkan dalam evaluasi yang selalu dilakukan setiap 3 bulan atau 6 bulan.

Pada 4, sebanyak 10 informan atau sebesar 100 % menjawab bahwa adanya dalam program GSC disiapkan juga fasilitas lain seperti pembangunan gedung posyandu, pemberian makanan tambahan pada balita di posyandu, penyediaan KMS (kartu menuju sehat). Dalam bidang pendidikan fasilitas lain yang disiapkan berupa seragam, sepatu, payung dan mantel hujan. Sedangkan untuk anak berprestasi disiapkan juga uang tambahan sebagai motivasi murid yang berprestasi di tingkat Sekolah Dasar. Pada tingkat SMP disiapkan uang transportasi yang nominalnya dari Rp 50.000 sampai Rp 60.000 yang diberikan tiap 3 bulan.

2.3 Variabel Disposisi

Pada Variabel Disposisi dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada item 1, sebanyak 10 informan atau sebesar 100 % informan menjawab sikap dan komitmen aparat pemerintah setempat mendukung dan proaktif dalam pelaksanaan program GSC. Dukungan dan komitmen aparat pemerintah tersebut dapat ditunjuk dengan adanya kerja sama antara implementor dengan staf desa, adanya aparat yang dilibatkan dalam program khususnya kepala dusun, serta sikap antusias dari aparat pemerintah setempat dalam menjawab program GSC.

Pada item 2, ditemukan bahwa sebanyak 10 informan atau sebesar 100 % menjawab adanya mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan

pemerintah desa dalam pelaksanaan program GSC. Beberapa sikap yang ditemukan dalam wawancara dengan informan antara lain; adanya kerja sama aparat dengan staf atau implementor program GSC, adanya delegasi wewenang secara penuh pemerintah desa kepada implementor GSC, menegur anak yang ikut dalam program GSC apabila tidak ke sekolah, langsung ke rumah-rumah penerima program GSC untuk menjelaskan peruntukan program GSC serta tetap mengontrol setiap item program GSC yang ada di desa.

2.4 Variabel Struktur Birokrasi

Pada Variabel Struktur Birokrasi dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada item 1, sebanyak 10 informan atau sebesar 100 % menjawab bahwa rumusan masalah dalam program cukup lugas dan representatif. Kondisi ini terlihat dari mulai dibangunnya rumusan dan gagasan masalah dari tingkat RT dan RW sampai pada musyawarah desa untuk menentukan sasaran program. Keterwakilan dari rumusan masalah tersebut kemudian dimusyawahkan di tingkat desa untuk menentukan jenis program yang cocok di desa Mokantarak.

Pada item 2, ditemukan bahwa sebanyak 8 informan atau sebesar 80 % menjawab bahwa dengan adanya program GSC untuk waktu yang akan datang masyarakat jelas terbantu khususnya dalam menjawab kebutuhan pendidikan anak terutama anak putus sekolah. Sebanyak 1 informan atau sebesar 10 % menjawab bahwa ramalan terhadap program GSC untuk waktu mendatang sebaiknya peruntukan tidak hanya pendidikan dan kesehatan ibu dan anak tetapi juga program lain yang mendukung

tercapainya tingkat kesejahteraan rakyat, serta sebanyak 1 informan atau sebesar 10 % menjawab untuk program makanan tambahan balita di posyandu sebaiknya didatangkan bibit-bibit seperti kacang ijo untuk diusahakan sendiri setiap kelompok sasaran demi menghemat anggaran dan pemanfaatannya tepat sasaran dan bisa secara terus menerus.

Pada item 3, ditemukan bahwa sebesar 9 informan atau sebesar 90 % memberikan rekomendasi bahwa program ini betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat di desa Mokantarak khususnya penerima manfaat. Indikasi yang dapat dijelaskan bahwa dominasi informan dalam penelitian ini adalah berlatar belakang petani. Sehingga bisa dikatakan sangat membantu terutama dalam memenuhi kebutuhan baik untuk pendidikan anak maupun untuk kesehatan ibu dan anak (ibu hamil dan anak balita). Sedangkan sebanyak 1 informan atau sebesar 10 % menjawab bahwa untuk waktu yang akan datang perlu adanya transparansi dari pelaku program demi menjaga akuntabilitas pelaksanaan program.

Pada item 4, ditemukan bahwa semua informan atau 10 informan atau sebesar 100 % yang dilibatkan dalam wawancara penelitian ini menjawab bahwa selalu ada evaluasi setiap bulan di kantor kelurahan yang melibatkan aparat pemerintah kelurahan, para pelaku program GSC dan pemanfaat GSC bersama fasilitator kecamatan (FK) yang selalu hadir dalam evaluasi program. Biasanya evaluasi terjadi dalam kurun waktu 3 bulan dan tempat evaluasi selalu terjadi di kantor desa. Rincian deskripsi prosentase jawaban informan terhadap variabel komunikasi, variabel sumber daya, variabel

disposisi dan variabel struktur birokrasi dapat digambarkan pada Tabel: 11
dibawah ini:

Tabel: 4.11
Deskripsi prosentase jawaban informan terhadap variabel komunikasi, variabel sumber daya, variabel disposisi dan variabel struktur birokrasi

No	Variabel	Item	Jumlah Jawaban Informan				Total	Prosentase (%)
			Y*	T*	TJ*	LL*		
1	Komunikasi	a. Dokumen yang relevan dengan kebijakan	9		1		10	100
		b. Pelaku kebijakan	7		1	2	10	100
		c. Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan	10				10	100
2	Sumberdaya	a. Staf yang cukup (jumlah dan mutu)	10	-	-	-	10	100
		b. Informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program.	9		1		10	100
		c. Kewenangan (Authority) yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggungjawab.	9		1		10	100
		d. fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program	10				10	100
3	Disposisi	a. sikap dan komitmen dari aparat pemerintah dalam pelaksanaan program	10				10	100

		b. sikap atau mental yang baik sesuidengan prosedur atau aturan yang berlaku	10				10	100
4	Struktur Birokrasi	a. Perumusan masalah kebijakan	10				10	100
		b. Peramalan	8			2	10	100
		c. Rekomendasi	9			1	10	100
		d. Pemantauan dan evaluasi	10				10	100

Sumber: data primer diolah 2013

Keterangan*:

Y = jawaban informan lebih dominan mendukung program PNPM-GSC

T = informan menyatakan tidak mendukung program PNPM-GSC

TJ = informan tidak menjawab item kuesioner saat wawancara

LL = informan menjawab dengan pernyataan lain yang mendukung program PNPM-GSC

2.5 Variabel Pengetasan Kemiskinan

Pada Variabel Pengetasan Kemiskinan dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada item 1 sebanyak 6 informan atau sebesar 60 % menjawab bahwa ketersediaan mutu pangan cukup baik dalam keluarga. Ketersediaan mutu pangan tersebut ditunjuk dengan pola makan 3 kali sehari dengan kemampuan membeli beras rata-rata 2 kg sampai 3 kg beras per hari. Sebanyak 4 informan atau sebesar 40 % menjawab bahwa mutu pangan kadang-kadang tidak cukup apalagi mengandung kadar gizi yang seimbang. Kadang-kadang menu makanan bisa diganti dengan menu makanan tradisional seperti pisang atau ubi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam upaya memenuhi mutu pangan baru tercapai 60 % di desa Mokantarak.

Pada item 2, sebanyak 9 informan atau sebesar 90 % responden menjawab dengan adanya program GSC maka adanya kemudahan dalam mendekatkan pelayanan kesehatan khususnya ibu hamil dan anak balita. Bentuk-bentuk pelayanan yang sering diberikan di posyandu GSC berupa pemberian vitamin tambah darah bagi ibu hamil secara gratis, penyediaan kartu menuju sehat (KMS), dacing atau alat penimbang berat badan untuk ibu hamil dan anak balita serta makanan tambahan untuk balita. Selain itu ada biaya antar jemput untuk ibu hamil yang melahirkan anak di rumah sakit. Sebanyak 1 informan atau sebesar 10 % memberikan jawaban tidak tahu karena saat bergulirnya program informan beserta keluarganya tidak menjadi penerima manfaat dari program GSC.

Pada item 3, sebanyak 8 informan atau sebesar 80 % menjawab bahwa akses layanan rumah dan sanitasi tidak bermasalah. Semuanya sudah memiliki MCK (Mandi Cuci Kakus) yang layak pakai. Sedangkan sebanyak 2 informan atau sebesar 20 % menjawab akses layanan rumah dan sanitasi belum layak. MCK masih dalam bentuk darurat serta kelayakan rumah masih sangat sederhana.

Pada item 4, sebanyak 10 informan atau sebesar 100 % menjawab bahwa kualitas air pada umumnya sudah baik karena menggunakan fasilitas air desa sebagai salah satu hasil program PNPM Pedesaan sebelumnya.

Pada item 5, sebanyak 10 informan atau sebesar 100 % menjawab bahwa mengakui bahwa pentingnya pendidikan di masa yang akan datang dan merupakan akses dalam memperbaiki kesejahteraan rumah tangga. Dengan demikian diharapkan program GSC terus dilanjutkan untuk tahun yang

akan datang. Untuk memperjelas deskripsi prosentase jawaban informan terhadap variabel pengentasan kemiskinan maka dideskripsikan pada Tabel: 4.12 dibawah ini:

Tabel: 4.12
Deskripsi prosentase jawaban informan terhadap variabel pengentasan kemiskinan

No	Variabel	Item	Jumlah Jawaban Informan				Total	Prosentase (%)
			Y*	T*	TJ*	LL*		
1	Pengentasan Kemiskinan	a. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan	6	4			10	100
		b. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan	9		1		10	100
		c. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi	8	2			10	100
		d. Terbatasnya akses terhadap air bersih	10			3	10	100
		e. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan	10				10	100

Sumber: data primer diolah 2013

Keterangan*:

Y = jawaban informan lebih dominan mendukung program PNPM-GSC

T = informan menyatakan tidak mendukung program PNPM-GSC

TJ = informan tidak menjawab item kuesioner saat wawancara

LL = informan menjawab dengan pernyataan lain yang mendukung program PNPM-GSC

3. Deskripsi Responden Pelaku PNPM-GSC Kecamatan Larantuka

Dalam penelitian ini peneliti melibatkan pemangku kepentingan wilayah kecamatan Larantuka yang melibatkan Ketua PNPM-GSC kecamatan Larantuka, Lurah Kelurahan Larantuka dan Kepala Desa Mokantarak. Untuk lebih detail maka dibawah ini dideskripsikan beberapa hasil pengumpulan data dari hasil wawancara sebagai berikut:

3.1 Camat atau Ketua PNPM GSC Kecamatan Larantuka

Peneliti melakukan pengumpulan data yang lebih akurat dengan menggali informasi dari pelaku program PNPM-GSC dengan narasumber Camat yang didelegasikan kepada Ketua PNPM-GSC Kecamatan Larantuka. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa masih ada ibu hamil yang meninggal dan anak yang meninggal. Indikator lain yang menjadi penyebab kemiskinan adalah pola hidup dan budaya di kelurahan Ekasapta. Para implementor yang diturunkan di Kelurahan Ekasapta KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang dibekali ilmu sebelum berproses dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Bahan-bahan mereka juga ada dalam Juknis PTO (Petunjuk Teknis Operasional). Sumberdaya yang menjadi implementor biasanya SMA. Pengalaman membuktikan ada ketercapaian. Di Kelurahan Ekasapta ditunjuk dengan beberapa tahapan dengan musyawarah yang didukung dengan data dan format-format yang dibagikan dapat terisi dan dapat dituangkan dalam bentuk laporan. Jumlah implementor yang diturunkan sebanyak 16 orang. KPMD 2 orang, PK 3 orang, TPMD 11 orang. Efektifnya 7 orang. Berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab PNPM-GSC bekerja sama dengan Bank Dunia.

Laporan Tanggung Jawab dibuat secara berjenjang dari Kecamatan ke Kabupaten ke Propinsi dan selanjutnya ke Pusat.

Terkait fasilitas maka tidak ada fasilitas yang mendukung program. Sikap pemerintah setempat terutama Dinas Kesehatan yang bermitra dengan PNPM GSC tidak sinergis. Sinergisitas yang dibangun masih kabur-kabur. Dalam perjalanan ada benturan pemahaman tentang dana PNPM GSC yang berada di desa atau kelurahan. Dalam kaitan dengan isu kebijakan maka BPMD (Badan Pemerintah Masyarakat Desa) yang seharusnya pemerintah setempat tidak cepat menangkap peluang seperti dana aspirasi di DPRD. Implementor selama ini hanya dibantu dengan dana yang selalu melekat dalam kegiatan program. Terkait evaluasi maka evaluasi dilakukan 1 bulan sekali di kabupaten yang dihadiri oleh semua FK. Dalam upaya pengentasan kemiskinan ketercukupan pangan cukup di kelurahan Ekasapta hanya pola pikir masyarakat yang perlu dirubah. Sanitasi cukup baik sedangkan yang menjadi kendala adalah pembagian yang belum merata. Terkait peningkatan pendidikan maka lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan kemauan dari anak dan belum adanya kemauan orang tua dalam memikirkan pendidikan anaknya. PNPM-GSC sangat membantu. Untuk masa yang akan datang jauh lebih baik. Hanya saja kondisi lapangan kelurahan berbeda dengan desa. PNPM-GSC lebih tepat diterapkan di desa karena tingkat partisipasi masyarakat di desa lebih proaktif ketimbang di daerah kelurahan.

3.2 Lurah Kelurahan Ekasapta

PNPM-GSC di kelurahan Ekasapta berangkat dari FK ke Kelurahan dan ke pelaku dan sampai saat ini komunikasi dapat berjalan dengan baik. Dan

adanya transparansi dalam melakukan komunikasi. Menghubungkan tingkat kemiskinan maka kemiskinan diukur sesuai kategori rumah tangga miskin sesuai kriteria yang ditentukan. Kemampuan implementor di Ekasapta sesuai dengan ilmu yang diperoleh dalam masa pendidikan. Implementor dipilih melalui musyawarah. Evaluasi biasa dilakukan setahun 2 kali yang mencakup bidang pendidikan dan kesehatan. Keterlibatan pemerintah desa tidak terlibat secara aktif karena telah diberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pelaku PNPM-GSC. Untuk masa yang akan datang PNPM-GSC diharapkan tetap ada walau akan muncul nama lain.

Terkait kemiskinan di Kelurahan Ekasapta maka dalam kaitan dengan kecukupan pangan maka dapat dikatakan masih cukup. Di sisi lain tentang sanitasi maka dapat dikatakan prosentase masih berbanding 50:50 karena masih kurangnya saluran-saluran pembuangan air. Berbicara tentang hubungan pendidikan dan pengentasan kemiskinan maka dapat dikatakan bahwa belum ada ketercukupan kebutuhan dalam membiayai pendidikan dan pengentasan kemiskinan. PNPM-GSC hadir sebagai penunjang walaupun harus diakui bahwa cukup membantu dalam pendidikan.

3.3 Kepala Desa Mokantarak

Dari segi komunikasi selalu diawali dengan pertemuan dari tingkat kecamatan dan turun ke desa. Implementor ditentukan dalam musyawarah desa di balai desa. Kemampuan dan mutu implementor terdiri dari guru, tokoh masyarakat dan selama ini pengalaman membuktikan bahwa

implemtor yang diturunkan cocok karena dimulai dari dusun dan selanjutnya dilaporkan ke ke camatan. Evaluasi dilakukan 3 bulan sekali yang dilakukan di balai desa. Kewenangan dan tanggung jawab implementor selalu ada selain keputusan yang bisa implementor sendiri oleh implementor. Prediksi untuk waktu yang akan datang diharapkan PNPM-GSC dirubah menjadi PNPM-MPd.

Terkait pengentasan kemiskinan rasanya sulit kehidupan masyarakat sebelum adanya program PNPM-GSC. Kecukupan pangan masih terbentur dengan aturan-aturan untuk pembuatan lahan pertanian yang mengakibatkan kesulitan dalam memperoleh pangan.

Terkait sanitasi masih ditemukan beberapa rumah yang masih menggabungkan toilet. Sedangkan rumah yang tidak layak huni sekitar 10 %. Penyediaan air bersih jauh dari cukup. Di bidang pendidikan khususnya tingkat SMP terasa tertolong dengan biaya transportasi walau anak-anak yang menerima program PNPM-GSC berada dan bersekolah di luar kecamatan Larantuka. Pengaruh PNPM-GSC terhadap pengentasan kemiskinan ada hubungan yang dapat dilihat kesibukan ibu-ibu mengurus anak dan rutinitas anak ke sekolah yang berimbas pada terputusnya fenomena anak putus sekolah.

D. Analisis Hasil Penelitian Studi Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – Generasi Sehat Cerdas Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Dari hasil wawancara terhadap 20 informan di kecamatan Larantuka masing-masing 10 informan di Kelurahan Ekasapta dan 10

informan di Desa Mokantarak serta hasil wawancara dengan pelaku program PNPM-GSC kecamatan, kelurahan dan desa maka ditemukan gap dari hasil penelitian ini. Komparasi hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan dari masing-masing informan sangat tinggi terhadap program PNPM-GSC. Memang di lain pihak perlu diakui bahwa penerima program PNPM-GSC rata-rata berada di kelas dengan tingkat ekonomi yang belum mapan. Tetapi bila dikaji berdasarkan teori George C. Edwards III peneliti menemukan beberapa gap antara lain sebagai berikut:

1. Komunikasi

Berkaitan dengan komunikasi ditemukan bahwa di kelurahan Ekasapta dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program GSC berangkat dari adanya kebutuhan di kelompok sasaran. Keberadaan kelompok sasaran berangkat dari penggalian gagasan di tingkat kelurahan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam proses komunikasi tersebut kelompok sasaran juga tahu siapa-siapa saja yang akan menjadi implementor yang siap dan sedia selalu masuk dari rumah ke rumah untuk menyampaikan hasil penggalian gagasan walau perlu diakui bahwa latar belakang pendidikan implementor di kelurahan rata-rata adalah SMA atau sederajat. Namun di sisi lain perlu diakui bahwa dengan latar belakang pendidikan rata-rata SMA atau sederajat dapat membangun sebuah kearifan lokal dimana program PNPM-GSC dapat disosialisasikan dengan baik kepada kelompok sasaran.

Apabila dibandingkan dengan desa Mokantarak dapat dikatakan bahwa komunikasi yang dibangun juga tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di kelurahan Ekasapta. Implementor yang dibekali dengan pendidikan atau latihan sebagai implementor program PNPM-GSC dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai visi dan misi dari program.

Dua kondisi yang sama ini bagi penulis mempunyai kesimpulan bahwa dalam variabel komunikasi telah tercipta prosedur yang baku dalam menjalankan program PNPM-GSC sesuai pedoman Juknis (Petunjuk Teknis). Juknis yang dijadikan pedoman adalah PNPM Generasi Versi B. Pada Juknis ini termuat 29 form yang dijadikan sebagai bahan untuk mencari data sasaran program. Data sasaran tersebut kemudian didata dan selanjutnya dimusyawarahkan di tingkat desa yang difasilitasi oleh Fasilitator desa. Hasil musyawarah tersebut dibuat dalam bentuk notulen yang selanjutnya notulen tersebut ditindaklanjuti di tingkat kecamatan. Tuntutan dan aturan program dibuat setiap bulan sebagai evaluasi pelaksanaan program. Kondisi internal seperti mutu dan pengetahuan dari para implementor dibangun dalam bentuk pelatihan di tingkat kecamatan dan kabupaten sebagai jawaban peningkatan kapasitas dalam menjalankan program PNPM-GSC. Hal lain yang bisa dikatakan bahwa kondisi lingkungan tempat tinggal penerima manfaat mempengaruhi munculnya program PNPM-GSC di kelurahan Ekasapta dan desa Mokantarak. Hal ini terbukti dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan dari masing-masing informan di kelurahan Ekasapta dan desa Mokantarak. Dari

deskripsi latar belakang pendidikan dan pekerjaan ditemukan bahwa informan yang terdapat di kelurahan Ekasapta dan desa Mokantarak didominasi berpendidikan SMA dan mempunyai latar belakang pekerjaan sebagai petani dan ibu rumah tangga. Dua kondisi lingkungan ini yang oleh Mazmanian dan Sabatier serta Merilee S. Grindle disebut sebagai kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi selain variabel isi kebijakan (*content of policy*).

Berdasarkan komunikasi yang dibangun dalam program PNPM-GSC dapat terlihat dengan jelas bahwa komunikasi yang komprehensif sangat mempengaruhi partisipasi pemanfaat program PNPM-GSC. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua program PNPM-GSC ditemukan bahwa tingkat partisipasi di desa Mokantarak lebih aktif daripada di kelurahan Ekasapta. Indikator lain yang mempengaruhi adalah faktor lingkungan dan budaya. Sedangkan upaya untuk mengentas kemiskinan cukup terlihat di kelurahan Ekasapta. Hal ini dipertegas dari hasil wawancara yang dilakukan dengan lurah bahwa komunikasi yang dibangun adalah komunikasi berdasarkan hasil musyawarah. Pemanfaat program adalah mereka yang tergolong dalam kategori miskin menurut penafsiran mereka yang salah satunya adalah blm tersedianya rumah layak huni dan sanitasi yang baik.

2. Sumberdaya

Variabel sumberdaya merupakan aspek yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. Ketersediaan sumberdaya akan

mempengaruhi tercapai atau tidak tercapainya isi kebijakan dalam implementasi kebijakan. Meter dan Horn berpendapat bahwa dalam implementasi kebijakan perlu ketersediaan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non manusia (*non-human resources*). Dalam hasil penelitian juga ditemukan bahwa 20 informan masing-masing 10 informan di kelurahan Ekasapta dan 10 informan di desa Mokantarak bila dilihat dari sumberdaya khususnya sumberdaya manusia maka dapat dikatakan ketersediaan sumberdaya memang betul-betul tersedia. Sumberdaya ini tidak hanya meliputi implementor sebagai pelaku program tetapi penerima manfaat sebagai indikator tercapainya sasaran program. Dari 20 informan yang diwawancarai ditemukan bahwa rata-rata informan memberikan tanggapan bahwa sumberdaya yang dimiliki implementor cukup baik dan juga bisa menunjukkan tanggung jawabnya dalam menjalankan program PNPM-GSC. Hal ini dapat ditunjuk dengan jumlah dan mutu yang dapat diandalkan, adanya informasi yang cukup baik dimiliki oleh implementor dalam menjalankan program PNPM-GSC serta adanya kewenangan dan tanggung jawab Hal ini senada dengan teori Weimer dan Vining yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari suatu implementor kebijakan. Sumberdaya non manusia juga ditunjuk dalam pelaksanaan program ini berupa pembangunan gedung posyandu sebagai akses kesehatan di kelurahan Ekasapta, peralatan dan perlengkapan posyandu dan beberapa fasilitas pendukung lain yang pada intinya mendukung akses kesehatan.

Namun tidak ditemukan fasilitas penunjang program PNPM-GSC bagi para pelaku. Hasil wawancara dengan ketua PNPM-GSC kecamatan Larantuka dan Lurah Ekasapta menunjukkan bahwa fasilitas bagi para implementor tidak ada dan yang ada adalah dana yang selalu melekat pada setiap program kegiatan di kelurahan. Minimnya ketersediaan fasilitas atau sumberdaya ini juga bila dikaji lebih jauh akan berimplikasi pada lambannya pelayanan terhadap pemanfaat. Dalam arti lain bahwa isi kebijakan pengentasan kemiskinan dapat terhalang karena minimnya fasilitas.

3. Disposisi

Disposisi merupakan gambaran lingkungan tempat implementasi sebuah kebijakan. Merilee S. Grindle mengungkapkan bahwa lingkungan tempat implementasi meliputi; seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Deskripsi terhadap disposisi ini juga ditunjuk di kelurahan Ekasapta dan desa Mokantarak. Di kelurahan Ekasapta disposisi jelas terlihat dengan adanya dukungan dari aparat pemerintah setempat dalam mendukung program PNPM-GSC. Hal yang sama juga dilakukan di desa Mokantarak. Peran aparat pemerintah desa atau kelurahan dalam menggali gagasan dan merumuskan masalah merupakan bentuk disposisi yang bagi penulis sangat baik untuk diimplementasikan di waktu mendatang. Sebuah perbedaan kecil terlihat di kelurahan Ekasapta bahwa aparat pemerintah kelurahan tidak turun sampai

ke kelompok sasaran. Kondisi ini berbeda dengan yang dialami oleh desa Mokantarak. Aparat desa khususnya kepala dusun turun sampai ke rumah-rumah kelompok sasaran dalam membantu sosialisasi program PNPM-GSC. namun di sisi lain kondisi ini tidak menjadi sensitifitas pelaku dan penerima manfaat dari program PNPM-GSC karena prosedur pelaksanaan program PNPM-GSC telah tercermin dalam struktur pelaksanaan program. Jadi penulis mempunyai pandangan jika disposisi ini sangat penting maka pemberlakuan disposisi berada pada jalur level struktural dan selanjutnya dalam kaitan dengan implementasi lebih kepada jalur level konsultan. Karena PNPM-GSC mempunyai alur program kerja yang sudah diakomodir secara nasional sampai kepada kelompok sasaran atau pemanfaat program PNPM-GSC.

4. Struktur Birokrasi

Dalam pandangan Edward III bahwa terlalu panjangnya struktur organisasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Komoditas kepentingan birokrasi juga menjadi pemicu terlaksana atau tidaknya program di desa atau kelurahan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian pelaku adalah sekaligus pemanfaat program PNPM-GSC. Kondisi ini tercermin di kelurahan Ekasapta. Petikan wawancara dengan ketua PNPM-GSC kecamatan Larantuka mengidealkan adanya pelaku sekaligus pemanfaat. Pelaku sebagai pemanfaat adalah pemanfaat tidak langsung sebagai akibat dari aktivitas mereka dalam melakukan pelayanan di posyandu. Tanpa mereka program PNPM-GSC tidak akan berjalan

dengan baik. Sedangkan di desa Mokantarak kondisi ini tidak tercermin tetapi adanya indikasi bahwa fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kelompok sasaran sebaiknya dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) sehingga pemanfaatan seperti pembelian fasilitas atau perlengkapan sekolah dapat diberikan kebebasan kepada pemanfaat untuk memilih fasilitas atau perlengkapan yang dibutuhkan sesuai kualitas atau mutu yang diharapkan. Tetapi penulis juga mempunyai pandangan bahwa jika diberikan dalam BLT apakah digunakan sesuai dengan implementasi kebijakan yang telah disosialisasikan atau jangan sampai salah digunakan oleh kelompok sasaran. Pada dasarnya semua program adalah baik jika didukung oleh komunikasi, sumberdaya dan disposisi dalam satu forum yang sama sehingga menghindari bias-bias yang kadang menjerumuskan pola berpikir ke arah negatif.

5. Pengetasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan isu yang ramai dibicarakan sepanjang waktu dalam setiap program. Kadar pengentasan kemiskinan juga diteriakan secara sendiri-sendiri dari setiap individu secara tidak baku. Berpedoman pada definisi kemiskinan maka BAPPENAS mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari

perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Definisi BAPPENAS ini tercermin dalam hasil penelitian bahwa dari 20 informan yang tersebar di kelurahan Ekasapta dan desa Mokantarak maka jelas kemiskinan yang terjadi adalah kemiskinan dalam pencapaian taraf pendidikan dan kesehatan. Dua jenis kemiskinan ini bagi penulis menjadi dominasi hasil wawancara yang dilakukan dalam 2 tempat yang berbeda di kecamatan Larantuka. Tetapi kalau dikaji lebih detail maka dapat dikatakan bahwa kemiskinan yang terjadi adalah kemiskinan relatif, karena informan rata-rata memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan minimum, namun secara relatif pendapatannya masih di bawah rata-rata penduduk sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara terutama rekomendasi yang diberikan untuk program PNPM-GSC untuk waktu yang akan datang. Dari hasil wawancara maka dapat dikatakan bahwa rata-rata informan ingin program PNPM-GSC ini tetap berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya mengingat program ini sangat membantu terutama dalam menjawab kebutuhan pendidikan anak dan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak. Di Ekasapta seluruh informan mengharapkan program GSC kalau bisa untuk pendidikan apakah lebih baik tidak hanya sampai SMP tetapi ditingkatkan ke jenjang SMA walaupun tujuan program ini sifatnya membantu dan bukan menciptakan ketergantungan terhadap program GSC di waktu-waktu mendatang.

Analisis hasil penelitian yang telah dideskripsikan di atas selanjutnya peneliti membuat sebuah komparasi yang menggambarkan kondisi di desa Mokantarak dan di Kelurahan Ekasapta yang ditunjuk pada tabel: 13 berikut ini:

Tabel: 4.13
Komparasi Hasil Penelitian PNPM GSC di Kecamatan Larantuka

Variabel	Desa/Kelurahan	
	Mokantarak	Ekasapta
Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Implementor dilengkapi dengan dokumen yang relevan • Implementor mengkomunikasikan dengan baik isi kebijakan yang tertuang dalam program. • Pengetahuan implementor rata-rata setingkat SMA dan dibekali dengan petunjuk teknis program PNPM-GSC 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementor dilengkapi dengan dokumen yang relevan • Implementor mengkomunikasikan dengan baik dan terlihat pada form-form yang diberikan dapat terisi semuanya. • Pengetahuan rata-rata setingkat SMA dan dibekali dengan petunjuk teknis program PNPM-GSC
Sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> • Implementor dibekali dengan petunjuk teknis (JUKNIS) program PNPM-GSC • Implementor diberikan kewenangan dan tanggung jawab • Fasilitas implementor tidak ada yang ada adalah dana yang melekat pada program 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementor dibekali dengan petunjuk teknis (JUKNIS) program PNPM-GSC • Implementor diberikan kewenangan dan tanggung jawab • Fasilitas implementor tidak ada yang ada adalah dana yang melekat pada program
Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pemerintah sebagai pelaku dan masyarakat sebagai pemanfaat tetap ada untuk masa yang akan datang. • Mental yang baik selalu ditunjukkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pemerintah sebagai pelaku program khususnya di kelurahan terkesan tidak ada. Adanya indikasi yang mengakibatkan kematian ibu dan

	dengan adanya keinginan menggantikan program PNPM-GSC dengan PNPM-MPd.	anak. <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat mental yang baik dalam menganalisis program selanjutnya.
Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • rumusan masalah cukup baik dan lugas. semuanya melalui musyawarah. • PNPM tetap ada di kecamatan larantuka • Adanya evaluasi berkala 3 bulan sekali 	<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan masalah cukup baik dan lugas semuanya melalui musyawarah. Menjadi kendala disaat rumusan masalah lebih besar dari program yang akan diperoleh. • PNPM tetap ada di kecamatan larantuka yang intinya dapat membantu masyarakat. • Adanya evaluasi berkala
Pengentasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya kecukupan pangan. • Sanitasi dan layanan perumahan masih 10 % berada dalam kondisi tidak layak. • Penyediaan air bersih jauh dari cukup. • Adanya antusiasme program PNPM-GSC tetap ada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecukupan pangan bisa teratasi. • Sanitasi dan layanan perumahan masih berbanding 50:50 • Penyediaan air bersih cukup • Adanya antusiasme eksistnya program PNPM GSC di kelurahan Ekasapta.

Sumber: data primer diolah, 2013

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian di atas maka dalam analisis implementasi kebijakan publik peneneliti menemukan adanya perbedaan implementasi kebijakan publik dalam pelaksanaan program PNPM-GSC dalam pengentasan kemiskinan di desa Mokantarak dan Kelurahan Ekasapta. Deskripsi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Desa Mokantarak

Implementasi dijalankan dengan baik karena adanya kerja sama baik kelompok sasaran sebagai pemanfaat dengan organisasi pemerintah sebagai pelaku dan pelaksana kebijakan. Cerminan sinergisitas ini muncul dalam variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan maka ada kerja sama yang dibangun baik dari tingkat pemanfaat, pelaku program (implementor) serta pemerintah sebagai pengambil keputusan dalam program PNPM-GSC. Hal ini dapat dilihat dari adanya evaluasi yang selalu dilakukan 3 bulan sekali baik di tingkat RT dan Dusun sebagai evaluasi perumusan masalah dan selanjutnya dimusyawarahkan di tingkat desa sebagai langkah pengambilan keputusan dan selanjutnya diajukan ke tingkat kecamatan. Sinergisitas ini memudahkan ketercapaian salah satu isi program yaitu pengentasan kemiskinan. Dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan maka peneliti mempunyai kesimpulan bahwa implementasi program PNPM-GSC di desa Mokantarak membawa signifikansi yang positif. Hal ini terlihat dari adanya sanitasi dan perumahan yang semakin membaik. Dalam penelitian peneliti menemukan masih sekitar 10 % informan yang masih memiliki sanitasi dan perumahan yang tidak layak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih 10 % implementasi kebijakan dalam program dalam pengentasan kemiskinan belum tercapai.

b. Kelurahan Ekasapta

Studi lapangan awal mengindikasikan adanya perbedaan implementasi kebijakan publik dalam program PNPM-GSC di Kelurahan Ekasapta bila

dibandingkan dengan desa Mokantarak. Hal ini ditemukan juga dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ketua PNPM-GSC dimana dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program di kelurahan Ekasapta belum signifikan bila dibandingkan dengan di desa Mokantarak. Kondisi ini dapat tercermin dalam variabel-variabel penelitian dimana pada variabel disposisi dan struktur birokrasi ditemukan indikasi belum dibangunnya sinergitas baik pemanfaat, pelaku dan pemerintah. Dengan demikian upaya pengentasan kemiskinan dapat dikatakan masih 50 % yang perlu dibangun untuk waktu mendatang dengan menghilangkan ketergantungan upaya pengentasan kemiskinan dalam program-program selanjutnya seperti PNPM-GSC.

E. Keterkaitan Implementasi Kebijakan Publik dalam Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi terhadap Pengentasan Kemiskinan

Gumilar (Sukidjo, 2009: 156) mempunyai pandangan bahwa berbagai bantuan keuangan langsung justru berdampak melanggengkan kemiskinan. Perlu disadari bahwa masalah kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, melainkan merupakan masalah yang kompleks, bersifat multidimensi sehingga penanggulangannya memerlukan pendekatan dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi, politik maupun sosial budaya. Indra Darmawan (Sukidjo, 2009: 157) dalam memahami kemiskinan dapat dilakukan dengan lima pendekatan, seperti berikut.

1. Pendekatan pendapatan (*income approach*): dimana seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya berada di bawah tingkat minimal yang layak.
2. Pendekatan kebutuhan dasar (*basics needs approach*), dimana seseorang dikatakan miskin jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, sandang, papan, sekolah dasar dan sebagainya.
3. Pendekatan aksesibilitas (*accessibility approach*), dimana seseorang miskin karena kurangnya akses terhadap asset produktif, infrastruktur sosial dan fisik, informasi, pasar dan teknologi.
4. Pendekatan kemampuan manusia (*human capability approach*), dimana seseorang dikatakan miskin apabila yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan yang dapat berfungsi pada tingkat minimal.
5. Pendekatan ketimpangan (*inequality approach*), dimana seseorang dikatakan miskin apabila pendapatan yang bersangkutan berada di bawah kelompok masyarakat dalam komunitasnya. Pendekatan ini merupakan pendekatan kemiskinan relatif.

Pengertian pengetasan kemiskinan di atas mengidealkan adanya sinergisitas pemerintah sebagai pembuat isi kebijakan, sumberdaya sebagai implementasi kebijakan, komunikasi sebagai media sosialisasi isi kebijakan dan disposisi pemerintah sebagai motivator pendorong implementasi kebijakan dalam pengetasan kemiskinan.

Sinergisitas yang terkandung dalam penelitian ini tersirat jelas dalam kondisi riil di tempat penelitian. Peneliti akhirnya mempunyai kesimpulan bahwa kemiskinan yang terjadi di kecamatan Larantuka khususnya di kelurahan Ekasapta dan desa Mokantarak adalah kemiskinan relatif, karena informan rata-rata memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan minimum, namun secara relatif pendapatannya masih di bawah

rata-rata penduduk sekitarnya. Pendapatan informan yang relatif tersebut sebagai indikator bahwa informan tidak mampu membiayai pendidikan anak, tidak tersedianya kecukupan pangan dengan gizi seimbang serta belum tersedianya rumah dan sanitasi secara sehat.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan juga bahwa informan sebagai bagian dari sumberdaya program implementasi kebijakan publik program PNPM-GSC telah mengikuti semua tata aturan sesuai petunjuk teknis (Juknis PNPM Generasi Versi B) yang tertuang dalam program PNPM-GSC. Dukungan komunikasi dari para implementor sebagai pelaku program PNPM-GSC membantu pemanfaat dapat menggunakan bantuan dari program PNPM-GSC tepat sasaran. Komitmen dan mental dari aparat yang mendukung pelaksanaan program PNPM-GSC menjadi gambaran terlaksananya program secara baik dan tepat sasaran. Di sisi lain struktur birokrasi yang tidak mengedepankan program semata melainkan meningkatkan evaluasi sebagai bagian terpenting dari pelaksanaan program merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan publik. Apabila sinergis antara pemerintah sebagai pembuat isi kebijakan, sumberdaya sebagai implementasi kebijakan, komunikasi sebagai media sosialisasi isi kebijakan dan disposisi pemerintah sebagai motivator pendorong implementasi kebijakan dalam pengetasan kemiskinan maka peneliti sependapat dengan Nugroho bahwa implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri.

F. Implikasi Strategis Implementasi Kebijakan

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan, tingkat partisipasi informan dapat dikatakan sangat tinggi. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang tepat agar masyarakat aktif berpartisipasi dalam pembangunan sehingga tujuan PNPM-GSC untuk menjadikan masyarakat agar mandiri dapat tercapai. Hasil wawancara dengan ketua PNPM-GSC kecamatan Larantuka menunjukkan bahwa selain variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi masih ditemukan indikator lain yang didaulat sebagai indikator penyebab angka putus sekolah di kelurahan Ekasapta. Hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan dan budaya setempat. Selain itu kesadaran dalam bidang kesehatan. Digeneralisasi oleh ketua PNPM-GSC kecamatan Larantuka bahwa di Kelurahan Ekasapta masih ditemukan ibu dan bayi meninggal. Kondisi ini muncul karena tidak terkoordinasi dengan baik komunikasi yang dibangun oleh pemangaat dengan pelaku program dan sebaliknya responsibilitas yang ditunjukkan oleh pelaku dan pemerintah setempat dalam mewujudkan kenyamanan memperoleh perawatan yang layak di kelurahan Ekasapta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sebagai sumberdaya dalam menjalankan program PNPM-GSC masih kurang jika dibandingkan dengan desa Mokantarak. Hasil petikan wawancara dengan kepala desa Mokantarak tercermin adanya kerjasama yang sinergis antara pemerintah, pelaku dan pemanfaat terutama dalam merespons kebutuhan ibu melahirkan. Hal ini ditunjuk dengan kesiagaan tenaga medis disaat adanya kelahiran bayi di desa Mokantarak.

Kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, diantaranya :

1. Perencanaan pembangunan partisipatif harus konsisten dan serius dari semua pihak dalam pelaksanaan PNPM – GSC.
2. Mengoptimalkan kapasitas dan peranan stakeholder terkait terutama konsultan atau fasilitator dan tokoh masyarakat
3. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui media massa. Masyarakat tidak hanya mengetahui tentang program dari pertemuan yang dihadiri, tetapi juga dapat mengetahui dari media formal maupun informal yang ada.
4. Koordinasi pihak-pihak terkait dalam PNPM -GSC terutama antara Pemerintah daerah dan Konsultan serta tokoh masyarakat. Fasilitator sebaiknya selalu berada di tengah-tengah masyarakat terutama dalam pelaksanaan kegiatan dan tidak berganti dalam satu tahun kegiatan berjalan.
5. Peningkatan pendidikan informal kepada masyarakat terutama masyarakat miskin sebagai upaya penguatan modal sosial masyarakat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Hasil penelitian di Kelurahan Ekasapta dan desa Mokantarak tidak menunjukkan gap yang mendalam diantara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dibangun melalui implementor sebagai penghubung antara pelaku dan pemanfaat program. Implementor dilengkapi dengan dokumen yang relevan dalam mengkomunikasikan isi kebijakan yang tertuang dalam program. Sedangkan tingkat pendidikan implementor di kedua tempat ini rata-rata setingkat SMA dan dibekali dengan petunjuk teknis program PNPM-GSC. Secara komparatif maka dapat dikatakan bahwa signifikansi jawaban informan di desa Mokantarak $\leq 30\%$ dibandingkan dengan di kelurahan Ekasapta $\geq 50\%$ dari setiap item kuisisioner.

2. Sumberdaya

Sumberdaya yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah implementor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi sumberdaya tidak ditemukan adanya signifikansi di kelurahan Ekasapta dan desa Mokantarak. Dalam pelaksanaan program implementor dibekali dengan petunjuk teknis (JUKNIS) program PNPM-GSC dan implementor diberikan kewenangan dan tanggung jawab. Terkait fasilitas maka dapat dikatakan bahwa fasilitas implementor tidak ada, yang ada adalah dana yang melekat pada program.

Deskripsi komparatif menunjukkan bahwa baik desa Mokantarak maupun kelurahan Ekasapta tidak ada signifikansi yang menonjol. Kedua tempat ini masing-masing sebesar $\geq 60\%$ dari setiap item kuisisioner.

3. Disposisi

Disposisi yang dibangun di desa Mokantarak berawal dari rumusan masalah yang cukup baik dan lugas melalui melalui musyawarah dan adanya evaluasi berkala 3 bulan sekali. Sedangkan di kelurahan Ekasapta ditemukan bahwa komitmen pemerintah sebagai pelaku program khususnya di kelurahan terkesan tidak ada dan dalam pelaksanaan program terkesan adanya indikasi yang mengakibatkan kematian ibu dan anak serta tidak terlihat mental yang baik dalam menganalisis program selanjutnya. Dari segi signifikansi maka dalam penelitian ini ditemukan bahwa adanya gap sebesar 30 % dimana di desa Mokantarak $\leq 30\%$ dan di kelurahan Ekasapta $\geq 60\%$ dari setiap item kuisisioner.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik. Cerminan di desa Mokantarak menunjukkan bahwa perumusan masalah cukup baik dan lugas, semuanya melalui musyawarah dan adanya evaluasi berkala 3 bulan sekali. Harapan untuk waktu mendatang PNPM-GSC tetap ada di kecamatan Larantuka. Sedangkan di kelurahan Ekasapta rumusan masalah cukup baik dan lugas dan semuanya melalui musyawarah dan evaluasi berkala. Menjadi kendala disaat rumusan masalah lebih besar dari program yang akan diperoleh. Harapan untuk masa mendatang PNPM-GSC tetap ada di kecamatan Larantuka

yang intinya dapat membantu masyarakat. Secara deskriptif maka dapat dikatakan bahwa signifikansi di desa Mokantarak $\geq 40\%$ dibandingkan dengan di kelurahan Ekasapta $\leq 20\%$. Dengan demikian terdapat gap sebesar 20% dari setiap item kuisisioner.

5. Pengentasan Kemiskinan

Implementasi kebijakan publik dalam variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan. Di desa Mokantarak ditemukan bahwa belum tersedianya kecukupan pangan. Sanitasi dan layanan perumahan masih 10% berada dalam kondisi tidak layak serta penyediaan air bersih jauh dari cukup. Kondisi ini berbeda dengan kelurahan Ekasapta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecukupan pangan bisa teratasi dan sanitasi dan layanan perumahan masih berbanding 50:50.

Keempat variabel di tersebut di atas (komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi) menunjukkan kelayakan implementasi kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan baik di desa Mokantarak maupun di kelurahan Ekasapta. Hasil penelitian menggambarkan bahwa adanya perbedaan pelaksanaan implementasi di desa Mokantarak dan kelurahan Ekasapta. Di desa Mokantarak implementasi program PNPM-GSC membawa signifikansi yang positif. Hal ini terlihat dari adanya sanitasi dan perumahan yang semakin membaik. Dalam penelitian peneliti menemukan masih sekitar 10% informan yang masih memiliki sanitasi dan perumahan yang tidak layak dibandingkan kelurahan Ekasapta masih sebesar 50%.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dirumuskan, maka saran yang dapat disampaikan untuk peningkatan partisipasi masyarakat pada program PNPM-GSC adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat miskin pada PNPM-GSC diperlukan peran stakeholder yang terkait terutama mengajak masyarakat untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan. Hal ini akan membuat masyarakat lebih paham akan tujuan dan sasaran program.
2. Fasilitator sebagai motor penggerak masyarakat lebih aktif lagi dan sebaiknya tetap di lokasi kegiatan dalam tahun berjalannya kegiatan. Penggantian fasilitator membutuhkan waktu penyesuaian dalam mengenali dan mendekati masyarakat. Di samping fasilitator PNPM-GSC sebaiknya juga dibantu oleh tenaga pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah.
3. Sinergisitas peran pemerintah, pengurus kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat dan peran fasilitator merupakan faktor eksternal mempengaruhi seluruh bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat khususnya pemanfaat program PNPM-GSC. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dikaji partisipasi masyarakat pada pelaksanaan PNPM – GSC secara detail dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari Teks Book

- Budi Winarno.(2002).*Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo
- Dunn, William N. (2000) Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Ekowati, Lilik. (2005). *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program*. Surakarta :PustakaCakra
- Hasan, I.M. (2002). *Pokok-pokok materi metode penelitian dan aplikasinya*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Indiahono, Dwiyanto.(2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta :Gava media
- Marwotohadi, (2005).*Evaluasi Atas Kebijakan Program Beras Bagi Keluarga Miskin Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Gunung kidul*, UniversitasGadjahMada.
- Nugroho, Riat (2003). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo
- Sanusi, Anwar.(2003). Metodologi Penelitian Praktis Untuk Ilmu Sosial dan Ekonomi.Edisi Pertama. Cet. Pertama. Malang: Buntara Media
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono.(2012). *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit CV. ALFABETA
- Suharto,Edi. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Edisi Revisi. Bandung :Alfabeta
- Thoha, Mittan. (2002). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada
- Wahab, Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan Negara*. Jakarta :BumiAksara

Referensi dari Jurnal

- Adianto. (2012). Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kebijakan Publik. Volume 3 Nomor 2. Oktober*
- Bakry, Aminuddin. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK. Volume 2, Nomor 1. April.hal.6*

- Dicky Djatnika Utama.(2009). Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik. Vol. 6, No. 1, Januari 2009:1-12. Universitas Diponegoro*
- Safawi Indra dkk (2010). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan. *Jurnal Kebijakan Publik. Volume 3 Nomor 2. Oktober. hal.59-141*
- Sahuri, Chalid, Achnes Sofia dkk (2012). Implementasi PNPM Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik. Volume 3 Nomor 2. Oktober. hal.59-141*
- Sujianto dkk. 2012. Implementasi Program Raskin dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 2, Oktober, hlm. 59-141*
- Sukidjo. (2009). Strategi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan Pada PNPM Mandiri. *Cakrawala Pendidikan. Juni. Th XXVIII, No.2. Universitas Negeri Yogyakarta*
- Sumiyati, Intan. (2013). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus Desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap). *eJournal Pemerintahan Integratif. Volume 1, Nomor 1 hal. 28-36*
- Sunarno, SH, M.Sc. (2005) Revitalisasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru Pendekatan Implementasi Kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik. Volume 1/No.1/hal.4*
- Wahyu Dwi, P. (2006). Perbandingan Kebijakan Publik Pemerintahan Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Administrasi Publik, Vol. III, No, 1 hal. 256.*

Referensi dari Surat Keputusan

- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No: 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.
- Perpres No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Surat Keputusan Menkokesra No. 28/Kep/Menko/Kesra/XI/2006 yang Diperbaharui dengan Kepmenkokesra No. 23/KEP/Menko/Kesra/VII/2007 tentang Tim Pengendali PNPM Mandiri.

Referensi dari Buletin

- PNPM Mandiri.Modul Khusus Fasilitator: *Meningkatkan Kapasitas Masyarakat.*
- PNPM-GSC. 2009. Program Kemitraan Inovatif untuk Mengakhiri Gizi Buruk di NTT. *Buletin Kuartal Edisi 5. Oktober. hal. 3*

Lampiran: 1

PEDOMAN WAWANCARA

Judul: “Studi Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – Generasi Sehat Cerdas (GSC) Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Larantuka”

Identitas Responden

1. No. Responden (diisi peneliti) :
2. Alamat :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
4. Usia :
5. Pendidikan Terakhir :
 - a. SD
 - b. SMP
 - c. SMA
 - d. Lainnya.....

A. Variabel X1 : Komunikasi

1. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I implementor PNPM-GSC dibekali dengan dokumen yang relevan dengan kebijakan?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik sebagai pelaku kebijakan dalam kegiatan PNPM-GSC. Menurut Anda?

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....

3. Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya program PNPM-GSC. Menurut anda?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

B. Variabel X2 : Sumberdaya

1. Staf yang dipakai sebagai implementor dalam program PNPM-GSC memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Menurut anda?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Para personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program. Menurut anda?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

3. Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut anda?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Menurut anda?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

C. Variabel X3 : Disposisi

1. Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan program terlihat sangat baik. Menurut anda?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menurut anda?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

D. Variabel X4 : Struktur Birokrasi

1. Perumusan masalah dalam program PNPM-GSC cukup lugas dan representatif. Menurut anda?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik terhadap sasaran maupun terhadap output terlihat baik. Menurut anda?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Rekomendasi atas program dan sasaran program sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang diikutkan dalam program PNPM-MPd. Menurut anda?

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

4. Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dari kegiatan atau program PNPM-GSC Menurut anda?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

E. Variabel Y: Pengentasan Kemiskinan

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari kemiskinan. Menurut anda?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan merupakan imbas dari kemiskinan. Menurut anda?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

-
.....
3. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut anda?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Kualitas dan mutu air bersih sebagai indikasi bahwa ketidakmampuan dalam mengelola kesehatan. Menurut anda?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Rendahnya akses dan mutu pelayanan pendidikan merupakan bentuk konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut anda?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Larantuka: Juni 2013

*Lampiran: 2***1. Dokumentasi Peneliti dan Informan di Kelurahan Ekasapta**

Mutmainah Tonu usia 6 bulan anak dari ibu Aisyah S.L. T yang sejak dalam kandungan ibu sampai usia 6 bulan mendapat bantuan kesehatan. Saat ini Mutmainah mendapat fasilitas imunisasi dan PMT di posyandu PNPM-GSC Kelurahan Ekasapta



Bapak Jhon Suksin usia 53 tahun dengan jumlah anak 6 orang sedang menjelaskan kepada peneliti bahwa 3 orang anaknya selama ini terbantu dalam pendidikan berkat campur tangan program PNPM-GSC



Fasilitas Posyandu PNPM-GSC di Kelurahan Ekasapta yang tidak hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan tetapi juga sebagai tempat berkumpulnya pelaku dan penerima manfaat PNPM-GSC

*Lampiran: 3***Dokumentasi Peneliti dan Informan di Desa Mokantarak**

Bapak Markus P Hurint 39 tahun sedang menceritakan program PNPM-GSC. Dua orang anaknya di SD kelas V dan kelas I ikut dalam program PNPM-GSC.



Ibu Ana Leping Kumanireng bersama cucunya Hironimus N. Kelen usia 5 tahun ikut dalam program PNPM-GSC.

Lampiran: 4

Dokumentasi peneliti bersama Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.



Peneliti sedang menggali informasi khususnya tentang peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program PNPM-GSC di desa Mokantarak.



Peneliti bersama Sekretaris kelurahan Ekasapta selesai membahas masalah pelaksanaan program PNPM-GSC di kelurahan Ekasapta. Pada intinya PNPM-GSC berjalan sendiri. Pemerintah kelurahan hanya memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program.

Lampiran 5

Dokumentasi Peneliti dengan Staf PNPM-GSC Kecamatan Larantuka



Dapur informasi PNPM-GSC kecamatan Larantuka. Dari sinilah peneliti memperoleh banyak informasi tentang data penelitian dan kesulitan selama penelitian danat diatasi di tempat ini



Dua gambar yang mendeskripsikan bahwa PNPB-GSC berada dalam satu struktur baku dengan delegasi wewenang yang jelas serta jenis kegiatan dan alokasi dana yang menyertai kegiatan dipajang secara transparan sebagai salah satu bentuk transparansi pelaksanaan program.

Para personil yang turun ke lapangan sudah dibekali dengan informasi yang memadai sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka sesuai juknis yang telah diturunkan dalam program.

3. **Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut anda?**

Kewenangan diberikan penuh kepada sumberdaya dalam program PNPM dengan bertanggung jawab baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi kegiatan.

4. **Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Menurut anda?**

Fasilitas lain seperti pemberian imunisasi secara gratis kepada bayi, PMT pada setiap minggu di posyandu bagi Balita. Selain itu fasilitas posyandu seperti timbangan bayi. Sedangkan di bidang pendidikan seperti alat olahraga dan musik.

Variabel : Disposisi

1. **Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan program terlihat sangat baik. Menurut anda?**

Antusias dan siap mendukung setiap program yang masuk di desa Mokantarak.

2. **Mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menurut anda?**

Selalu member kepercayaan kepada pelaksana program sambil tetap mengontrol jalannya program.

Variabel Struktur Birokrasi

1. **Perumusan masalah dalam program PNPM-GSC cukup lugas dan representatif. Menurut anda?**

Perumusan masalah dilakukan dengan cara musyawarah dalam menemukan gagasan di bidang pendidikan kesehatan dan selanjutnya dipilih prioritas masalah.

2. **Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik terhadap sasaran maupun terhadap output terlihat baik. Menurut anda?**

Program ini baik adanya walau di satu pihak memanjakan masyarakat tetapi di pihak lain program ini dapat membantu masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

3. Rekomendasi atas program dan sasaran program sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang diikutkan dalam program PNPM-MPd. Menurut anda?

Untuk tetap ada di waktu mendatang.

4. Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dari kegiatan atau program PNPM-GSC Menurut anda?

Evaluasi selalu dilakukan setelah adanya pantauan program secara berkala. Setia bulan ada rapat koordinasi.

Variabel Pengentasan Kemiskinan

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari kemiskinan. Menurut anda?

Pangan belum tercukupi walau nilai gizi tetap ada dan belajar secara sadar untuk hidup bersih dan sehat.

2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan merupakan imbas dari kemiskinan. Menurut anda?

Iya. Tetapi dalam program ini pelayanan baik dan normal.

3. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut anda?

Rumah di desa Mokantarak pada umumnya layak huni dan telah tersedianya fasilitas Mandi Cuci Kakus walaupun diakui ada yang masih darurat.

4. Kualitas dan mutu air bersih sebagai indikasi bahwa ketidakmampuan dalam mengelola kesehatan. Menurut anda?

Kualitas air bersih selalu ada dan adanya bantuan program PNPM yang membantu jaringan pipa sampai di desa Mokantarak.

5. Rendahnya akses dan mutu pelayanan pendidikan merupakan bentuk konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut anda?

Yang mengenyam pendidikan dijamin akan hidup lebih baik. Dengan demikian perlu ada motivasi dalam membina dan mengembangkan minat belajar anak untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

A.2. Nama Informan	: BPL
No.Responden	: MK 2
Alamat	: Mokantarak RT 01 RW 01
JenisKelamin	: Perempuan
Usia	: 39 tahun
PendidikanTerakhir	: SMA
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Variabel Komunikasi

- 1. Apakah menurut Bapak/Ibu/Sandara/I implementor PNPM-GSC dibekali dengan dokumen yang relevan dengan kebijakan?**
Implementor mempunyai data tentang bayi dan balita, ibu hamil, menyusui, anak usia 5 tahun sampai dengan SMF
- 2. Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik sebagai pelaku kebijakan dalam kegiatan PNPM-GSC. Menurut Anda?**
Implementor melakukan sosialisasi dengan memberikan informasi secara baik dan mengkomunikasikan dengan baik isi program PNPM-GSC.
- 3. Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya program PNPM-GSC. Menurut anda?**
Pelaku program dapat menjalankan program dengan baik dan selalu ada pergantian dalam pemberdayaan dan pelatihan.

Variabel Sumberdaya

- 1. Staf yang dipakai sebagai implementor dalam program PNPM-GSC memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Menurut anda?**
Staf yang dipakai dipilih dengan kriteria sukarela dalam menjalankan program tanpa meninggalkan kualitas pengetahuan yang dimiliki.
- 2. Para personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program. Menurut anda?**
Personil yang turun ke kelompok sasaran mempunyai sikap proaktif dan turun menjangkau dusun-dusun untuk mencari informasi yang memadai.
- 3. Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut anda?**
Staf yang dipakai dalam program memiliki wewenang penuh dan mempunyai tanggung jawab untuk memberi pemahaman kepada

masyarakat yang belum sadar dan paham akan isi kebijakan dalam program PNPM-GSC.

4. **Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Menuru tanda?**

Fasilitas lain berupa PMT, Imunisasi, posyandu dan alat music di sekolah yang sampai saat ini belum digunakan.

Variabel Disposisi

1. **Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan program terlihat sangat baik. Menuru tanda?**

Sikap dan komitmen pemerintah setempat adalah mendukung dan antusias dalam menerima program PNPM-GSC.

2. **Mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menuru tanda?**

Pemerintah setempat selalu proaktif dan sering terjun ke dusun-dusun untuk mendengarkan gagasan-gagasan yang menjadi kebutuhan sekaligus masalah di desa Mokantarak.

Variabel Struktur Birokrasi

1. **Perumusan masalah dalam program PNPM-GSC cukup lugas dan representatif. Menurut anda?**

Perumusan masalah dimulai dengan menggali gagasan dan membuat prioritas dari dusun kemudian disosialisasikan di tingkat desa dan selanjutnya di tingkat kecamatan.

2. **Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik terhadap sasaran maupun terhadap output terlihat baik. Menurut anda?**

Untuk waktu mendatang program ini baik untuk tetap dilaksanakan tetapi pelaku program perlu diganti dan minimal pelaku program yang jujur dalam menjalankan program.

3. **Rekomendasi atas program dan sasaran program sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang diikutkan dalam program PNPM-MPd. Menurut anda?**

Pelaku program harus lebih transparan dan lebih bertanggung jawab dan jujur agar program ini tepat sasaran. Keuangan sebaiknya langsung bisa ditangani oleh penerima manfaat.

4. **Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dari kegiatan atau program PNPM-GSC. Menurut anda?**

Ada evaluasi tiap bulan untuk membuat perbaikan dari pelaksanaan program.

Variabel Pengentasan Kemiskinan

1. **Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari kemiskinan. Menurut anda?**
Makan harian adalah apa adanya dengan terpenuhinya asupan gizi yang cukup baik.
2. **Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan merupakan imbas dari kemiskinan. Menurut anda?**
PMT membantu meningkatkan kesehatan balita dan sangat baik adanya bidan yang selalu ada di posyandu dan selalu memberikan penyuluhan tentang cara hidup sehat.
3. **Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut anda?**
Akses sanitasi dan perumahan baik. MCK tersedia baik.
4. **Kualitas dan mutu air bersih sebagai indikasi bahwa ketidakmampuan dalam mengelola kesehatan. Menurut anda?**
Kualitas air tetap ada baik air milik desa yang diperoleh dari adanya program PNPM dan air PDAM.
5. **Rendahnya akses dan mutu pelayanan pendidikan merupakan bentuk konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut anda?**
Tergantung dari orangtua yang memberikan motivasi kepada anak bahwa pendidikan itu penting untuk masa yang akan datang.

A.3. **Nama Informan** : BKG
No.Responden : MK 3
Alamat : Mokantarak RT 02 RW 01
JenisKelamin : Laki-laki
Usia : 48 tahun
PendidikanTerakhir : SD
Pekerjaan : Petani

Variabel Komunikasi

1. **Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I implementor PNPM-GSC dibekali dengan dokumen yang relevan dengan kebijakan?**
Dokumen yang ada selama ini adalah data ibu hamil, Balita dan anak sekolah usia SD sampai SMP.
2. **Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik sebagai pelaku kebijakan dalam kegiatan PNPM-GSC. MenurutAnda?**
Implementor mengkomunikasikan dengan baik isi program dan member pemahaman kepada kami jika isi program belum kami pahami secara baik.

3. **Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya program PNPM-GSC. Menurut anda?**

Sangat berpengaruh terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat desa Mokantarak yang masih berada dalam lingkaran kemiskinan.

Variabel Sumberdaya

1. **Staf yang dipakai sebagai implementor dalam program PNPM-GSC memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Menurut anda?**

Staf yang dipakai cocok dan pas dalam program ini.

2. **Para personil yang turuu dalam program PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program. Menurut anda?**

Menurut saya para pegawai PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai. Mereka mendekati kami untuk menjelaskan program PNPM-GSC dari rumah ke rumah.

3. **Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki kewenangan yang cukup gna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut anda?**

Mereka mempunyai tanggung jawab yang bagus dalam mengelola program PNPM-GSC.

4. **Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Menurut anda?**

PMT, imunisasi gratis dan adanya kader posyandu yang selalu ada setiap waktu di posyandu.

Variabel Disposisi

1. **Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan program terlihat sangat baik. Menurut anda?**

Aparat pemerintah pada prinsipnya mendukung program PNPM-GSC.

2. **Mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menurut anda?**

Aparat dan pemerintah selalu proaktif dalam menjawab isi program PNPM-GSC lewat staf atau fasilitator desa yang ada di desa Mokantarak.

Variabel Struktur Birokrasi

1. **Perumusan masalah dalam program PNPM-GSC cukup lugas dan representatif. Menurut anda?**

Cukup lugas karena melibatkan masyarakat dalam menjawab dan menggali gagasan kebutuhan.

2. **Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik terhadap sasaran maupun terhadap output terlihat baik. Menurut anda?**

Untuk masa yang akan datang semoga lebih baik dari saat sekarang walau dalam bentuk program lain.

3. **Rekomendasi atas program dan sasaran program sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang diikutkan dalam program PNPM-MPd. Menurut anda?**

Semoga program ini berkelanjutan. Untuk PMT kalau bisa datangkan bibit biar ditanam sendiri oleh pemanfaat sehingga pemanfaatannya bisa jangka panjang.

4. **Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dari kegiatan atau program PNPM-GSC. Menurut anda?**

Pemantauan dan evaluasi selalu dilakukan secara berkala antara 2 atau 3 bulan sekali.

Variabel Pengentasan Kemiskinan

1. **Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari kemiskinan. Menurut anda?**

Persediaan makanan masih minim yang berakibat pada asupan gizi yang belum baik tetapi yang penting bisa makan tiga kali sehari.

2. **Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan merupakan imbas dari kemiskinan. Menurut anda?**

Akses kesehatan dengan adanya program ini terlihat baik dan pelayanan di posyandu juga terkesan normal.

3. **Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut anda?**

Perumahan masih sederhana dan MCK masih darurat.

4. **Kualitas dan mutu air bersih sebagai indikasi bahwa ketidakmampuan dalam mengelola kesehatan. Menurut anda?**

Kualitas air bersih dengan air desa atas bantuan PNPM.

5. **Rendah akses dan mutu pelayanan pendidikan merupakan bentuk konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut anda?**

Berpengaruh karena tergantung faktor ekonomi keluarga dalam merencanakan pendidikan untuk anak.

A.4	Nama Informan	: AHG
	No.Responden	: MK 4
	Alamat	: Mokantarak RT 04 RW 03
	JenisKelamin	: Perempuan
	Usia	: 45 tahun
	PendidikanTerakhir	: SPG
	Pekerjaan	: Guru

Variabel Komunikasi

1. **Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I implementor PNPM-GSC dibekali dengan dokumen yang relevan dengan kebijakan?**
Implementor dibekali dengan dokumen yang memuat data sasaran tiap RT dan RW yang meliputi ibu hamil, bayi dan balita serta anak usia sekolah dari SD sampai SMP.
2. **Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik sebagai pelaku kebijakan dalam kegiatan PNPM-GSC. Menurut Anda?**
Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik isi program PNPM GSC.
3. **Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya program PNPM-GSC. Menurut anda?**
Pengetahuan implementor dibekali dengan pelatihan KMPD dan cocok dalam membantu kelancaran pelaksanaan program PNPM-GSC.

Variabel Sumberdaya

1. **Staf yang dipakai sebagai implementor dalam program PNPM-GSC memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Menurut anda?**
Pelaku yang dijadikan staf pada prinsipnya sukarela tetapi ada pertimbangan kualitas dan semangat berkorban untuk masyarakat.
2. **Para personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program. Menurut anda?**
Personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai guna menunjang proses pelaksanaan program.
3. **Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut anda?**

Kewenang staf tetap ada tetapi selalu ada koordinasi dengan pemerintah desa yang selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan dalam program.

4. **Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Menuru tanda?**

Fasilitas fisik berbentuk posyandu dan perlengkapan olahraga di sekolah. Fasilitas lain yang diberikan dalam program ini berupa PMT, transportasi gratis bagi ibu hamil yang berisiko melahirkan.

Variabel Disposisi

1. **Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan program terlihat sangat baik. Menuru tanda?**

Sikap dan komitmen aparat pemerintah selalu mendukung program dan isi program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

2. **Mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menuru tanda?**

Mental proaktif ditunjukkan oleh aparat pemerintah dengan selalu turun ke dusun-dusun dalam mensosialisasikan isi program.

Variabel Struktur Birokrasi

1. **Perumusan masalah dalam program PNPM-GSC cukup lugas dan representatif. Menurut anda?**

Perumusan masalah dimulai dengan menggali gagasan oleh semua masyarakat dan selanjutnya penentuan prioritas sebagai keterwakilan kebutuhan.

2. **Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik terhadap sasaran maupun terhadap output terlihat baik. Menurut anda?**

Program tepat sasaran dan untuk waktu mendatang memberikan yang terbaik.

3. **Rekomendasi atas program dan sasaran program sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang diikutkan dalam program PNPM-MPd. Menurut anda?**

Semoga program ini berkelanjutan untuk waktu-waktu yang akan datang baik dari isi maupun kebijakan program yang pro rakyat.

4. **Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dari kegiatan atau program PNPM-GSC. Menurut anda?**

Evaluasi berkala selalu dibuat dan harapan semoga program tetap berjalan baik.

Variabel Pengentasan Kemiskinan

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari kemiskinan. Menurut anda?

Pola konsumsi pangan cukup baik. Secara keseluruhan desa Mokantarak mayoritas petani dan nelayan jadi pencapaian kadar gizi ditentukan oleh kebutuhan dan daya beli masing-masing.

2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan merupakan imbas dari kemiskinan. Menurut anda?

Akses terhadap kesehatan semenjak adanya program PNPM-GSC terlihat cukup baik dan ditunjang dengan pelayanan yang baik.

3. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut anda?

Rumah tempat tinggal saat ini layak huni dan begitu juga dengan sanitasi seperti MCK ada dan layak.

4. Kualitas dan mutu air bersih sebagai indikasi bahwa ketidakmampuan dalam mengelola kesehatan. Menurut anda?

Sumber air bisa dikatakan sehat yang terdiri dari air desa sebagai bagian bantuan dari PNPM dan air PDAM.

5. Rendahnya akses dan mutu pelayanan pendidikan merupakan bentuk konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut anda?

Sangat berpengaruh dan saat ini diharapkan tingkat kesadaran masyarakat bisa meningkat tentang arti pentingnya pendidikan bagi kesejahteraan di masa depan.

A.5	Nama Informan	: AWK
	No. Responden	: MK 5
	Alamat	: Mokantarak RT 05 RW 03
	Jenis Kelamin	: Pria
	Usia	: 34 tahun
	Pendidikan Terakhir	: SMA
	Pekerjaan	: Sopir

Variabel Komunikasi

1. Apakah menurut Bapak/Ibu/Sandara/I implementor PNPM-GSC dibekali dengan dokumen yang relevan dengan kebijakan?

Implementor dibekali dengan data tentang ibu hamil, bayi balita dan anak usia SD-SMP.

2. Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik sebagai pelaku kebijakan dalam kegiatan PNPM-GSC. Menurut Anda?

Implementor mengkomunikasikan dengan baik isi program sesuai dengan petunjuk teknis (JUKNIS) dalam program PNPM-GSC.

3. Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya program PNPM-GSC. Menurut anda?

Berpengaruh karena pengetahuan yang relevan dapat memberikan pemahaman yang sama tentang tujuan akhir dari program yang dijabarkan dalam isi program.

Variabel Sumberdaya

1. Staf yang dipakai sebagai implementor dalam program PNPM-GSC memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Menurut anda?

Mutu dan jumlah staf bisa diandalkan dan bisa dikatakan mampu untuk menjalankan program PNPM-GSC.

2. Para personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program. Menurut anda?

Informasi yang dimiliki para personil sangat memadai sehingga memudahkan mereka menjalankan implementasi kebijakan PNPM-GSC.

3. Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut anda?

Kewenangan dan tanggung jawab tetap ada yang dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban dari program yang dilakukan.

4. Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Menurut anda?

PMT dan Imunisasi serta posyandu.

Variabel Disposisi

1. Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan program terlihat sangat baik. Menurut anda?

Sikap dan komitmen aparat pemerintah selalu mendukung dan terlihat proaktif dalam setiap pertemuan-pertemuan yang membahas perkembangan program.

2. Mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menurut anda?

Mental yang baik ditunjukkan dengan sikap proaktif turun ke rumah-rumah penduduk dan turut serta mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan program PNPM-GSC.

Variabel Struktur Birokrasi

1. Perumusan masalah dalam program PNPM-GSC cukup lugas dan representatif. Menurut anda?

Perumusan masalah dimulai dari dusun dan menentukan prioritas masalah yang menjawab kebutuhan.

2. Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik terhadap sasaran maupun terhadap output terlihat baik. Menurut anda?

Bisa berjalan dengan baik dan dapat mendatangkan manfaat yang lebih banyak.

3. Rekomendasi atas program dan sasaran program sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang diikutkan dalam program PNPM-MPd. Menurut anda?

Semoga program ini tetap berjalan dan berkelanjutan walau dananya kecil tapi cukup membantu dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

4. Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dari kegiatan atau program PNPM-GSC. Menurut anda?

Selalu ada evaluasi tiap tahun, semester, triwulan dan tiap bulan.

Variabel Pengentasan Kemiskinan

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari kemiskinan. Menurut anda?

Ketersediaan mutu pangan untuk sementara cukup dengan asupan gizi yang cukup.

2. Terbatasnya akses dan reudahnya mutu layuan kesehatan merupakan imbas dari kemiskinan. Menurut anda?

Dengan adanya prioritas pada kesehatan maka dapat dikatakan sampai saat ini pelayanan kesehatan baik sekali.

3. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut anda?

Rumah dan sanitasi baik dan memenuhi syarat kesehatan.

4. Kualitas dan mutu air bersih sebaga indikasi bahwa ketidakmampuan dalam mengelola kesehatan. Menurut anda?

Kualitas air yang dipakai saat ini adalah air desa berkat bantuan PNPM pada program sebelumnya.

5. Rendahnya akses dan mutu pelayanan pendidikan merupakan bentuk konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut anda?

Sangat berpengaruh. Hal ini dapat terlihat dengan rendahnya tingkat dropout anak-anak usia sekolah terutama pada tingkat SMP.

A.6

Nama Informan	: MPH
No.Responden	: MK 6
Alamat	: Mokatirak RT 06 RW 03
JenisKelamin	: Pria
Usla	: 39 tahun
PendidikanTerakhir	: SMA
Pekerjaau	: Pengrajin Meubel

Variabel Komunikasi

1. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I implementor PNPM-GSC dibekali dengan dokumen yang relevan dengan kebijakan?

Iya. Implementor dibekali dengan data dan informasi tentang penduduk di setiap RT dan RW. Informasi itu meliputi ibu hamil, bayi dan balita dan anak usia SD-SMP.

2. Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik sebagai pelaku kebijakan dalam kegiatan PNPM-GSC. MenurutAnda?

Implementor sebelum turun ke lapangan dibekali dengan bimbingan teknis (BIMTEK). Implementor mengkomunikasikan isi kebijakan dari dusun dan dilanjutkan di desa.

3. Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakau sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya program PNPM-GSC. Menurut anda?

Biasanya informasi datang dari kecamatan terus dilanjutkan ke desa. Dari desa informasi kemudian dilanjutkan kepada kelompok sasaran melalui implementor yang telah memperoleh bimbingan teknis.

Variabel Sumberdaya

- 1. Staf yang dipakai sebagai implementor dalam program PNPM-GSC memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Menurut anda?**

Koordinator terdiri dari 2 orang. TPK 3 orang dan tim permusyawaratan desa sebanyak 6 orang. Para pelaku atau implementor ini selalu bekerja sama dalam meingplementasikan isi kebijakan program.

- 2. Para personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program. Menurut anda?**

Informasi biasanya datang dari kecamatan dan kemudian disosialisasikan di tingkat desa dan dusun serta RT dan RW. Bila terjadi kesulitan dalam informasi maka dikembalikan ke desa dan selanjutnya ke kecamatan untuk tindak lanjut.

- 3. Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut anda?**

Kewenangan para staf selalu ada sebagai bagian tanggung jawab dalam program di lapangan.

- 4. Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Menurut anda?**

Untuk balia berupa makanan tambahan, untuk murid SD-SMP berupa sepatu, seragam sekolah dan uang transportasi. Untuk bayi berupa imunisasi sebanyak 2 kali.

Variabel Disposisi

- 1. Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan program terlihat sangat baik. Menurut anda?**

Sikap dan komitmen aparat pemerintah tetap mendukung program sehingga dalam pengawasan program tidak ditemukan masalah.

- 2. Mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menurut anda?**

Mental yang ditunjukkan adalah mendukung program. Hal ini dibuktikan dengan anak-anak bisa sekolah sesuai keinginan.

Variabel Struktur Birokrasi

- 1. Perumusan masalah dalam program PNPM-GSC cukup lugas dan representatif. Menurut anda?**

Ada dan cukup lugas perumusan masalah seperti kebutuhan seragam sekolah, buku tulis, mantel dan payung serta uang transport.

- 2. Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik terhadap sasaran maupun terhadap output terlihat baik. Menurut anda?**

Yakin lebih baik walaupun pada awal-awal program dana yang diturunkan jumlahnya cukup besar dibandingkan dengan tahun sekarang. Walaupun demikian murid yang duduk di SMP masih bisa terbantu dari program ini.

- 3. Rekomendasi atas program dan sasaran program sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang diikutkan dalam program PNPM-MPd. Menurut anda?**

Berkelanjutan dan ada program-program yang lebih inovatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

- 4. Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dari kegiatan atau program PNPM-GSC. Menurut anda?**

Ada evaluasi seperti di sekolah ada absensi untuk murid yang mendapat manfaat dari program PNPM GSC, di tingkat RT dan RW dan di desa. Kadang-kadang implementor datang langsung ke rumah.

Variabel Pengentasan Kemiskinan

- 1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari kemiskinan. Menurut anda?**

Gizi belum sempurna karena penghasilan sehari masih sangat kecil untuk meningkatkan nilai gizi pangan.

- 2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan merupakan imbas dari kemiskinan. Menurut anda?**

Ya. Tetapi dengan adanya program PNPM-GSC ada peningkatan kesehatan karena ada pelayanan imunisasi gratis, pemeriksaan ibu hamil dan makanan tambahan untuk balita.

- 3. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut anda?**

Perumahan dan sanitasi sudah termasuk baik dan layak pakai dan dapat dihuni.

4. Kualitas dan mutu air bersih sebaga indikasi bahwa ketidakmampuan dalam mengelola kesehatan. Menurut anda?

Kualitas dan mutu air baik karena berasal dari mata air sendiri dan lewat bantuan program PNPM sebelumnya telah dibuat jaringan sampai di desa Mokantarak. Selain itu untuk menjamin keberlangsungan mutu air maka tiap bulan ada iuran sebesar Rp 1.000.

5. Rendahnya akses dan mutu pelayanan pendidikan merupakan bentuk konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut anda?

Iya. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan maka semakin baik juga tingkat kesejahteraan rakyat. Hal ini dilihat dari hasil nilai ujian.

A.7 **Nama Informan** : HHL
No.Responden : MK 7
Alamat : Mokantarak RT 07 RW 03
JenisKelamin : Pria
Usia : 46 tahun
PendidikanTerakhir : SD
Pekerjaan : Petani

Variabel Komunikasi

1. **Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I implementor PNPM-GSC dibekali dengan dokumen yang relevan dengan kebijakan? Implementor dibekali dengan informasi tentang pendidikan kelompok sasaran seperti ibu hamil, balita dan anak-anak yang mengenyam pendidikan di SD-SMP.**
2. **Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik sebagai pelaku kebijakan dalam kegiatan PNPM-GSC. MenurutAnda?**
Baik dan penuh tanggung jawab
3. **Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya program PNPM-GSC. Menurut anda?**
Iya dan saya pikir para implementor yang diturunkan ke kelompok sasaran sudah dilengkapi dengan petunjuk teknis.

Variabel Sumberdaya

1. Staf yang dipakai sebagai implementor dalam program PNPM-GSC memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Menurut anda?

Staf yang dipakai sebagai implementor memiliki jumlah dan mutu yang dapat diandalkan karena sudah dibekali dengan pedoman juknis.

2. Para personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program. Menurut anda?

Informasi cukup jelas karena sebelumnya sudah ada pemetaan kelompok sasaran dari tingkat RT/RW, dusun dan desa.

3. Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut anda?

Cukup baik dan cukup bijak dalam menganalisis isi program.

4. Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Menurut anda?

Posyandu dan fasilitas pendidikan anak seperti sepatu, seragam sekolah dan payung dan mantel hujan.

Variabel Disposisi

1. Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan program terlihat sangat baik. Menurut anda?

Ada peranan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program berupa kesediaan aparat pemerintah dalam mensosialisasikan isi program.

2. Mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menurut anda?

Pada prinsipnya baik dan mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Untuk mengawasi bantuan di bidang pendidikan, aparat dan pemerintah menegur anak-anak yang tidak sekolah.

Variabel Struktur Birokrasi

1. Perumusan masalah dalam program PNPM-GSC cukup lugas dan representatif. Menurut anda?

Saya menilai perumusan masalah dalam program ini cocok untuk dijalankan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa Mokantarak.

2. **Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik terhadap sasaran maupun terhadap output terlihat baik. Menurut anda?**

Saya melihat ada peningkatan program ini dari tahun ke tahun semenjak tahun 2007. Untuk ke depannya program ini cocok dan bagus dilanjutkan.

3. **Rekomendasi atas program dan sasaran program sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang diikutkan dalam program PNPM-MPd. Menurut anda?**

Program PNPM-GSC sangat menyentuh kebutuhan masyarakat.

4. **Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dari kegiatan atau program PNPM-GSC. Menurut anda?**

Pemantauan dan evaluasi ada setiap 3 bulan sekali. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui adanya peningkatan program dari tahun ke tahun.

Variabel Pengentasan Kemiskinan

1. **Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari kemiskinan. Menurut anda?**

Kecukupan mutu pangan sejauh ini bisa diatasi walau nilai gizi apa adanya akibat dari banyaknya kebutuhan dalam rumah dan penghasilan yang kecil.

2. **Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan merupakan imbas dari kemiskinan. Menurut anda?**

Menurut saya, saya setuju. Setelah adanya program ini layanan kesehatan mulai terasa menjadi kebutuhan utama seperti imunisasi, TMT untuk balita dan kontrol kesehatan untuk ibu hamil.

3. **Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut anda?**

Perumahan dan sanitasi (MCK) baik dan layak huni dan layak dipakai.

4. **Kualitas dan mutu air bersih sebaga indikasi bahwa ketidakmampuan dalam mengelola kesehatan. Menurut anda?**

Mutu air bersih tidak menjadi masalah karena ada air desa yang pada tahun sebelumnya mendapat bantuan dari PNPM.

5. **Rendahnya akses dan mutu pelayanan pendidikan merupakan bentuk konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut anda?**

2. Para personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program. Menurut anda?

Iya dan itu terbukti apa yang mereka sampaikan dengan kondisi yang ada dalam program ini.

3. Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut anda?

Melalui pemerintah desa program ini dijelaskan dengan baik dan selanjutnya mereka diberikan kewenangan untuk turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan bantuan.

4. Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Menurut anda?

Pembangunan posyandu, uang transportasi untuk anak SD-SMP, TMT untuk anak balita dan pelayanan rutin di posyandu.

Variabel Disposisi

1. Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan program terlihat sangat baik. Menurut anda?

Ada dukungan dalam bentuk komitmen dari pemerintah setempat.

2. Mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menurut anda?

Ada dalam bentuk delegasi wewenang yang diberikan kepada staf atau pegawai PNPM.

Variabel Struktur Birokrasi

1. Perumusan masalah dalam program PNPM-GSC cukup lugas dan representatif. Menurut anda?

Iya. Staf PNPM yang sudah mendapatkan data dari desa dan mereka tahu kebutuhan kami. Jadi disaat mereka datang ke rumah mereka sudah mengantongi apa saja kekurangan kami sehingga bisa diikuti dalam program PNPM-GSC.

2. Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik terhadap sasaran maupun terhadap output terlihat baik. Menurut anda?

Lebih baik dan semoga anak kami dapat bantuan lagi dari program ini.

3. Rekomendasi atas program dan sasaran program sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang diikutkan dalam program PNPM-MPd. Menurut anda?

Untuk ke depannya semoga program ini dapat menjawab kebutuhan kami khususnya pendidikan anak.

4. Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dari kegiatan atau program PNPM-GSC. Menurut anda?

Evaluasi diadakan di balai desa dan pemantauan selalu dari jauh. Tidak ada staf yang datang ke rumah setelah program ini berjalan.

Variabel Pengentasan Kemiskinan

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari kemiskinan. Menurut anda?

Mutu pangan kadang tidak baik. Kadang makan tidak sampai 3 kali dalam sehari.

2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan merupakan imbas dari kemiskinan. Menurut anda?

Iya. Setelah ada program ini saya merasa terbantu. Anak saya mendapat pelayanan kesehatan seperti TMT melalui kartu SKTM dan JPS.

3. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut anda?

Akses layanan perumahan dan sanitasi baik.

4. Kualitas dan mutu air bersih sebagai indikasi bahwa ketidakmampuan dalam mengelola kesehatan. Menurut anda?

Kualitas air baik karena air desa yang dibantu juga dari program PNPM sebelumnya.

5. Rendahnya akses dan mutu pelayanan pendidikan merupakan bentuk konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut anda?

Sangat membantu kami dan diharapkan untuk ke depan PNPM-GSC tetap ada di desa kami.

A.9	Nama Informan	: MLH
	No.Responden	: MK 9
	Alamat	: Mokantarak RT 09 RW 05
	JenisKelamin	: Perempuan
	Usia	: 44 tahun
	PendidikanTerakhir	: SMP
	Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Variabel Komunikasi

- 1. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I implementor PNPB-GSC dibekali dengan dokumen yang relevan dengan kebijakan?**

Dokumen yang dibawa implementor berupa informasi tentang pendidikan kelompok sasaran seperti ibu hamil, balita dan anak-anak yang mengenyam pendidikan di SD-SMP.

- 2. Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik sebagai pelaku kebijakan dalam kegiatan PNPB-GSC. Menurut Anda?**

Baik karena sebelumnya sudah dibekali dengan petunjuk teknis pelaksanaan program baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan.

- 3. Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya program PNPB-GSC. Menurut anda?**

Rata-rata implementor yang diturunkan mempunyai pengetahuan yang relevan dan sudah tahu kondisi riil di RT atau RW dimana mereka akan mengunjungi data sasaran.

Variabel Sumberdaya

- 1. Staf yang dipakai sebagai implementor dalam program PNPB-GSC memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Menurut anda?**

Jumlah staf semuanya ada 14 orang yang telah diangkat dan dipilih serta disetujui dalam rapat atau musyawarah desa. Jadi secara sederhana mereka dapat diandalkan.

- 2. Para personil yang turun dalam program PNPB-GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program. Menurut anda?**

Yang pasti iya karena tanpa informasi yang memadai mereka tidak akan tahu kelompok sasaran yang akan mereka kunjungi. Data sasaran itu meliputi; kepala keluarga yang mempunyai ibu hamil,

anak balita dan anak-anak yang sedang mengenyam pendidikan di SD dan SMP.

3. **Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut anda?**

Mereka diberikan wewenang dari desa untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan program PNPM-GSC.

4. **Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Menurut anda?**

Di posyandu berupa buku KMS yang diberikan secara gratis. Kalau dalam pendidikan terutama anak-anak SD-SMP diberikan uang transport, seragam dan sepatu sekolah.

Variabel Disposisi

1. **Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan program terlihat sangat baik. Menurut anda?**

Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah terlihat ada dalam bentuk tanggung jawab seperti kepala dusun dilibatkan dalam tim TPK.

2. **Mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menurut anda?**

Iya. Ada kerja sama dan tanggung jawab sesuai wewenang dan delegasi yang diberikan kepada masing-masing staf yang menjalankan program PNPM-GSC.

Variabel Struktur Birokrasi

1. **Perumusan masalah dalam program PNPM-GSC cukup lugas dan representatif. Menurut anda?**

Rumusan masalah bisa menjawab kebutuhan masyarakat.

2. **Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik terhadap sasaran maupun terhadap output terlihat baik. Menurut anda?**

Untuk ke depan pendataan sasaran dari RT dan selanjutnya ke desa dan kecamatan dan harapan semoga lebih baik dan ada peran lebih aktif lagi baik kelompok sasaran maupun pelaku program.

3. **Rekomendasi atas program dan sasaran program sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang diikutkan dalam program PNPM-MPd. Menurut anda?**

Program ini sangat menyentuh terutama bagi KK miskin karena itu perlu ada diskusi untuk menentukan KK yang mengikuti program PNPM-GSC.

4. Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dari kegiatan atau program PNPM-GSC. Menurut anda?

Selalu ada baik di kantor desa maupun di posyandu. Evaluasi biasanya dilakukan 3 bulan atau sebulan sekali dan biasanya ada peningkatan setelah ada evaluasi.

Variabel Pengentasan Kemiskinan

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari kemiskinan. Menurut anda?

Belum memenuhi gizi untuk waktu jangka panjang karena kebutuhan yang banyak sementara pendapatan tiap hari tidak mencukupi kebutuhan mutu pangan.

2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan merupakan imbas dari kemiskinan. Menurut anda?

Dulu dapat jamkesmas dan sekarang tidak. Menurut saya ketidakmampuan dalam merawat kesehatan adalah bagian dari ketidakmampuan secara ekonomi.

3. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut anda?

Perumahan dan sanitasi di rumah saya baik adanya tetapi kalau dilihat secara lingkungan maka boleh dikatakan masih ada KK yang belum mempunyai rumah yang layak dan sanitasi yang kurang sehat.

4. Kualitas dan mutu air bersih sebagai indikasi bahwa ketidakmampuan dalam mengelola kesehatan. Menurut anda?

Mutu air bersih secara keseluruhan di desa Mokantarak adalah bersih karena desa memiliki mata air sendiri.

5. Rendahnya akses dan mutu pelayanan pendidikan merupakan bentuk konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut anda?

Sangat membantu demi mengurangi beban perekonomian dalam rumah. Terus terang kalau tidak ada program PNPM-GSC maka sulit dibayangkan bagaimana meningkatkan pendidikan anak karena pendidikan anak penting untuk masa depan yang lebih baik.

A.10 Nama Informan	: ALK
No.Responden	: MK 10
Alamat	: Mokantarak RT 11 RW 6
JenisKelamin	: Perempuan
Usia	: 48 tahun
PendidikanTerakhir	: SMP
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Variabel Komunikasi

1. **Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I implementor PNPM-GSC dibekali dengan dokumen yang relevan dengan kebijakan?**
Implementor mempunyai data tentang ibu hamil, anak balita, anak usia SD dan SMP yang diperoleh dari kantor desa.
2. **Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik sebagai pelaku kebijakan dalam kegiatan PNPM-GSC. Menurut Anda?**
Bagi saya tidak masalah karena implementor menjelaskan dengan baik dan sederhana sehingga saya mudah memahami.
3. **Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya program PNPM-GSC. Menurut anda?**
Iya cukup pengetahuan yang dimiliki oleh para staf PNPM-GSC.

Variabel Sumberdaya

1. **Staf yang dipakai sebagai implementor dalam program PNPM-GSC memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Menurut anda?**
Jumlahnya sekitar 14 orang dan mereka bisa diandalkan.
2. **Para personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program. Menurut anda?**
Mereka yang turun ke rumah saya bercerita sangat detail tentang isi dan maksud program dari PNPM-GSC.
3. **Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut anda?**
Ada tanggung jawab dan program tepat sasaran.
4. **Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Menurut anda?**

Ada seragam, sepatu dan mantel hujan. Untuk anak balita di posyandu disediakan TMT.

Variabel Disposisi

1. Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan program terlihat sangat baik. Menurut anda?
Mendukung program ini bahkan kami dihimbau untuk sebaik mungkin menggunakan program ini.
2. Mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menurut anda?
Ada kerja sama antara petugas PNPM-GSC dengan staf desa.

Variabel Struktur Birokrasi

1. Perumusan masalah dalam program PNPM-GSC cukup lugas dan representatif. Menurut anda?
Iya program ini tepat sasaran dengan masalah yang dihadapi oleh desa Mokantarak.
2. Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik terhadap sasaran maupun terhadap output terlihat baik. Menurut anda?
Iya itu terbukti dengan adanya posyandu, dan renovasi gedung TKK dan SD. Semoga untuk tahun-tahun selanjutnya lebih baik lagi.
3. Rekomendasi atas program dan sasaran program sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang diikutkan dalam program PNPM-MPd. Menurut anda?
Program ini sangat menyentuh masyarakat dan masyarakat merasa sangat terbantu dengan program ini.
4. Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dari kegiatan atau program PNPM-GSC. Menurut anda?
Ada setiap bulan, tiga bulan dan enam bulan evaluasi di kantor desa dan selalu ada peningkatan pelayanan.

Variabel Pengentasan Kemiskinan

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari kemiskinan. Menurut anda?
Soal makan jujurnya tidak cukup apalagi mutu makanan. Semua ini terjadi karena belum bisa mencukupi kebutuhan yang lain sehingga sulit untuk memperoleh makanan yang gizi.

2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan merupakan imbas dari kemiskinan. Menurut anda?

Iya benar sekali. Dalam program ini telah disiapkan bidan dan transportasi yang siap melayani ibu hamil dengan tingkat resiko yang tinggi.

3. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut anda?

Rumah masih sederhana. Sanitasi sudah agak baik untuk dipakai.

4. Kualitas dan mutu air bersih sebagai indikasi bahwa ketidakmampuan dalam mengelola kesehatan. Menurut anda?

Mutu air dari air desa yang dibantu juga oleh PNPM tahun sebelumnya. Iuran air setiap bulan Rp 1.000.

5. Rendahnya akses dan mutu pelayanan pendidikan merupakan bentuk konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut anda?

Benar sekali karena bagaimana mungkin pendidikan yang rendah dapat meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu diharapkan program ini tetap ada di lingkungan kami khususnya KK saya.

UNIVERSITAS TERBUKA

B. Kelurahan Ekasapta

B.1	Nama Informan	: ALK
	No.Responden	: ES 1
	Alamat	: Ekasapta RT 1 RW 1
	JenisKelamin	: Perempuan
	Usia	: 37 tahun
	PendidikanTerakhir	: SMA
	Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Variabel Komunikasi

- 1. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I implementor PNPM-GSC dibekali dengan dokumen yang relevan dengan kebijakan?**
Biasanya implementor sudah memiliki data berupa ibu hamil, balita dan usia anak sekolah.
- 2. Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik sebagai pelaku kebijakan dalam kegiatan PNPM-GSC. Menurut Anda?**
Implementor rata-rata orang di kelurahan Ekasapta jadi komunikasi yang mereka berikan kepada kami juga baik dan penjelasan yang mereka berikan juga memadai.
- 3. Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya program PNPM-GSC. Menurut anda?**
Pengetahuan yang didapat berupa pelatihan KPMD dan TPMD yang berguna dan relevan untuk pelaksanaan program ini.

Variabel Sumberdaya

- 1. Staf yang dipakai sebagai implementor dalam program PNPM-GSC memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Menurut anda?**
Jumlah dan mutu memang memadai. Ada 10 orang pelaku di kelurahan dan 1 FK. Mereka semua mampu setelah dibekali dengan petunjuk teknis pelaksanaan program.
- 2. Para personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program. Menurut anda?**
Iya informasi memadai karena mereka juga berusaha mencari data sasaran yang pasti.

3. **Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut anda?**

Kewenangan diberikan penuh kepada staf yang menjalankan program dan selalu ada tanggung jawab.

4. **Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Menurut anda?**

PMT, imunisasi ibu hamil, posyandu, pemberian uang ujian UN dan US di SD dan SMP

Variabel Disposisi

1. **Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan program terlihat sangat baik. Menurut anda?**

Iya mereka proaktif dan mendukung kegiatan PNPM-GSC

2. **Mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menurut anda?**

Iya mereka turun bersama fasilitator untuk memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini.

Variabel Struktur Birokrasi

1. **Perumusan masalah dalam program PNPM-GSC cukup lugas dan representatif. Menurut anda?**

Rumusan masalah berangkat dari gagasan bersama dan dipilih gagasan yang tepat sasaran dan bermanfaat di dalam lingkungan.

2. **Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik terhadap sasaran maupun terhadap output terlihat baik. Menurut anda?**

Jika masyarakat menerima dengan baik program ini maka kedepannya program ini berjalan dengan baik dan sangat membantu.

3. **Rekomendasi atas program dan sasaran program sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang diikutkan dalam program PNPM-MPd. Menurut anda?**

Semoga program ini berkelanjutan untuk waktu mendatang.

4. **Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dari kegiatan atau program PNPM-GSC. Menurut anda?**

Evaluasi dilakukan secara bertahap sebulan sekali.

Variabel Pengentasan Kemiskinan

1. **Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari kemiskinan. Menurut anda?**

Menurut saya benar tetapi bagaimana cara menyajikan makanan biar ada nilai gizi.

2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan merupakan imbas dari kemiskinan. Menurut anda?

Masyarakat sebaiknya segera sadar akan pola hidup sehat. Karena itu sering-sering mengunjungi rumah sakit atau posyandu untuk mendapatnya pelayanan kesehatan untuk keluarga yang tidak mampu.

3. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut anda?

Perumahan masih belum layak huni. Begitu juga dengan sanitasi. Rata-rata sekita setengah kelurahan ini belum memiliki perumahan dan sanitasi yang sehat.

4. Kualitas dan mutu air bersih sebagai indikasi bahwa ketidakmampuan dalam mengelola kesehatan. Menurut anda?

Air PDAM dan sumur.

5. Rendahnya akses dan mutu pelayanan pendidikan merupakan bentuk konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut anda?

Menurut saya pendidikan itu penting dalam mencerdaskan kehidupan anak di masa mendatang. Maka PNPM-GSC bagi saya sudah sangat menolong pendidikan anak saya.

B.2	Nama Informan	: AHS
	No.Responden	: ES 2
	Alamat	: Ekasapta RT 3 RW 2
	JenisKelamin	: Perempuan
	Usia	: 30 tahun
	PendidikanTerakhir	: SMP
	Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Variabel Komunikasi

1. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I implementor PNPM-GSC dibekali dengan dokumen yang relevan dengan kebijakan?

Iya dalam bidang pendidikan biasanya dilengkapi dengan data pendidikan anak dari tahun ke tahun untuk tingkat SD dan SMP dan data ibu hamil dan jumlah anak balita.

2. Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik sebagai pelaku kebijakan dalam kegiatan PNPM-GSC. MenurutAnda?

Ya bisa secara baik bercerita tentang maksud dan tujuan program.

- 3. Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya program PNPM-GSC. Menurut anda?**

Melalui pelatihan KPMD di tingkat kelurahan sebagai pengetahuan dasar untuk mengelola program ini.

Variabel Sumberdaya

- 1. Staf yang dipakai sebagai implementor dalam program PNPM-GSC memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Menurut anda?**

Staf terdiri dari KPMD 2 orang dan TPMD 8 orang yang sudah dibekali dengan pengetahuan tentang PNPM-GSC

- 2. Para personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program. Menurut anda?**

Iya terutama balita dan ibu hamil serta anak-anak yang masih di SD dan SMP.

- 3. Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut anda?**

Iya mereka bisa bertanggung jawab dalam kegiatan.

- 4. Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Menurut anda?**

Posyandu, uang sekolah untuk murid SD dan SMP, imunisasi dan TMT untuk balita.

Variabel Disposisi

- 1. Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan program terlihat sangat baik. Menurut anda?**

Biasa-biasa saja selama ini.

- 2. Mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menurut anda?**

Hanya bicara saja dan jarang turun bersama tim ke kelompok sasaran.

Variabel Struktur Birokrasi

- 1. Perumusan masalah dalam program PNPM-GSC cukup lugas dan representatif. Menurut anda?**

Masalah dirumuskan kemudian dibuat prioritas.

2. **Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik terhadap sasaran maupun terhadap output terlihat baik. Menurut anda?**

Masih kurang terlihat antusias masyarakat. Masyarakat hanya ingin uang dulu baru mau ikut program.

3. **Rekomendasi atas program dan sasaran program sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang diikutkan dalam program PNPM-MPd. Menurut anda?**

Lanjut terus selama masih ada anggaran.

4. **Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dari kegiatan atau program PNPM-GSC. Menurut anda?**

Evaluasi selama sebulan sekali dengan pantauan Fasilitator Kecamatan.

Variabel Pengentasan Kemiskinan

1. **Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari kemiskinan. Menurut anda?**

Tergantung naik turunnya pendapatan dalam keluarga. Kalau pendapat baik mutu pangan diperhatikan. Kalau tidak maka sebaliknya.

2. **Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan merupakan imbas dari kemiskinan. Menurut anda?**

Iya benar sekali karena dapat terlihat dari semangat mereka masyarakat datang ke posyandu. Bahkan ada yang cuman musiman saja.

3. **Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut anda?**

Sederhana dan apa adanya.

4. **Kualitas dan mutu air bersih sebaga indikasi bahwa ketidakmampuan dalam mengelola kesehatan. Menurut anda?**

Masih menggunakan air sumur.

5. **Rendahnya akses dan mutu pelayanan pendidikan merupakan bentuk konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut anda?**

Sekolah memang penting. Tetapi pengaruh lingkungan juga menyebabkan anak-anak drop out dan susah untuk kembali sekolah lagi.

B.3 Nama Informan : ALK
 No.Responden : ES 2
 Alamat : Ekasapta RT 7 RW 3
 JenisKelamin : Perempuan
 Usia : 53 tahun
 Pendidikan Terakhir : SD
 Pekerjaan : Nelayan

Variabel Komunikasi

1. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I implementor PNPM-GSC dibekali dengan dokumen yang relevan dengan kebijakan?
 Implementor datang dan menanyakan pekerjaan saya, status sekolah saya anak saya dan data keluarga saya.
2. Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik sebagai pelaku kebijakan dalam kegiatan PNPM-GSC Menurut Anda?
 Komunikasi dilakukan dengan baik dan pendekatan kekeluargaan.
3. Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya program PNPM-GSC. Menurut anda?
 Ya berpengaruh.

Variabel Sumberdaya

1. Staf yang dipakai sebagai implementor dalam program PNPM-GSC memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Menurut anda?
 Para personil rela berkorban, kerja keras, bisa bekerja sama dan punya kepedulian.
2. Para personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program. Menurut anda?
 Informasinya memadai.
3. Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut anda?
 Kewenangan ada dan sangat bertanggung jawab.
4. Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Menurut anda?
 Pemberian imunisasi secara gratis kepada bayi, PMT pada setiap minggu di posyandu bagi Balita. Selain itu fasilitas posyandu seperti timbangan bayi. Sedangkan di bidang pendidikan seperti uang UN dan uang transportasi.

Variabel : Disposisi

1. Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan program terlihat sangat baik. Menurut anda?
Sangat mendukung dan proaktif.
2. Mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menurut anda?
Iya kami sering dihimbau, diperingati untuk bisa aktif dalam program ini.

Variabel Struktur Birokrasi

1. Perumusan masalah dalam program PNPM-GSC cukup jelas dan representatif. Menurut anda?
Sering dilibatkan untuk bisa menjawab kebutuhan kami.
2. Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik terhadap sasaran maupun terhadap output terlihat baik. Menurut anda?
Program ini jangan sampai mandek karena kebutuhan masih banyak sehingga masyarakat dihimbau pengertian untuk memberikan data yang benar.
3. Rekomendasi atas program dan sasaran program sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang diikutkan dalam program PNPM-MPd. Menurut anda?
Program ini bisa menjangkau SMU dan para pelaku program perlu diperhatikan.
4. Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dari kegiatan atau program PNPM-GSC Menurut anda?
Evaluasi selalu ada 3 bulan sekali.

Variabel Pengentasan Kemiskinan

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari kemiskinan. Menurut anda?
Dengan pekerjaan sebagai nelayan hidup apa adanya yang penting kebutuhan bisa baik dan anak-anak bisa sekolah. Mutu pangan apa adanya.
2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan merupakan imbas dari kemiskinan. Menurut anda?
Iya. Tetapi dalam program ini pelayanan baik dan normal.
3. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut anda?

Belum pernah rasakan layanan kesehatan dalam program ini.

4. **Kualitas dan mutu air bersih sebaga indikasi bahwa ketidakmampuan dalam mengelola kesehatan. Menurut anda?**

Kualitas air belum tersedia dengan baik.selama ini menggunakan sumur untuk MCK.

5. **Rendahnya akses dan mutu pelayanan pendidikan merupakan bentuk konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut anda?**

Anak kami mampu tetapi ekonomi kami tidak cukup. Harapan program ini bisa sampai SMU.

B.4	Nama Informan	: SYD
	No.Responden	: ES 4
	Alamat	: Ekasapta RT 19 RW 08
	JenisKelamin	: Perempuan
	Usia	: 42 tahun
	PendidikanTerakhir	: SMA
	Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Variabel Komunikasi

1. **Apakah menurut Bapa/Ibu/Saudara/I implementor PNPM-GSC dibekali dengan dokumen yang relevan dengan kebijakau?**

Implementor mempunyai data tentang bayi dan balita, ibu hamil, menyusui, anak usia 5 tahun sampai dengan SMP

2. **Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik sebagai pelaku kebijakan dalam kegiatan PNPM-GSC. MenurutAnda?**

Implementor melakukan sosialisasi dengan memberikan informasi secara baik dan mengkomunikasikan dengan baik isi program PNPM-GSC.

3. **Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya program PNPM-GSC. Menurut anda?**

Pelaku program dapat menjalankan program dengan baik dan selalu ada pergantian dalam pemberdayaan dan pelatihan.

Variabel Sumberdaya

1. **Staf yang dipakai sebagai implementor dalam program PNPM-GSC memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Menurut anda?**

Staf yang dipakai dipilih dengan kriteria sukarela dalam menjalankan program tanpa meninggalkan kualitas pengetahuan yang dimiliki.

2. Para personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program. Menurut anda?

Personil yang turun ke kelompok sasaran mempunyai sikap proaktif dan turun menjangkau dusun-dusun untuk mencari informasi yang memadai.

3. Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut anda?

Staf yang dipakai dalam program memiliki wewenang penuh dan mempunyai tanggung jawab untuk memberi pemahaman kepada masyarakat yang belum sadar dan paham akan kebijakan dalam program PNPM-GSC.

4. Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Menurut anda?

Fasilitas lain berupa PMT, Imunisasi, posyandu dan seragam sekolah serta uang transportasi.

Variabel Disposisi

1. Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan program terlihat sangat baik. Menurut anda?

Sikap dan komitmen pemerintah setempat adalah mendukung dan antusias dalam menerima program PNPM-GSC.

2. Mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menurut anda?

Proaktif dan sering terjun ke dusun-dusun untuk mendengarkan gagasan-gagasan yang menjadi kebutuhan sekaligus masalah di desa kelurahan.

Variabel Struktur Birokrasi

1. Perumusan masalah dalam program PNPM-GSC cukup lugas dan representatif. Menurut anda?

Perumusan masalah dimulai dengan menggali gagasan dan membuat prioritas dari dusun kemudian disosialisasikan di tingkat desa dan selanjutnya di tingkat kecamatan.

2. Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik terhadap sasaran maupun terhadap output terlihat baik. Menurut anda?

Yang jelas masyarakat pasti terbantu untuk waktu yang akan datang.

3. **Rekomendasi atas program dan sasaran program sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang diikntkan dalam program PNPM-MPd. Menurut anda?**
Semoga program ini tetap dijalankan untuk waktu yang akan datang.
4. **Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dari kegiatan atau program PNPM-GSC. Menurut anda?**
Ada evaluasi tiap bulan untuk membuat perbaikan dari pelaksanaan program.

Variabel Pengentasan Kemiskinan

1. **Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari kemiskinan. Menurut anda?**
Makan harian adalah apa adanya dengan terpenuhinya gizi yang cukup baik.
2. **Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan merupakan imbas dari kemiskinan. Menurut anda?**
Akses kesehatan baik dan adanya kerjasama dengan orang kesehatan.
3. **Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut anda?**
Akses sanitasi dan perumahan baik. MCK tersedia baik. Rumah kumuh semakin berkurang.
4. **Kualitas dan mutu air bersih sebaga indikasi bahwa ketidakmampuan dalam mengelola kesehatan. Menurut anda?**
Kualitas air saat ini adalah air PDAM dan sumur.
5. **Rendahnya akses dan mutu pelayanan pendidikan merupakan bentuk konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut anda?**
Tergantung dari pola hidup sehat dan pandangan pentingnya pendidikan untuk masa mendatang.

B.5

Nama Informan	: SKT
No.Responden	: MK 5
Alamat	: Ekasapta RT 03 RW 05
JenisKelamin	: Laki-laki
Usia	: 40 tahun
PendidikanTerakhir	: SMP
Pekerjaan	: Serabutan

Variabel Komunikasi

1. **Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I implementor PNPM-GSC dibekali dengan dokumen yang relevan dengan kebijakan?**

Dokumen yang ada selama ini adalah data ibu hamil, Balita dan anak sekolah usia SD sampai SMP.

2. Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik sebagai pelaku kebijakan dalam kegiatan PNPM-GSC. Menurut Anda?

Implementor mengkomunikasikan dengan baik isi program dan member pemahaman kepada kami jika isi program belum kami pahami secara baik. Catatan pengaturannya lebih baik lagi dan pembayaran uang pendidikan langsung ker rumah dan rincian ke orang tua.

3. Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya program PNPM-GSC. Menurut anda?

Berpengaruh terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang masih berada dalam lingkaran kemiskinan.

Variabel Sumberdaya

1. Staf yang dipakai sebagai implementor dalam program PNPM-GSC memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Menurut anda?

Staf yang dipakai cocok dan pas dalam program ini.

2. Para personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program. Menurut anda?

Menurut saya pegawai PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai.

3. Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut anda?

Mereka mempunyai tanggung jawab yang bagus dalam mengelola program PNPM-GSC.

4. Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Menurut anda?

PMT, imunisasi gratis dan adanya kader posyandu yang selalu ada setiap waktu di posyandu.

Variabel Disposisi

1. Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan program terlihat sangat baik. Menurut anda?

Aparat pemerintah pada prinsipnya mendukung program PNPM-GSC.

3. **Mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menurut anda?**

Aparat dan pemerintah selalu turun bersama staf dan mengikuti prosedur.

Variabel Struktur Birokrasi

1. **Perumusan masalah dalam program PNPM-GSC cukup lugas dan representatif. Menurut anda?**

Selama ini pemerintah kelurahan tidak dilibatkan dalam perumusan program atau memang tidak dilibatkan.

2. **Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik terhadap sasaran maupun terhadap output terlihat baik. Menurut anda?**

Untuk masa yang akan datang semoga lebih baik dari saat sekarang dan itu pun semua tergantung pengurus.

3. **Rekomendasi atas program dan sasaran program sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang diikutkan dalam program PNPM-MPd. Menurut anda?**

Semoga program ini berkelanjutan khususnya bisa sampai SMU.

4. **Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dari kegiatan atau program PNPM-GSC. Menurut anda?**

Pemantauan dan evaluasi selalu dilakukan secara berkala. Waktunya tidak dipastikan dengan baik.

Variabel Penyesuaian Kemiskinan

1. **Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari kemiskinan. Menurut anda?**

Persediaan makanan masih minim karena tidak ada pekerjaan dan adanya beban untuk anak.

2. **Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan merupakan imbas dari kemiskinan. Menurut anda?**

Akses kesehatan dengan adanya program ini terlihat baik dan pelayanan di posyandu juga terkesan normal.

3. **Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut anda?**

Perumahan masih sederhana dan MCK belum ada.

4. **Kualitas dan mutu air bersih sebagai indikasi bahwa ketidakmampuan dalam mengelola kesehatan. Menurut anda?**

Kualitas air bersih dengan air PAM dan air sumur

5. Rendahnya akses dan mutu pelayanan pendidikan merupakan bentuk konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut anda?

Berpengaruh karena tergantung faktor ekonomi keluarga dalam merencanakan pendidikan untuk anak.

B.6	Nama Informan	: HBM
	No.Responden	: ES 6
	Alamat	: Ekasapta RT 10 RW 05
	JenisKelamin	: Laki-laki
	Usia	: 38 tahun
	PendidikanTerakhir	: SMA
	Pekerjaan	: Tukang Ojek

Variabel Komunikasi

1. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I implementor PNPM-GSC dibekali dengan dokumen yang relevan dengan kebijakan?

Implementor dibekali dengan dokumen yang memuat data sasaran tiap RT dan RW yang meliputi ibu hamil, bayi dan balita serta anak usia sekolah dari SD sampai SMP.

2. Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik sebagai pelaku kebijakan dalam kegiatan PNPM-GSC. MenurutAnda?

Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik isi program PNPM GSC.

3. Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya program PNPM-GSC. Menurut anda?

Pengetahuan implementor dibekali dengan pelatihan KMPD dan cocok dalam membantu kelancaran pelaksanaan program PNPM-GSC.

Variabel Sumberdaya

1. Staf yang dipakai sebagai implementor dalam program PNPM-GSC memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Menurut anda?

Pelaku yang dijadikan staf bagus tetapi masih monoton dan kurang transparan.

2. Para personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikau informasi penjelasan pada sasaran program. Menurut anda?

Personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai guna menunjang proses pelaksanaan program.

3. **Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut anda?**

Kewenang staf tetap ada tetapi masih ada pilih kasih dalam memberikan informasi.

4. **Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Menurut anda?**

Fasilitas fisik berbentuk posyandu dan berupa PMT, transportasi uang transportasi untuk anak sekolah SD-SMP

Variabel Disposisi

1. **Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan program terlihat sangat baik. Menurut anda?**

Sikap dan komitmen aparat pemerintah selalu mendukung program dan isi program untuk kebutuhan masyarakat.

2. **Mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menurut anda?**

Mental proaktif ditunjukkan oleh aparat pemerintah dengan selalu turun ke dusun-dusun dalam mensosialisasikan isi program.

Variabel Struktur Birokrasi

1. **Perumusan masalah dalam program PNPM-GSC cukup lugas dan representatif. Menurut anda?**

Perumusan masalah dimulai dengan menggali gagasan oleh semua masyarakat dan selanjutnya penentuan prioritas sebagai keterwakilan kebutuhan.

2. **Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik terhadap sasaran maupun terhadap output terlihat baik. Menurut anda?**

Program tepat sasaran dan untuk waktu mendatang memberikan yang terbaik.

3. **Rekomendasi atas program dan sasaran program sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang dilibatkan dalam program PNPM-MPd. Menurut anda?**

Pelaku harus terbuka dan jangan pilih kasih dan bantuan harus tepat sasaran dan bantuan dalam bentuk barang bukan uang.

4. Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dari kegiatan atau program PNPM-GSC. Menurut anda?

Evaluasi berkala selalu dibuat dan harapan semoga program tetap berjalan baik.

Variabel Pengentasan Kemiskinan

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari kemiskinan. Menurut anda?

Pola konsumsi pangan cukup baik. Secara

2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan merupakan imbas dari kemiskinan. Menurut anda?

Akses terhadap kesehatan semenjak adanya program PNPM-GSC terlihat cukup baik dan ditunjang dengan pelayanan yang baik.

3. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut anda?

Rumah tempat tinggal saat ini layak huni dan begitu juga dengan sanitasi seperti MCK ada dan layak.

4. Kualitas dan mutu air bersih sebagai indikasi bahwa ketidakmampuan dalam mengelola kesehatan. Menurut anda?

Sumber air masih menggunakan air sumur.

5. Rendahnya akses dan mutu pelayanan pendidikan merupakan bentuk konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut anda?

Sangat berpengaruh dan saat ini diharapkan tingkat kesadaran masyarakat bisa meningkat tentang arti pentingnya pendidikan bagi kesejahteraan di masa depan.

B.7	Nama Informan	: SBI
	No. Responden	: ES 7
	Alamat	: Ekasapta RT 17 RW 08
	Jenis Kelamin	: Perempuan
	Usia	: 35 tahun
	Pendidikan Terakhir	: SD
	Pekerjaan	: Penjual Ikan

Variabel Komunikasi

1. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I implementor PNPM-GSC dibekali dengan dokumen yang relevan dengan kebijakan?

Implementor dibekali dengan data tentang ibu hamil, bayi balita dan anak usia SD-SMP.

2. **Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik sebagai pelaku kebijakan dalam kegiatan PNPM-GSC. Menurut Anda?**
Implementor mengkomunikasikan dengan baik isi program sesuai dengan petunjuk teknis (JUKNIS) dalam program PNPM-GSC.
3. **Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya program PNPM-GSC. Menurut anda?**
Berpengaruh karena pengetahuan yang relevan dapat memberikan pemahaman yang sama tentang tujuan akhir dari program yang dijabarkan dalam isi program.

Variabel Sumberdaya

1. **Staf yang dipakai sebagai implementor dalam program PNPM-GSC memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Menurut anda?**
Mutu dan jumlah staf ada 5 orang dan sukarela. Mereka bisa diandalkan dan bisa dikatakan mampu untuk menjalankan program PNPM-GSC.
2. **Para personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program. Menurut anda?**
Informasi yang dimiliki para personil sangat memadai sehingga memudahkan mereka menjalankan implementasi kebijakan PNPM-GSC.
3. **Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut anda?**
Kewenangan dan tanggung jawab tetap ada yang dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban dari program yang dilakukan.
4. **Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Menurut anda?**
PMT dan Imunisasi serta posyandu.

Variabel Disposisi

1. **Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan program terlihat sangat baik. Menurut anda?**
Sikap dan komitmen aparat pemerintah mendukung dan terlihat aktif dalam setiap pertemuan-pertemuan yang membahas perkembangan program.

2. **Mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menurut anda?**

Mental yang baik ditunjukkan dengan sikap selalu mengingatkan kami akan pentingnya program.

Variabel Struktur Birokrasi

1. **Perumusan masalah dalam program PNPM-GSC cukup lugas dan representatif. Menurut anda?**

Perumusan masalah dimulai dari dusun untuk mencari gagasan masalah.

2. **Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik terhadap sasaran maupun terhadap output terlihat baik. Menurut anda?**

Bisa berjalan dengan baik dan dapat mendatangkan manfaat yang lebih banyak.

3. **Rekomendasi atas program dan sasaran program sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang diikutkan dalam program PNPM-MPd. Menurut anda?**

Semoga program ini tetap berjalan dan berkelanjutan walau dananya kecil tapi cukup membantu dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

4. **Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dari kegiatan atau program PNPM-GSC. Menurut anda?**

Selalu ada evaluasi tiap tahun, semester, triwulan dan tiap bulan.

Variabel Pengentasan Kemiskinan

1. **Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari kemiskinan. Menurut anda?**

Ketersediaan mutu pangan untuk sementara cukup tersedia.

2. **Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan merupakan imbas dari kemiskinan. Menurut anda?**

Untuk kesehatan maka dapat dikatakan sampai saat ini pelayanan kesehatan baik sekali.

3. **Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut anda?**

Rumah dan sanitasi baik dan memenuhi syarat kesehatan.

Variabel Sumberdaya

1. **Staf yang dipakal sebagai implementor dalam program PNPM-GSC memiliki jnmlah dan mutu yang bisa diandalkan. Menrrut anda?**

Koordinator terdiri dari 2 orang. TPK 3 orang dan tim permusyawaratan desa sebanyak 6 orang. Para pelaku atau implementor ini selalu bekerja sama dalam meingplementasikan isi kebijakan program.

2. **Para personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program. Menurut anda?**

Informasi biasanya datang dari kecamatan dan kemudian disosialisasikan di tingkat kelurahan dan dusun serta RT dan RW.

3. **Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut anda?**

Kewenangan para staf selalu ada sebagai bagian tanggung jawab dalam program di lapangan.

4. **Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Menurut anda?**

Untuk balita berupa makanan tambahan, untuk murid SD-SMP berupa sepatu, seragam sekolah dan uang transportasi. Untuk bayi berupa imunisasi sebanyak 2 kali.

Variabel Disposisi

1. **Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan program terlihat sangat baik. Menurut anda?**

Sikap dan komitmen aparat pemerintah tetap mendukung walaupun kadang-kadang bertolak belakang.

2. **Mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menurut anda?**

Mental yang ditunjukkan adalah berlebihan dan kadang meminta laporan.

Variabel Struktur Birokrasi

1. **Perumus masalah dalam program PNPM-GSC cukup lugas dan representatif. Menurut anda?**

Ada dan cukup lugas perumusan masalah

2. **Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik terhadap sasaran maupun terhadap output terlihat baik. Menurut anda?**

Yakin lebih baik dan yang terpenting adalah kerja sama.

3. **Rekomendasi atas program dan sasaran program sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang diikutkan dalam program PNPM-MPd. Menurut anda?**

Berkelanjutan dan ada program-program yang lebih inovatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang lebih membutuhkan.

4. **Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dari kegiatan atau program PNPM-GSC. Menurut anda?**

Ada evaluasi 2 bulan sekali.

Variabel Pengentasan Kemiskinan

1. **Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari kemiskinan. Menurut anda?**

Gizi baik dan sangat memperhatikan kadar gizi.

2. **Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan merupakan imbas dari kemiskinan. Menurut anda?**

Ya. Tetapi dengan adanya program PNPM-GSC ada peningkatan kesehatan karena ada pelayanan imunisasi gratis, pemeriksaan ibu hamil dan makanan tambahan untuk balita.

3. **Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut anda?**

Perumahan dan sanitasi sudah termasuk baik dan layak dipakai dan ditempati.

4. **Kualitas dan mutu air bersih sebagai indikasi bahwa ketidakmampuan dalam mengelola kesehatan. Menurut anda?**

Kualitas dan mutu air berasal dari sumur kelurahan dan air PDAM.

5. **Rendahnya akses dan mutu pelayanan pendidikan merupakan bentuk konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut anda?**

Iya. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan maka semakin baik juga tingkat kesejahteraan rakyat. Hal ini dilihat dari tingkat drop out di lingkungan kelurahan Ekasapta.

B.9	Nama Informan	: FTM
	No.Responden	: ES 9
	Alamat	: Ekasapta RT 18 RW 09
	JenisKelamin	: Perempuan
	Usia	: 26 tahun
	PendidikanTerakhir	: SD
	Pekerjaan	: Ibu RumahTangga

Variabel Komunikasi

1. **Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I implementor PNPM-GSC dibekali dengan dokumen yang relevan dengan kebijakan? Implementor dibekali dengan informasi tentang pendidikan kelompok sasaran seperti ibu hamil, balita dan anak-anak yang mengenyam pendidikan di SD-SMP.**
2. **Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik sebagai pelaku kebijakan dalam kegiatan PNPM-GSC. Menurut Anda? Baik dan penuh tanggung jawab**
3. **Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya program PNPM-GSC. Menurut anda? Iya, implementor yang diturunkan ke kelompok sasaran sudah dilengkapi dengan petunjuk teknis.**

Variabel Sumberdaya

1. **Staf yang dipakai sebagai implementor dalam program PNPM-GSC memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Menurut anda? Staf yang dipakai sebagai implementor memiliki jumlah dan mutu yang dapat diandalkan karena sudah dibekali dengan pedoman teknis.**
2. **Para personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program. Menurut anda? Informasi cukup jelas karena sebelumnya sudah ada pemetaan kelompok sasaran dari tingkat RT/RW, dusun dan kelurahan.**

- 3. Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut anda?**

Cukup baik dan cukup bijak dalam menganalisis isi program.

- 4. Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Menurut anda?**

Posyandu dan fasilitas pendidikan anak seperti sepatu, seragam sekolah dan uang ujian.

Variabel Disposisi

- 1. Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan program terlihat sangat baik. Menurut anda?**

Ada peranan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program berupa kesediaan aparat pemerintah dalam mensosialisasikan isi program.

- 2. Mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menurut anda?**

Pada prinsipnya baik dan mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Untuk mengawasi bantuan di bidang pendidikan, aparat dan pemerintah menegur anak-anak yang tidak sekolah.

Variabel Struktur Birokrasi

- 1. Perumusan masalah dalam program PNPM-GSC cukup lugas dan representatif. Menurut anda?**

Perumusan masalah dalam program ini cocok untuk dijalankan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kelurahan Ekasapta.

- 2. Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik terhadap sasaran maupun terhadap output terlihat baik. Menurut anda?**

Untuk ke depannya program ini cocok dan bagus dilanjutkan.

- 3. Rekomendasi atas program dan sasaran program sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang diikutkan dalam program PNPM-MPd. Menurut anda?**

Program PNPM-GSC sangat menyentuh kebutuhan masyarakat.

- 4. Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dari kegiatan atau program PNPM-GSC. Menurut anda?**

Pemantauan dan evaluasi ada setiap 3 bulan sekali dan bertujuan untuk mengetahui peningkatan program.

Variabel Pengentasan Kemiskinan

1. **Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari kemiskinan. Menurut anda?**

Kecukupan mutu pangan sejauh ini bisa diatasi dengan memperhatikan nilai gizi pada makanan.

2. **Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan merupakan imbas dari kemiskinan. Menurut anda?**

Menurut saya, saya setuju. Setelah adanya program ini layanan kesehatan mulai terasa menjadi kebutuhan utama seperti imunisasi, TMT untuk balita dan kontrol kesehatan untuk ibu hamil.

3. **Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut anda?**

Perumahan dan sanitasi (MCK) baik dan layak huni dan layak dipakai.

4. **Kualitas dan mutu air bersih sebagai indikator bahwa ketidakmampuan dalam mengelola kesehatan. Menurut anda?**

Mutu air bersih tidak menjadi masalah karena ada air desa yang pada tahun sebelumnya mendapat bantuan dari PNPM.

5. **Rendahnya akses dan mutu pelayanan pendidikan merupakan bentuk konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut anda?**

Ada peningkatan dalam pendidikan apalagi ditunjang dengan uang transportasi.

B.10 Nama Informan : AMP
 No.Responden : ES 10
 Alamat : Ekasapta RT 10 RW 05
 JenisKelamin : Pria
 Usia : 42 tahun
 PendidikanTerakhir : SMA
 Pekerjaan : Petani

Variabel Komunikasi

1. **Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I implementor PNPM-GSC dibekali dengan dokumen yang relevan dengan kebijakan?**

Implementor mengambil data penduduk di desa. setelah dari kelurahan implementor mengunjungi rumah-rumah sasaran dalam program ini.

2. Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik sebagai pelaku kebijakan dalam kegiatan PNPM-GSC. Menurut Anda?

Pada umumnya mereka datang menceritakan maksud dan tujuan dari program PNPM-GSC. setelah itu mereka meminta tanggapan atas program dan mengajak untuk mengikuti program ini.

3. Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya program PNPM-GSC. Menurut anda?

Iya. mereka menggunakan bahasa yang sederhana sehingga memudahkan kami untuk mengerti dan memahami isi program ini.

Variabel Sumberdaya

1. Staf yang dipakai sebagai implementor dalam program PNPM-GSC memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Menurut anda?

Jumlah staf ada 10 orang dan bisa diandalkan dan mereka tinggal di kelurahan Ekasapta.

2. Para personil yang terjun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program. Menurut anda?

Iya dan mereka sampaikan apa adanya dengan kondisi yang ada dalam program ini.

3. Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut anda?

Sangat baik dan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap program ini.

4. Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Menurut anda?

Pembangunan posyandu, uang transportasi untuk anak SD-SMP, TMT untuk anak balita dan pelayanan rutin di posyandu.

Variabel Disposisi

1. Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan program terlihat sangat baik. Menurut anda?

Ada dukungan dalam bentuk komitmen dari pemerintah setempat tetapi terkesan pemerintah tidak terlalu respek terhadap program ini.

2. **Mental yang baik yang ditunjukkan oleh aparat dan pemerintah setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menurut anda?**

Ada dalam bentuk delegasi wewenang yang diberikan kepada staf atau pegawai PNPm.

Variabel Struktur Birokrasi

1. **Perumusan masalah dalam program PNPm-GSC cukup lugas dan representatif. Menurut anda?**

Iya. Staf PNPm yang sudah mendapatkan data dari kelurahan dan mereka tahu kebutuhan kami. Jadi disaat mereka datang ke rumah mereka sudah mengantongi apa saja kekurangan kami sehingga bisa diikutkan dalam program PNPm-GSC.

2. **Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPm-GSC baik terhadap sasaran maupun terhadap output terlihat baik. Menurut anda?**

Lebih baik dan semoga anak kami dapat bantuan lagi dari program ini.

3. **Rekomendasi atas program dan sasaran program sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yang diikutkan dalam program PNPm-MPd. Menurut anda?**

Untuk ke depannya semoga program ini dapat menjawab kebutuhan kami khususnya pendidikan anak.

4. **Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dari kegiatan atau program PNPm-GSC. Menurut anda?**

Evaluasi diadakan di balai desa dan pemantauan selalu dari jauh. Tidak ada staf yang datang ke rumah setelah program ini berjalan.

Variabel Pengentasan Kemiskinan

1. **Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari kemiskinan. Menurut anda?**

Mutu pangan kadang tidak baik.

2. **Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan merupakan imbas dari kemiskinan. Menurut anda?**

Iya. Setelah ada program ini saya merasa terbantu. Anak saya mendapat pelayanan kesehatan seperti TMT dan penimbangan berat badan tiap bulan di posyandu.

3. **Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut anda?**

Akses layanan perumahan dan sanitasi baik.

4. **Kualitas dan mutu air bersih sebaga indikasi bahwa ketidakmampuan dalam mengelola kesehatan. Menurut anda?**

Kualitas air baik karena air desa yang dibantu juga dari program PNPM sebelumnya.

5. **Rendahnya akses dan mutu pelayanan pendidikan merupakan bentuk konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut anda?**

Sangat membantu kami dan diharapkan untuk ke depan PNPM-GSC tetap ada di kelurahan Ekasapta

UNIVERSITAS TERBUKA